HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pendiri:
P.K. OJONG (1920-1980)
JAKOB OETAMA (1931-2020)

KOMPAS
1965-2020

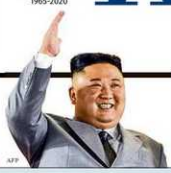
KOMPAS

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

16 Halaman/22 Halaman E-paper
Nomor 105 Tahun Ke-56

E-mail kompas@kompas.id
Redaksi (021) 5347710
Iklan (021) 80626688-99
Layanan Pelanggan
(021) 25676000 (WA) 0812 900 50800

Harga Langganan Rp 98.000,00
+ Ongkos Kirim
Harga Eceran Rp 4.500,00



Rudal Korea Utara
Rudal balistik antarbenua yang dipamerkan Korea Utara hadirkan kecemasan.
INTERNASIONAL/HLM 4

RUU Pasca-persetujuan
Kekhawatiran terhadap RUU Cipta Kerja juga terkait kesiapan pelaksanaannya.
OPINI/HLM 6



"Dinasti" LA Lakers
LA Lakers sambut masa depan bersama LeBron James dan Anthony Davis.
OLAHRAGA/HLM 14

SELASA, 13 OKTOBER 2020 www.kompas.id @hariankompas @hariankompas @hariankompas

Pengerukan Waduk Ria Rio



KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara ekskavator yang dikerahkan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengeruk Waduk Ria Rio di Pulo Gadung, Jakarta Timur, Senin (12/10/2020). Kedalaman Waduk Ria Rio semestinya 5-6 meter. Namun, karena sedimentasi, di beberapa bagian kedalamannya tinggal 1 meter. Pengerukan waduk dan saluran air terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengantisipasi datangnya musim hujan.

Draf UU Cipta Kerja Diduga Berubah

Dalam sehari, beredar dua draf UU Cipta Kerja yang berbeda. Hal ini memunculkan dugaan adanya perubahan atas RUU itu meski telah disetujui untuk disahkan menjadi UU.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang beredar di masyarakat justru berubah-ubah. Jika perubahan ini benar terjadi dan dilakukan setelah melalui pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR, akan membuat regulasi yang dibentuk dengan metanisme *omnibus law* itu berpotensi cacat formil.

Setelah RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu, hingga Senin (12/10/2020), *Kompas* menerima tiga draf UU itu.

Draf pertama setebal 905 halaman diperoleh dari unsur pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi dan Willy Aditya, pada 5 Oktober. Saat itu, keduanya menyebutkan substansi dalam draf itu merupakan yang disetujui dalam rapat paripurna. Namun, draf belum dapat diakses oleh publik karena, menurut mereka, ada kesalahan penulisan kata serta kurangnya tanda baca di dalam draf sehingga masih perlu diperbaiki. Adapun substansi dijanjikan tidak berubah.

Senin pagi, *Kompas* menerima draf UU dengan jumlah 1.035 halaman dari Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar. Indra mengatakan, draf itu hasil perbaikan oleh Baleg DPR pada Minggu (11/10) malam. Ia pun menyebutkan draf itu draf final yang akan dikirim ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani dan disahkan.

Namun, pada Senin malam, Indra kembali menyampaikan draf UU. Kali ini jumlah halaman pada draf menyusut menjadi total 812 halaman. Alasannya, bentuk format kertas diganti, dari semula berbentuk format kertas legal menjadi A4. "Ini draf yang final. Sudah tidak akan ada lagi rapat perbaikan draf oleh Baleg karena sudah selesai," katanya.

Menurut Indra, perbaikan draf dilakukan oleh Baleg DPR bersama tenaga ahli Baleg.

Perubahan substansi

Selain dari jumlah halaman, hasil pengecekan *Kompas*, juga ada perbedaan sejumlah substansi di tiga draf tersebut. Misalnya, aturan pesangon. Pasal 156 dalam draf versi 905 halaman mengatur, pemberian pesangon saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan "paling banyak" 19 kali upah sesuai dengan masa kerja. Pada draf 1.035 halaman, frasa "paling banyak" dihapus. Sebagai gantinya, diberikan frasa "dengan ketentuan". Frasa "dengan ketentuan" itu kemudian dipertahankan dalam draf versi 812 halaman.

Perubahan juga terjadi pada bunyi Pasal 156 Ayat 1. Di draf 905 halaman disebutkan, pengusaha wajib membayar pesangon bagi buruh yang terkena PHK. Namun, aturan ini berubah di draf 1.035 halaman sehingga kewajiban pengusaha membayar pesangon hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti disebutkan pada Pasal 154A. Selanjutnya, pada draf 812 halaman, kondisi-kondisi tertentu itu dihapus sehingga bunyi pasal kembali seperti pada draf 905 halaman.

Terkait draf terbaru dengan

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

>> BACA JUGA:

Publikasi Draf
Belum jelas kapan publik dapat mengakses draf resmi UU Cipta Kerja.
KOMPAS.ID

klik.kompas.id/publikasidraft

BACA JUGA HLM 2, 5, 6, 9

Mendobrak Kelambanan Birokrasi

ANALISIS EKONOMI



A PRASETYANTOKO
Rektor Unika Atma Jaya Jakarta

Kebijakan publik adalah soal legitimasi, bukan benar atau salah. Masalahnya, dalam demokrasi, legitimasi dibangun dari konsensus atas berbagai kepentingan yang bisa saling menegasi. Di situlah dilema utama pengambilan kebijakan pada era demokrasi. Kecepatan birokrasi merespons perubahan situasi sangat krusial untuk keluar dari dilema rumit ini.

Begitulah situasi yang terjadi dengan polemik hebat soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disetujui untuk disahkan DPR pada 5 Oktober. Ada dua hal yang menjadi fokus perdebatan, proses penyusunan dan substansinya. Dari sisi proses, kritik tertuju pada dinamika yang dianggap tertutup dan terlalu cepat untuk kerangka perundangan yang sedemikian luas dan kompleks. Dari sisi substansi, ada titik-titik perdebatan, seperti perlindungan pekerja dan lingkungan yang berkurang serta kembalinya otoritas kebijakan di pemerintah pusat (resentralisasi).

(Bersambung ke hlm 15 kol 6-7)

PENANGANAN COVID-19

270 Juta Vaksin Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menyiapkan 270 juta vaksin Covid-19 sampai dengan kuartal keempat tahun 2020. Sambil persiapan tersebut berjalan, upaya pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pasien Covid-19 terus ditingkatkan. Masyarakat pun diingatkan agar selalu tertib menjalankan protokol kesehatan.

Dalam rapat terbatas untuk menerima laporan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Senin (12/10/2020), di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Joko Widodo meminta supaya peta jalan pemberian vaksin Covid-19 diselesaikan pekan ini. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Covid-19 dapat segera diikuti dengan persiapan pengadaan dan strategi distribusi vaksin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan, vaksin Covid-19 tersebut di antaranya diproduksi perusahaan farmasi Cansino, Sinovac, Sinopharm, dan AstraZeneca.

Upaya menyiapkan kebutuhan vaksin dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir dengan melakukan lawatan ke Inggris dan Swiss. "Tujuan utama dari perjalanan ini, antara lain, mengamankan komitmen dari sumber lain untuk vaksin Covid-19 dalam kerangka kerja sama vaksin bilateral," kata Retno menjelang bertolak ke London, Senin.

Khusus AstraZeneca, Pemerintah Indonesia telah mencapai kesepakatan dan komitmen untuk pengadaan hingga 100 juta. Vaksin yang disiapkan pada tahap awal oleh AstraZeneca ialah sebanyak 50 juta dari total 100 juta vaksin yang diproduksi secara keseluruhan bagi Indonesia.

"Vaksin akan diberikan untuk 160 juta orang dan pemberian akan bertahap sampai tahun 2022," kata Airlangga.

Dengan penghitungan setiap orang mendapatkan dua kali suntikan vaksin, ia menyatakan, Indonesia diperkirakan membutuhkan 320 juta dosis vaksin. Pada tahap awal, vaksin akan diberikan kepada tenaga medis, TNI, Polri, aparat hukum, dan pelayanan publik. Setelah itu, akan disusul pemberian vaksin kepada masyarakat, di antaranya tokoh agama, tenaga pendidik, aparatur, dan masyarakat yang berusia 19-59 tahun.

"Dalam perencanaan, telah diamankan ketersediaan vaksin untuk 135 juta orang atau 270 juta dosis vaksin hingga tahun 2021. Sisanya nanti

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

klik.kompas.id/menemukanvaksin

PANDEMI COVID-19

Stigma dan Derita Berkepanjangan

Wabah Covid-19 memang menular dan mematikan. Namun, stigma sosial bisa meninggalkan penderitaan berkepanjangan, seperti dialami Inriaty Karawaheni (54), perempuan asal Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Ahmad Arif

Setelah kehilangan suami dan anaknya akibat Covid-19, dia harus terusir dari rumahnya karena stigma oleh lingkungannya.

Pada 27 April 2020, anak sulungnya, Berkatnu Indrawan (28), meninggal karena Covid-19. Dokter muda ini tertular saat bertugas di Rumah Sakit Soewandhie, Surabaya, dan meninggal setelah dirawat. Dua bulan kemudian, pada 27 Juni 2020, suami Inriaty, Suriawan Pribandi, meninggal dengan gejala Covid-19 di salah satu RS di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Hingga meninggal, hasil tes almarhum belum keluar. Inriaty dan anak bungsunya, Andika (18), menjalani tes usap dan isolasi mandiri. Keduanya tinggal di sebuah kompleks permukiman di Palangkaraya. "Tetangga depan rumah sudah saya kasih tahu, kami menjalani isolasi mandiri dan hanya keluar rumah untuk mengambil makanan kiriman dari saudara di pagar. Dia sepertinya menerima situasi kami," ujarnya.

Namun, malam itu Inriaty ditelepon pengurus rukun tetangga, diinterogasi mengenai hasil tesnya. "Saya jawab belum terima hasil, tetapi saya sudah mendapat tes rontgen dan darah, hasilnya bagus. Dia tidak percaya dan menuduh saya melarikan diri dari rumah sakit," tuturnya.

Senin pagi, 29 Juni 2020, Inriaty kembali menerima telepon dari pengurus RT. Tanpa basa-basi, dia dan anaknya diminta meninggalkan rumah. "Dia bilang saya dan anak saya positif dan warga khawatir kami akan menularkan ke lingkungan. Entah dari mana dia dapat hasil tes saya, katanya dari puskesmas, padahal saya belum dapat," ujarnya.

Siang harinya, Inriaty menerima hasil tes dari puskesmas yang menyatakan bahwa dia dan anak bungsunya positif Covid-19. Sudah kehilangan suami dan anak sulungnya, kini hidup mereka terancam. "Saya berusaha tenang karena saya dan anak tak merasa sakit meski takut

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

SUARA TAK TERDENGAR

BACA JUGA HLM 8

#lindungidiridansekitar

Sumber Informasi Tepercaya Terkait Covid-19



INDEKS

Kisah Kapal Induk

Perang Dunia II di Pasifik meninggalkan jejak sejarah di Nusantara. Salah satunya, kapal induk USS Langley yang tenggelam di selatan Cilacap.
KOMPAS.ID



klik.kompas.id/uss-langley

READ EDITORS' CHOICE IN ENGLISH kompas.id

Alur Pembentukan Undang-Undang



Sumber: UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan UU No 15/2019, UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan DPR No 1/2020 tentang Tata Tertib, serta pemberitaan *Kompas*. Diolah Litbang *Kompas*/RTA

INFOGRAFIK: ANDRI

PILKADA 2020

Penundaan Jawab Kekhawatiran Pemilih

JAKARTA, KOMPAS — Menjawab banyaknya calon pemilih yang enggan memilih dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 karena khawatir tertular Covid-19, penundaan pemilihan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu. Penundaan tak perlu dilakukan di semua daerah yang menggelar pemilihan, tetapi bisa secara parsial.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo dalam seminar daring bertajuk "Pilkada di Masa Pandemi" yang diselenggarakan oleh UI, Senin (12/10/2020), mengatakan, dengan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 pada 9 Desember yang kemungkinan digelar di tengah pandemi Covid-19, partisipasi pemilih untuk memilih dalam pilkada dikhawatirkan akan turun. Hal ini terutama karena mereka khawatir akan tertular Covid-19 saat ke tempat pemungutan suara (TPS).

Potensi penurunan partisipasi pemilih ini, lanjut Eko, sudah terlihat pula dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Mengutip hasil survei itu, 20–46 persen warga enggan ke TPS di tengah situasi pandemi Covid-19.

Untuk mencegah hal itu terjadi, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu perlu memikirkan penundaan pemilihan. Penundaan tak perlu dilakukan di semua daerah—berjumlah 270 daerah—yang menggelar Pilkada 2020. Penundaan bisa saja dilakukan secara parsial, misal di daerah dengan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan rendah.

Bersamaan dengan itu, dari total 270 daerah yang menggelar pilkada, dipilih beberapa daerah yang paling siap untuk dijadikan percontohan pelaksanaan pemilihan yang aman dari penularan Covid-19. "Dengan *big data* (mahadata), kita bisa melihat daerah mana saja yang memiliki kepatuhan (protokol kesehatan) tinggi dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan memadai sehingga bisa melihat daerah mana saja yang bisa melakukan pilkada dan mana yang ditunda," kata Eko.

Selain Eko Prasojo, hadir pula sebagai narasumber dalam diskusi tersebut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Valina Singka Subekti, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Brigadir Jenderal Yusron Yunus, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik Piliang.

Parameter pilkada

Valina Singka Subekti pun mendorong KPU membuat mitigasi risiko guna menentukan parameter daerah yang bisa melanjutkan dan harus menunda pilkada. "KPU harus bersuara kuat menjamin semua tahapan berjalan baik karena bisa menentukan pilkada tetap dilanjutkan atau tidak," ujarnya.

Menurut Bambang Soesatyo, masih memungkinkan adanya kebijakan alternatif terkait Pilkada 2020. Hal itu tergantung dari hasil evaluasi pemerintah karena undang-undang telah memberikan ruang untuk penundaan pilkada.

Yusron Yunus mengatakan, penundaan memang bisa ditempuh jika terjadi keadaan darurat. Namun, hingga kini, opsi tersebut belum diambil. Pemerintah tetap pada sikapnya, yaitu pilkada dilanjutkan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Salah satunya, memastikan protokol kesehatan diterapkan di setiap tahapan.

Akmal Malik menambahkan, di daerah yang menggelar pilkada, risiko penularan Covid-19 justru menurun. Jumlah zona merah, misalnya, turun dari 45 daerah pada 6 September 2020 menjadi 31 daerah. "Kami harap ini dampak dari kampanye calon di pilkada," katanya. (SYA)

KILAS POLITIK & HUKUM

TGPF Sudah Tuntaskan Investigasi Lapangan

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Papua, optimistis target investigasi dua minggu tercapai. Tim TGPF sudah bertolak dari Papua ke Jakarta, Senin (12/10/2020). Mereka sudah berada di Papua sejak Rabu (7/10). Tim bertugas mencari kebenaran atas penembakan warga sipil, pendeta, dan dua anggota TNI di Intan Jaya dalam kurun waktu 16-20 September. Ketua Tim Investigasi Lapangan TGPF Intan Jaya Benny Mamoto dalam keterangan tertulis mengatakan, tim kembali ke Jakarta karena sudah cukup mengumpulkan data dan informasi dari lapangan. Di lokasi penembakan di Intan Jaya, tim investigasi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), bertemu saksi-saksi di TKP, serta mewawancarai 25 saksi. "Meski dalam kondisi ancaman gangguan keamanan di sana, kami bekerja maksimal dan optimistis target tercapai," ujar Benny. (DEA)

Joko Tjandra Mulai Jalani Sidang Hari Ini

Tiga tersangka perkara surat jalan palsu terpidana perkara pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali, Joko Tjandra, akan menjalani sidang perdana yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (13/10/2020). Ketiga tersangka itu ialah mantan pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking; eks Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo; dan Joko Tjandra. "Sementara info (sidang) via daring," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Ady Wira Bhakti, seperti dikutip dari Kompas.com, Senin (12/10). Alex Adam Faisal dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan, ketiga tersangka akan disidangkan bersama. Agenda sidang perdana adalah pembacaan dakwaan. Ketua majelis hakim dalam perkara ini adalah Muhammad Sirad, dengan hakim anggota Sutikna dan Lingga Setiawan. (P/GAL)



Mengecam Pelaku Kerusuhan



KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Spanduk mengecam perusakan fasilitas umum terpasang di dekat Kementerian Sekretariat Negara di Jalan Majapahit, Jakarta Pusat, seperti terlihat pada Senin (12/10/2020). Imbauan untuk menjaga ketertiban dan menghindari perusakan fasilitas publik dalam penyampaian pendapat dapat dijumpai di banyak lokasi di Jakarta. Hal itu seiring masih adanya gelombang protes sejumlah elemen masyarakat atas persetujuan DPR untuk pengesahan RUU Cipta Kerja.

Hindari Kekerasan Eksesif

Unjuk rasa penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui untuk disahkan oleh DPR masih akan terjadi. Aparat keamanan diharapkan menghindari penggunaan kekerasan eksesif.

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian diharapkan mengutamakan pendekatan persuasif dan menghindari kekerasan eksesif dalam mengamankan unjuk rasa penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Di sisi lain, pengunjuk rasa juga diimbau menyuarakan aspirasinya dengan tertib dan tanpa kekerasan.

Dalam unjuk rasa yang berlangsung pada 5-9 Oktober di sejumlah daerah di Indonesia, Polri menangkap 5.918 orang yang diduga terkait kericuhan. Dari jumlah itu, sebanyak 167 orang dinaikkan status perkaranya ke penyidikan.

Pada Senin (12/10/2020), dari sejumlah daerah dilaporkan, unjuk rasa penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disetujui untuk disahkan oleh DPR pada 5 Oktober kembali terjadi. Unjuk rasa, antara lain, terjadi di Bandar Lampung, Ambon, dan Jambi.

Sementara itu, sejumlah kelompok juga sudah menyatakan akan kembali berunjuk rasa. Jejaring Gerakan Rakyat, misalnya, akan berunjuk rasa pada 20-22 Oktober. Sejumlah organisasi massa Islam juga berencana unjuk rasa pada Selasa.

Terkait hal itu, Persyarikatan Muhammadiyah memutuskan tidak mengikuti unjuk rasa yang hendak digelar sejumlah organisasi massa Islam untuk menolak RUU Cipta Kerja.

"Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada hari Selasa," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Senin.

Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah tidak akan turut serta karena saat ini tengah fokus menangani pandemi Covid-19 beserta dampaknya. Selain itu, Muhammadiyah melihat saat ini aksi dengan melibatkan massa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sebab, dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya terkendali, kerumunan massa dalam jumlah besar rawan menjadi ajang penyebaran virus SARS-CoV-2.

Meski memutuskan tak ikut serta, Muhammadiyah menghormati masyarakat yang memilih berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja. Pasalnya, menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, masyarakat yang turut berunjuk rasa diimbau tetap mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan dalam bentuk apa pun. Di sisi lain, aparat keamanan diimbau memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi keributan atau bahkan bentrokan dengan masyarakat.

Kebebasan berpendapat

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, aparat kepolisian wajib berpegang teguh dan patuh pada konstitusi yang memberi jaminan hak asasi manusia berupa hak atas kebebasan berpendapat di muka umum atau demonstrasi.

"Penanganan aksi atau demonstrasi dengan kekerasan justru akan membuat kemarahan publik makin membesar dan bisa jadi akan meledak lebih dahsyat lagi," kata Julius.

Menurut dia, pendekatan humanis dan tanpa represi di beberapa lokasi demonstrasi sudah menjadi contoh dan disambut tanpa vandalisme atau perusakan. Hal tersebut menunjukkan, penanganan demonstrasi yang tidak sesuai aturan justru memimbulkan kericuhan itu sendiri.

Dalam unjuk rasa yang lalu, PBHI menemukan dan mengidentifikasi dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian yang mengamankan aksi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pelarangan dan *sweeping* sebelum aksi dimulai.

Selain itu, katanya, ada tindakan brutal dan represif selama aksi berlangsung, seperti kekerasan verbal, pemukulan, pengeroyokan, dan penembakan gas air mata ke arah kaki atau tubuh peserta aksi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Awi Setiyono sebelumnya mengatakan, polisi bekerja secara profesional dalam menyikapi demonstrasi yang dilakukan buruh dan mahasiswa pada pekan lalu.

Polisi, ujarnya, menangkap beberapa demonstran, tetapi hal itu dilakukan karena tindakan anarkistis. Namun, jika dalam kurun waktu 1 x 24 jam tidak ada bukti permulaan yang cukup, demonstran yang ditangkap akan dipulangkan. Sebaliknya, jika ada bukti permulaan yang cukup untuk dugaan pidana, polisi akan melakukan penyidikan.

Sementara itu, di Jakarta, personel TNI dan Polri berpatroli keliling Ibu Kota guna meredam risiko kerusuhan dalam unjuk rasa. Patroli diawali dengan apel yang dihadiri Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana serta Panglima Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta Mayor Jenderal Dudung Abdurachman di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/10). Sebanyak 2.000 personel gabungan turut serta dalam apel tersebut.

Dudung mengatakan, ia sudah menginstruksikan semua anggota TNI dan Polri agar berlaku proporsional, profesional, serta mengedepankan langkah persuasif dan humanis, tetapi tegas ketika menangani perusuh dalam demonstrasi. Yang lebih penting setelah itu, petugas diminta mencari tokoh-tokoh penggerak perusuh di lapangan.

Ia meyakini, kelompok yang benar-benar terdiri dari buruh dan mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi tanpa kericuhan. Dia juga mengingatkan anggota TNI dan Polri agar tidak membawa kepentingan apa pun selain menjalankan tugas dengan baik dan bersinergi. (DEA/PDS/NAD/JOG/KOR/FRN/REN/ITA/VIO/DIT/IKI/NSA/GER/ESA/IDO/RAM)

PENEGAKAN HUKUM

Peradilan Independen Lindungi HAM

JAKARTA, KOMPAS — Sistem peradilan berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia sehingga para korban pelanggaran HAM mendapatkan pemulihan hak sekaligus terlindungi. Untuk mewujudkan hal itu, independensi lembaga peradilan dan hakim yang berintegritas menjadi prakondisi utama.

"Sistem peradilan di sebuah negara memiliki peran sentral dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM)," kata Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin dalam pembukaan diskusi publik bertajuk "Peran Pengadilan dalam Melaksanakan Tanggung Jawab Hak Asasi Manusia", Senin (12/10/2020).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Hakim Agung Sofyan Sitompul; peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (Leip), Jane Aileen Tedjaseputra; Duta Besar Kerajaan Norwegia di Indonesia Vegard Kaale; Hakim Agung Norwegia Aage Thor Falkanger; serta Direktur Stanford Center for Human Rights and International Justice David Cohen.

Syarifuddin menyampaikan, lembaga peradilan memainkan peranan penting untuk memastikan korban atau pihak yang kemungkinan menjadi korban pelanggaran HAM memperoleh pemulihan dan perlindungan yang efektif. Pelanggar HAM harus diproses secara hukum dan setiap orang yang diduga melakukan pidana diproses melalui peradilan yang adil sesuai dengan standar internasional.

Dia mengatakan, mewujudkan lembaga peradilan yang dapat melindungi HAM harus dimulai dari peradilan yang independen. "Independensi inilah yang akan memberikan kebebasan kepada hakim untuk bersuara melalui putusan-putusannya," katanya.

Lembaga peradilan yang independen merupakan indikator utama kemajuan dan peradaban sebuah bangsa. Tanpa hal ini, kemungkinan akan terjadi kesewenang-wenangan dan keraguan terhadap kekuasaan kehakiman yang meluas.

Jika hal tersebut terjadi, publik akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Syarifuddin menyebutkan, tanpa kepercayaan publik, sulit bagi cabang kekuasaan kehakiman melaksanakan fungsinya secara efektif.

Aage Thor Falkanger mengatakan, perlindungan efektif HAM memerlukan adanya peradilan yang merdeka, bebas, dan hakim yang berintegritas. Mereka harus bebas baik dari tekanan lembaga pemerintahan yang lain maupun di dalam badan yudikatif tersebut. "Setiap hakim bertanggung jawab untuk tidak terpengaruh atas tekanan," katanya.

Pertimbangan HAM

David Cohen menuturkan, untuk mempertimbangkan kepentingan HAM dibutuhkan keseimbangan menerapkan *undang-undang*. Hanya saja, dia melihat putusan pengadilan di Indonesia, khususnya dalam kasus pidana, kadang-kadang tidak menimbang hak-hak yang sudah dilindungi dalam UUD 1945.

"Kalaupun disebutkan hak-hak tersebut, tak ada penjelasan logis yang menunjukkan bahwa pertimbangan itu sudah dilakukan," kata Cohen.

Sementara itu, Jane Aileen Tedjaseputra mengungkap masih lemahnya sistem peradilan di Indonesia dalam mempertimbangkan HAM. Hal tersebut terlihat dari diseminasi dan peningkatan kapasitas mengenai HAM di lingkungan peradilan Indonesia yang masih kurang. Ketentuan HAM juga belum diadopsi ke dalam hukum nasional, misalnya terkait penyiksaan dan pelecehan seksual.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Jane berharap ada panduan penerapan HAM dalam mengadili perkara, termasuk dalam identifikasi dan antisipasi terhadap tindakan pembungkaman partisipasi masyarakat. (PDS)

Pemeriksaan Tersangka



ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA

Ketua DPRD Kutai Timur nonaktif Encek Unguria berjalan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (12/10/2020). KPK memeriksa Encek Unguria sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, 2019-2020.

Kampanye Daring yang Tak Nyaring

Kampanye dalam jaringan di masa pandemi Covid-19 membuka peluang bagi pasangan calon dan tim kampanyenya untuk lebih banyak menyapa calon pemilih. Sayang, gaungnya belum nyaring di Pilkada 2020.

Sudah lebih dari dua pekan kampanye Pilkada 2020 berlangsung. Tidak semua pasangan calon berkampanye secara daring. Pasangan calon yang sudah memanfaatkannya antara lain calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakoso.

Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo itu, memanfaatkan *virtual box campaign* untuk blusukan menyapa calon pemilih. Gibran menyapa dan mendengarkan keluhan calon pemilih melalui percakapan video yang difasilitasi tim pemenangan di perkampungan. Warga bisa berkomunikasi dengan Gibran melalui layar monitor yang dibawa tim. Dengan metode ini, pemilih yang tak punya jawai tetap dijangkau.

Bentuk kampanye daring lain adalah konser virtual Panglipur Ati bersama orkes humor Pecas Ndahe. Konser tanpa melibatkan penonton itu disiarkan melalui Facebook, Instagram, dan Youtube. Konser virtual dinilai mampu menggaet pemilih milenial sekaligus memberi ruang bagi para seniman untuk tetap berkarya.

"Mas Gibran dan masyarakat tetap bisa berkomunikasi, sekaligus sama-sama menjaga protokol kesehatan dengan menghindari kontak langsung," kata ketua tim narasi, konten, dan digital pasangan calon Gibran-Teguh, Farid Muttaqin, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (11/10/2010).

Bentuk kampanye virtual lain dilakukan paslon wali kota dan wakil wali kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi-Armuji. Setidaknya ada tiga bentuk kampanye daring yang dilakukan, yakni *bilik sambat* daring, *ramban* daring, dan tanya jawab di media sosial. Adapun kampanye di medsos dilakukan dengan membuat video pendek tentang program kerja serta pelibatan jasa pemberi pengaruh (*influencer*).

"Banyak teknologi yang bisa mendekatkan kami dengan pemilih dalam jumlah banyak tanpa harus bertatap muka langsung. Apalagi, masyarakat Surabaya punya literasi digital sangat tinggi. Kami pegang data survei terkait itu," kata Eri.

Menurut dia, kampanye daring dan media sosial menjadi prioritas. Efektivitasnya dinilai cukup bagus berdasarkan interaksi dengan calon pemilih. Aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye daring antara lain Zoom, Google Meet, Facebook, Instagram, Youtube, dan Whatsapp.

"Setiap mengadakan kampanye daring, kami selalu lapor dan memberikan tautan kepada Bawaslu," ujarnya.

Paslon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Banten, Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai, kampanye daring cukup efektif. Peserta diskusi atau *ngobrol* daring justru lebih bebas bertanya serta memberikan kritik, ide, dan masukan kepada paslon.

Untuk kampanye satu arah, semua platform medsos, seperti Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram, dioptimalkan. Sementara untuk berdiskusi dan *ngobrol* daring, paslon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerindra itu memanfaatkan aplikasi Zoom. Diskusi daring itu dibuat dengan format "Ber-Zoom-pa dengan Mpok Saraswati". Sementara di kanal Youtube, Twitter, dan Facebook ada program bernama Let's Talk with Sara (LTWS).

"Sekarang, kami manfaatkan dengan format yang sama dengan memperbanyak konten edukatif dalam bentuk perbincangan tokoh-tokoh, misalnya Deddy Corbuzier, Gus Irfan Yusuf Hasyim (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Farros Tebuireng), Pandji Pragiwaksono, Diah Pitaloka, Desy Ratnasari, dan sebagainya," kata Saras.

Belum maksimal

Berdasarkan pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 10 hari pertama masa kampanye (26 September-5 Oktober), kampanye daring hanya dilakukan pasangan calon di 37 kabupaten/kota dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Bawaslu tidak mendapati kampanye dengan metode daring di 233 kabupaten/kota. Kampanye masih didominasi oleh kampanye tatap muka yang ditemukan di 256 kabupaten/kota. Adapun kampanye berlangsung 26 September hingga 5 Desember.

Di sisi lain, dorongan agar pasangan calon memaksimalkan metode kampanye daring sudah muncul dari banyak pihak, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun masyarakat sipil dan pemerintah.

Masyarakat juga cenderung setuju dengan penerapan kampanye daring guna menghindari penyebaran Covid-19. Ini terindikasi dari hasil jajak pendapat Litbang *Kompas*, 2-5 Oktober 2020, yang melibatkan 514 responden di 34 provinsi.

Sebanyak 63,4 persen responden menyatakan setuju jika kampanye pilkada dilakukan secara daring karena dinilai bisa menghindari penularan Covid-19. Dalam kampanye daring, sebanyak 71 persen responden ingin agar program saat menjabat menjadi bahan yang perlu dikampanyekan.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, kampanye daring merupakan terobosan bagus untuk memperbaiki format kampanye konvensional yang mengharuskan uang, seperti konser musik. Padahal, efektivitas acara meriah tersebut dari sisi elektoral juga kecil.

Dalam situasi pandemi, paslon dituntut kreatif berkampanye agar kegiatan kampanye tidak melanggar protokol kesehatan. Opsi yang dipilih adalah pertemuan terbatas, pembagian selebaran, dan optimalisasi kampanye daring. Untuk kampanye di ruang maya, menurut dia, platform yang cukup efektif digunakan di Indonesia saat ini adalah Facebook dan Whatsapp. Untuk Twitter dan Instagram, jumlah penggunanya masih sedikit dan terbatas di perkotaan.

"Kalau bicara efektivitas, kampanye daring itu hanya bermanfaat untuk pengenalan saja. Untuk sampai pada level memengaruhi pilihan, masih lebih efektif (metode) komunikasi langsung karena bisa menyentuh sisi emosional pemilih," ujar Yunarto.

Oleh karena itu, lanjutnya, tak heran jika paslon cenderung masih lebih memilih kampanye pertemuan terbatas maksimal 50 orang. Sebab, kampanye itu lebih efektif daripada kampanye daring.

Di sisi lain, paslon juga mulai menyiasati keterbatasan kampanye di masa pandemi dengan kegiatan lain, seperti pembagian masker tiga lapis, obat-obatan, *hand sanitizer*, atau disinfektan. Hal ini menjadi pilihan karena penyebaran alat kampanye, seperti spanduk dan baliho, dibatasi.

"Adaptasi mutlak dilakukan karena diatur dalam PKPU (peraturan KPU). Oleh sebab itu, tidak ada alasan kampanye daring atau pertemuan tatap muka terbatas sulit dilakukan karena alasan jadwal. Baik paslon maupun konsultan politik mudah beradaptasi dengan peraturan KPU," katanya.

Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada, Sukmajati, menuturkan, kreativitas paslon mulai diuji saat melakukan kampanye di masa pandemi Covid-19. Namun, dia menilai, pemanfaatan teknologi paling banyak digunakan untuk kampanye satu arah dengan mengunggah konten di media sosial. Belum banyak kampanye daring dua arah.

"Situasi ini menjadi momentum untuk mendorong kreativitas paslon dan tim pemenangan karena kampanye daring merupakan keniscayaan saat pandemi. Sangat disayangkan jika pemilu tak mampu memanfaatkan momentum ini untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam kepemiluan," kata Mada.

Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, dalam kampanye di media sosial, KPU mewajibkan setiap paslon mendaftarkan semua akun media sosial beserta pengelolanya yang digunakan selama kampanye. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibatasi 30 akun, sedangkan untuk pemilihan bupati/wali kota 20 akun.

Hingga Jumat (9/10) atau dua pekan pertama masa kampanye, berdasarkan data Bawaslu, belum semua paslon menyerahkan laporan daftar akun medsos yang digunakan untuk kampanye. Setidaknya ada 50 pasangan calon yang belum menyerahkan daftar akun media sosialnya ke KPU.

Pengawas kampanye daring dan medsos, kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, tidak hanya dilakukan terhadap akun resmi yang terdaftar, tetapi juga akun lain yang tak didaftarkan, tetapi mengunggah materi kampanye.

"Potensi pelanggaran terjadi pada akun-akun yang tidak terdaftar sehingga kami mengajak masyarakat ikut melaporkan akun-akun kampanye yang tidak sesuai aturan," ujarnya.

Pelanggaran yang dilakukan menggunakan akun paslon terdaftar diteruskan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu. Sementara pelanggaran terkait akun tak dikenal diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk di-*takedown*. Adapun jika pelanggaran dilakukan aparatur sipil negara, kasus diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Apabila pelanggaran terkait dengan tindak pidana siber dilakukan akun tidak dikenal, kasusnya akan diteruskan ke tim siber Polri.

Kompetensi pengawas

Pakar pemasaran politik Firmanzah mengingatkan perlunya Bawaslu meningkatkan kesiapan mengawasi konten kampanye daring. Karena aturan kampanye berubah di tengah pandemi, Bawaslu juga harus mengimbangi dengan sistem teknologi informasi, kompetensi pegawai TI, jaringan TI, dan administrasi agar pengawasan lebih optimal. Bawaslu juga harus lebih aktif memantau akun sosial media paslon yang sudah resmi didaftarkan untuk berkampanye.

Solusi lain, menurut analis media sosial Ismail Fahmi, Bawaslu bisa bekerja sama dengan kampus-kampus lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kampanye daring. Sebab, potensi kampanye hitam dan penyebaran berita bohong yang dilakukan akun-akun tidak terdaftar sangat tinggi.

Bahkan, potensi manipulasi pelanggaran kampanye bisa dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Misalnya, ada pihak yang sengaja melakukan kampanye hitam, lalu melaporkannya ke Bawaslu sehingga seolah-olah pelanggaran itu dilakukan tim lawan.

"Kampanye di media sosial sebaiknya dilakukan dengan sangat berhati-hari karena semua riwayat bisa ditelusuri jejak digitalnya," kata Fahmi.

Kampanye daring juga memiliki tantangan dari sisi keamanan. Pakar forensik digital Ruby Alamsyah mengatakan, pasangan calon harus mengantisipasi peretasan akun ataupun penyebaran hoaks melalui akun anonim. Berdasarkan pengalaman di pilkada sebelumnya, seperti Pilkada DKI 2017, peretasan akun dan penyebaran hoaks menjadi temuan yang paling banyak.

"Peretasan itu dapat dilakukan untuk memperkecil potensi lawan melakukan sosialisasi program. Ada juga motif untuk menyebarkan hoaks melalui akun yang diretas," kata Ruby.

Sementara itu, jika paslon memilih aplikasi seperti Zoom, mereka juga harus mengantisipasi masuknya penyusup yang dapat mengacaukan pertemuan daring. Penyusup biasanya mengacaukan rapat dengan menayangkan konten-konten tak bertanggung jawab. Hal ini sering disebut dengan istilah *Zoom-bombing*.

Serangan dari penyusup dapat diantisipasi dengan memperketat opsi pengaturan sebelum pertemuan daring dimulai. Pihak yang mengadakan pertemuan daring dapat mengatur agar tak mudah disusupi.

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru. Dalam Pilkada 2020, penyelenggara, paslon, pengawas, dan pemilih dituntut kreatif dan inovatif. Jika saat kontestasi pilkada paslon tidak mampu menunjukkan kreativitasnya, bagaimana kelak memberikan terobosan untuk rakyatnya?

(SYA/DEA/BOW/ETA)



KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Baliho pasangan calon wali kota-wakil wali kota Tangerang Selatan terlihat di Jalan Raya Graha Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (10/10/2020). Pemasangan baliho, spanduk, dan poster di tempat-tempat yang ramai dilalui warga menjadi salah satu bentuk kampanye para calon kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, kampanye di ruang daring masih relatif minim dibandingkan kampanye fisik, seperti pemasangan baliho atau pertemuan terbatas.



KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Baliho pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang berkontestasi dalam pemilihan wali kota Surabaya dipasang di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Senin (12/10/2020). Masa kampanye Pilkada 2020 berlangsung mulai dari 26 September hingga 5 Desember 2020.

SELIDIKI BAGAIMANA MEREK TEPERCAYA KAMI MENJANGKAU PELANGGAN ANDA

DAFTAR UNTUK GRATIS 30 MENIT KONSULTASI VIDEO SATU-SATU DENGAN AHLINYA KOMPAS.

Saran Ahli
Solusi Kreatif
Solusi Terjangkau
Produk Tepercaya

Di Kompas, memahami klien Anda adalah urusan kami. Kami memiliki produk dan kategori yang mencakup setiap sektor bisnis. Pelajari bagaimana iklan di surat kabar akan membangun basis pelanggan setia tepercaya.

Daftar di onlinekompas-tribun.com dan kami akan menelepon untuk membuat janji.

KOMPAS
AMANAT HATI NURANI RAKYAT

THAILAND

Pelita Harapan Anak Migran Myanmar Redup

Chit Su (15) terpaksa tinggal di rumah menguliti kepiting saja dengan neneknya sejak sekolahnya ditutup Pemerintah Thailand, Agustus 2019. Sekitar 10 sekolah bagi anak-anak migran Myanmar di Provinsi Ranong, Thailand selatan, ditutup dengan alasan guru-guru Myanmar yang mengajar di sekolah itu tidak memiliki izin bekerja.

Penutupan sekolah membuat banyak anak terpaksa bekerja di industri ilegal makanan laut dengan upah harian yang rendah. "Kerjanya berat. Kalau saya bisa belajar, saya bisa mendapat pekerjaan tidak seberat ini. Kalau saya tidak bantu nenek saya, kami tidak akan punya uang," kata Chit Su, nama samaran anak itu untuk melindungi identitasnya.

Chit dan neneknya setiap hari mendapat upah 7,60 dollar AS atau sekitar Rp 112.000. Mereka harus bekerja ekstra keras karena keluarga Chit terbelit banyak utang. Chit adalah salah satu dari 2.800 anak Myanmar yang terdampak operasi penggerebekan aparat Thailand di pusat pembelajaran migran, Ranonghtarni. Sekitar 30 guru Myanmar pun ditangkap dan sekolah mereka ditutup.

Kementerian Pendidikan Thailand mengaku, kini mereka melacak bekas siswa sekolah-sekolah itu untuk dimasukkan ke sekolah umum, program pendidikan nonformal, dan pusat pembelajaran masyarakat.

Seperti halnya Chit, banyak mantan murid bekerja di pasar ikan atau di rumah mengupas kulit kepiting untuk industri yang dikecam dunia dalam beberapa tahun ini. Sebab, industri ini mempekerjakan warga Thailand dan migran, termasuk anak-anak, dengan upah rendah.

Berbagai organisasi nonpemerintah yang memperjuangkan hak anak mengatakan, penutupan sekolah bagi migran anak itu memaksa anak masuk ke industri ilegal dan berupah rendah. "Konsekuensi penutupan sekolah menyebabkan ada buruh anak di industri perikanan. Ini bisa lebih parah karena pandemi Covid-19," kata Koordinator Kelompok Migran Pekerja Adisorn Kerdmongkol.

Buruh anak

Persekitaan Bangsa-Bangsa telah mengingatkan, jutaan anak di seluruh dunia terancam harus bekerja apabila sekolah ditutup akibat pandemi. Apalagi banyak keluarga yang kesulitan ekonomi.

> ***Kerjanya berat. Kalau saya bisa belajar, saya bisa dapat pekerjaan yang tidak seberat ini.***
> Chit Su

Sejak pandemi melanda Thailand, proses pengerjaan makanan laut berpindah dari pabrik ke rumah-rumah warga migran. Seperti di Distrik Muang, Ranong, yang mayoritas dihuni migran Myanmar, banyak anak usia 10 tahun yang menggunakan pisau untuk menguliti kepiting. Padahal, ada aturan, anak-anak di bawah usia 15 tahun dilarang bekerja.

Survei pemerintah dan PBB pada 2018 menunjukkan, 177.000 anak usia 5-17 tahun menjadi buruh di Thailand. Sekitar tiga perempat di antaranya bekerja di tempat-tempat berbahaya, seperti diakui Presiden Asosiasi Makanan Beku Thailand Panisuan Jamnarnwej.

Kementerian Pendidikan Thailand mengaku tidak mengetahui jumlah pusat pembelajaran migran yang beroperasi karena banyak yang tidak mendaftarkan diri secara resmi ke pemerintah. Lembaga-lembaga pendidikan ini tidak dibiayai pemerintah. Dalam proses pembelajarannya, anak-anak diajari dengan bahasa ibu mereka yang dilarang oleh otoritas Thailand.

Lembaga Save the Children menyebutkan, sejak lembaga-lembaga pendidikan di Ranong ditutup, ada anak-anak yang sudah didaftarkan di sekolah-sekolah umum Thailand. Ada juga yang belajar di sistem pendidikan nonformal seperti belajar di kamp-kamp migran. Namun, ada sekitar 500 anak yang sama sekali tidak belajar di mana pun.

Di seluruh Thailand, menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), anak migran sering putus sekolah pada usia 10-12 tahun. Umumnya karena tidak memiliki uang. Anak migran termasuk kelompok anak terbanyak yang putus sekolah di Thailand. Jumlahnya sekitar 200.000 anak," kata Ketua Misi IOM Thailand Maria Moita.

Dari 10 pusat pembelajaran yang ditutup, hanya satu yang boleh kembali dibuka setelah guru-guru Myanmar mengantongi izin bekerja dan menambahkan kurikulum Thailand. Wakil Sekretaris Permanen Kementerian Pendidikan Thailand Wira Khaengkasikarn mengatakan, pemerintah amat peduli pada nasib anak-anak migran. (REUTERS/LUK)



AFP/KCNA

Foto dari tayangan siaran kantor berita Korea Utara, KCNA, Sabtu (10/10/2020), ini memperlihatkan rudal baru balistik antarbenua Korut yang dipamerkan dalam parade militer untuk memperingati 75 tahun berdirinya Partai Pekerja Korut di Lapangan Kim Il Sung, Pyongyang, Korut.

Rudal Korut Jadi "Monster"

Meski belum teruji, rudal baru balistik antarbenua yang dipamerkan Korea Utara dalam parade militer, Sabtu lalu, menghadirkan kecemasan baru, terutama bagi Amerika Serikat.

PYONGYANG, SENIN — Rudal balistik antarbenua yang ditampilkan dalam parade militer Korea Utara di Pyongyang, Sabtu (10/10/2020), menjadi ancaman nyata bagi pertahanan Amerika Serikat. Selain buah dari kegagalan diplomasi denuklirisasi AS-Korea Utara, unjuk kekuatan rudal terbaru itu dinilai juga menjadi peringatan bagi siapa pun presiden AS yang terpilih dalam pemilu, 3 November mendatang.

Analis menyebut, rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dibawa kendaraan pengangkut-peluncur dengan 22 roda akan menjadi salah satu ICBM bergerak terbesar di dunia. "Rudal ini adalah monster," kata Melissa Hanham, Wakil Direktur Open Nuclear Network.

Dalam pidato tahun baru pada 1 Januari 2020, Pemimpin Korut Kim Jong Un mengumumkan bahwa Korut "mengembangkan sistem persenjataan canggih yang hanya dimiliki oleh negara-negara maju." Menurut BBC, kata "strategis" yang juga disebut dalam pidato Kim saat itu merujuk pada senjata nuklir yang sedang dikembangkan.

ICBM baru yang dipamerkan dalam parade militer itu adalah senjata strategis yang disebutkan Kim pada awal tahun ini. Rudal balistik itu dipamerkan sebagai pesan bagi AS yang gagal dalam negosiasi dengan Korut. Hal ini diketahui dari pernyataan Kim.

Kim mengaitkan langsung pengembangan senjata nuklir negaranya itu dengan AS. "Di masa depan, semakin AS mengulur waktu dan ragu-ragu dalam hubungan AS-Korut, semakin AS tidak berdaya di hadapan Republik Demokratik Rakyat Korea Utara yang tumbuh kian kuat," kata Kim merujuk nama resmi negaranya.

Salah seorang pejabat tinggi pemerintahan Donald Trump di Washington menyebut parade senjata khusus ICBM Korut "mengecewakan". Ia menghadirkan pemerintahannya bernegosiasi soal perlucutan senjata nuklir Korut secara menyeluruh.

Peluncur terbesar

Analis menyebutkan, ICBM dalam parade militer Korut itu berbahan bakar cair yang diluncurkan dari kendaraan darat terbesar di dunia. Mereka memperkirakan kendaraan peluncur itu kemungkinan akan didesain untuk bisa membawa beberapa hulu ledak sekaligus.

Jeffrey Lewis dari Middlebury Institute of International Studies mengatakan, sangat jelas bahwa ICBM itu "ditujukan untuk menghujani sistem pertahanan rudal AS di Alaska".

Di Twitter, Jeffrey menyebutkan, jika ICBM Korut tersebut membawa tiga atau empat hulu ledak, AS membutuhkan sekitar 1 miliar dollar AS untuk menembakkan 12-16 pencegat (*interceptor*) untuk melawan ICBM itu. "Dengan biaya sebesar itu, saya yakin Korut bisa menambahkan hulu ledak lebih cepat dibandingkan kita menambah pencegat," katanya.

Korut memiliki dua ICBM yang sudah diuji coba. Pertama, Hwasong-14 yang diuji coba dua kali tahun 2017. ICBM dengan satu hulu ledak nuklir itu berdaya jelajah 10.000 kilometer dan bisa mencapai hampir seluruh negara di Eropa Barat dan separuh wilayah daratan AS.

Kedua, Hwasong-15 yang juga diuji coba tahun 2017. Dengan daya jangkau 13.000 kilometer, rudal balistik ini bisa membawa hulu ledak nuklir ke seluruh wilayah daratan AS.

Sementara ICBM baru yang belum diuji coba juga termasuk rudal dua bagian berbahan bakar cair dengan panjang dan diameter yang lebih besar dari Hwasong-15. Publik tidak akan mengetahui pasti daya jangkau ICBM ini sebelum diuji coba.

Direktur Non-Proliferasi dan Kebijakan Nuklir di International Institute for Strategic Studies Michael Elleman memperkirakan kemampuan ICBM Korut yang baru ini melebihi rudal balistik R-16 atau R-26 milik Soviet yang tidak pernah digunakan.

Melihat desainnya, terlihat jelas niat Korut bahwa mereka tidak perlu lagi meningkatkan daya jangkau rudal balistiknya. Yang dilakukan Pyongyang adalah fokus pada pengembangan rudal balistik yang bisa membawa hulu ledak nuklir lebih dari satu.

ICBM Korut yang terbaru diperkirakan memiliki panjang 24 meter dan diameter 2,5 meter. Dengan ukuran ini, rudal tersebut cukup untuk membawa 100 ton bahan bakar yang butuh waktu berjam-jam untuk diisi. Dimensinya yang besar dan juga bobotnya yang sangat berat membuat rudal ini, menurut sebagian pengamat, tidak praktis untuk digunakan.

Belum teruji

Sementara itu, para pengamat Korut memperingatkan, ICBM yang dipamerkan dalam parade bisa jadi tiruan atau sebatas model dan belum ada bukti bahwa rudal itu berfungsi sebelum mereka mengujinya.

Meski begitu, rudal itu diba-

wa kendaraan pengangkut-peluncur 11 as atau 22 roda yang belum pernah ada sebelumnya. Kendaraan pengangkut-peluncur itu bahkan lebih besar dari kendaraan pengangkut-peluncur delapan as buatan China yang selama ini dimiliki Korut.

"Truk pengangkutnya mungkin lebih mengerikan dari rudalnya," ujar Melissa. "Jika Korut memproduksi sendiri kendaraan itu, hambatan mereka untuk meluncurkan ICBM lebih sedikit."

ICBM ini merupakan bukti bahwa Korut terus mengembangkan persenjataannya di kebuntuan negosiasi dengan AS. ICBM itu juga bisa menjadi alat negosiasi yang ampuh.

"Suka tidak suka, Korut adalah kekuatan nuklir dan mungkin menjadi negara ketiga yang mampu menyerang kota-kota di AS setelah Rusia dan China," kata Andrei Lankov dari Korea Risk Group.

Kim mengirimkan pesan kepada AS bahwa kemampuan Korut meningkat. Ia, kata Lankov, seolah ingin mengatakan, "Jika kamu tak ingin membuat kesepakatan sekarang, suatu saat nanti kamu harus membuat kesepakatan yang bakal berdampak buruk bagimu dan komunitas internasional." (AFP/REUTERS/ADH)

CHINA-KAMBOJA

Perdagangan Bebas Alihkan Sanksi

PHNOM PENH, SENIN — Pemerintah Kamboja menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Pemerintah China di Phnom Penh, Kamboja, Senin (12/10/2020). Kesepakatan yang tercapai dalam pembicaraan yang telah berlangsung kurang dari satu tahun itu diharapkan Kamboja bisa menjadi pengalih sanksi yang diterimanya dalam hubungan dagang dengan Uni Eropa.

Perjanjian itu ditandatangani Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan mitranya dari China, Zhong Shan. Hadir juga Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen. Acara itu disiarkan secara daring. Wang Yi bertemu Wakil PM Kamboja Hor Namhong di Phnom Penh, Minggu (11/10).

Media resmi Kamboja, sebagaimana dikutip *Nikkei Asian Review*, melaporkan, para menteri Kamboja memuji kesepakatan yang disebut sebagai tonggak baru yang akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Kamboja. Perjanjian mencakup sektor-sektor perdagangan, pariwisata, dan pertanian. Kedua negara sepakat memotong bea produk mereka.

"Penandatanganan perjanjian menandakan hubungan yang lebih kuat di antara kedua negara dan menandai tonggak sejarah penting lainnya untuk hubungan Kamboja-China," kata Sorasak.

Ia mengatakan, kesepakatan mulai berlaku awal 2021. "Kesepakatan akan memberikan kemitraan ekonomi lebih kuat melalui akses pasar yang lebih tinggi, liberalisasi barang, jasa, dan investasi," kata Sorasak.

Kantor berita China, Xinhua, menyebutkan, Wang mengatakan kepada Namhong bahwa karena persahabatan erat China-Kamboja, dirinya memilih Kamboja sebagai negara pertama yang dikunjungi semasa pandemi Covid-19. Ditegaskan, Beijing siap untuk lebih menaruh kepercayaan politik dan meningkatkan dukungan timbal balik. Menurut Wang, ada momentum besar dalam hubungan bilateral kedua negara.

Belum terinci

Serangkaian konsensus telah dicapai pada pertemuan kelima komite koordinasi antarkedua pemerintah, Juni lalu. Aneka proyek baru dalam daftar kerja sama sedang dimatangkan. Kerja sama mencakup hampir semua bidang.

China menegaskan siap membantu Kamboja dalam memerangi pandemi, termasuk menyediakan vaksin Covid-19 yang dikembangkan China berdasarkan prioritas. Beijing juga berjanji mengimpor lebih banyak produk pertanian berkualitas tinggi Kamboja.

Sejauh ini tak ada perincian yang diberikan terkait perjanjian Kamboja-China itu. Tidak jelas pula bagaimana perjanjian itu akan bekerja dengan peraturan perdagangan yang ada antara China dan ASEAN dengan Kamboja, salah satu dari 10 anggota ASEAN.

Neraca perdagangan

Perdagangan bilateral antara Kamboja dan China mencapai lebih dari 9 miliar dollar AS pada 2019 meskipun neraca perdagangannya sangat miring. China adalah sumber impor terbesar Kamboja tahun lalu, terhitung 37,2 persen dari total impor senilai 8,3 miliar dollar AS, merujuk pada data Economist Intelligence Unit. Total ekspor Kamboja ke China senilai 900 juta dollar AS, sekitar 5 persen dari total ekspornya.

Dengan ekonomi yang sangat bergantung pada manufaktur pakaian jadi, pasar ekspor terpenting Kamboja adalah AS dan Uni Eropa (UE). Komposisinya mencapai 26 persen dan 25 persen tahun lalu. Perjanjian perdagangan bebas dengan China terjadi setelah sanksi perdagangan diberlakukan UE.

Brussels telah menanggukan sebagian akses bebas bea Kamboja ke blok itu karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. China, sumber bantuan dan investasi terbesar Kamboja, telah berjanji untuk membantu meredam pukulan tersebut. Sebagai upaya diversifikasi ekonomi lainnya, Kamboja juga sedang dalam pembicaraan perdagangan bebas dengan Korea Selatan dan Mongolia. (REUTERS/BEN)

KILAS LUAR NEGERI

Singapura Kembali Buka Perbatasan untuk RI

Singapura akhirnya kembali membuka perbatasannya untuk Indonesia. Lawatan untuk urusan kerja dan diplomatik bisa dilakukan lagi mulai November 2020. Sementara perjalanan wisata atau keperluan pribadi belum bisa dilakukan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Senin (12/10/2020), mengatakan, perundingan membuka koridor perjalanan penting dengan Singapura telah diselesaikan. Mulai 26 Oktober 2020, calon pelawat dari Indonesia dan Singapura bisa kembali mengurus persyaratan perjalanan. "Warga negara Indonesia tidak perlu visa ke Singapura," ujarnya dalam *press briefing* daring di Jakarta. Singapura dan Indonesia saling menutup perbatasan untuk pelawat dari setiap negara sejak beberapa bulan lalu sebagai bagian upaya pengendalian laju infeksi Covid-19. Kini dimulai lagi perundingan untuk membuka perbatasan secara terbatas. (RAZ)



KILASAN KAWAT SEDUNIA



Trapeang Sla

Lain ladang lain belalang. Jika di banyak negara, masker dan menjaga jarak fisik menjadi senjata ampuh mencegah Covid-19, tidak begitu dengan masyarakat Desa Trapeang Sla, Provinsi Kampong Cham, sekitar 110 km dari Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Cara efektif mereka menangkal Covid-19 ialah memakai orang-orangan sawah atau Ting Mong yang "dipersenjatai" tongkat. Bentuk Ting Mong yang dipasang di depan rumah pun aneh-aneh.


HERYUNANTO

Ting Mong biasanya bermunculan di desa-desa ketika dilanda penyakit menular, seperti demam berdarah dan diare. "Saya sudah siapkan Ting Mong untuk melindungi keluarga saya," kata Sok Chany (45), seorang petani. Ia memasang dua tiang di depan rumah panggungnya untuk tempat Ting Mong yang memakai baju hijau tua. Ada pula yang dipakaikan baju tentara atau baju tidur, kacamata baca, dan kacamata hitam, atau pot plastik untuk kepalanya. Seorang petani, Ton Pheang (55), memakaikan Ting Mong miliknya dengan kaus warna merah muda terang dan di kepalanya dipasangi helm sepeda motor. "Ini takhayul lama yang meyakini Ting Mong bisa mengusir setan atau penyakit berbahaya," kata Chany. Kamboja mencatat 283 kasus positif Covid-19 dan tidak ada korban jiwa. Bisa jadi ini berkat Ting Mong. Percaya atau tidak. (AFP/LUK)

RUU Cipta Kerja Dinilai Tak Sensitif Disabilitas

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas dan memuat aturan yang tak memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

JAKARTA, KOMPAS — Sepekan setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus menuai kritik, termasuk dari kalangan disabilitas. DPR dan pemerintah dinilai tidak memiliki sensitivitas terhadap penyandang disabilitas.

Komunitas Penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Jaringan Penyandang Disabilitas Tolak Undang-Undang Cipta Kerja 2020 memuding RUU Cipta Kerja sebagai langkah mundur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam pernyataan pers, Senin (12/10/2020), mereka melontarkan kritik kepada DPR dan pemerintah yang masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas. "Paradigma cacat tersebut sangat bertentangan dengan gerakan selama ini untuk mengusung terciptanya cara pandang terhadap penyandang disabilitas," ujar Fajri Nursyamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

RUU Cipta Kerja juga dianggap bertentangan dengan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang sudah diratifikasi melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Penggunaan kata cacat dalam RUU menunjukkan pemahaman dan keberpihakan DPR serta pemerintah terhadap kelompok disabilitas sangat minim. "Bahkan, UU Penyandang Disabilitas yang mereka sahkan sendiri ditinggalkan dan tidak masuk dalam pertimbangan RUU Cipta Kerja," kata Fajri.

Jaringan Penyandang Disabilitas menegaskan, kelompok atau organisasi penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja.

RUU Cipta Kerja juga menghapus aturan perlindungan negara terhadap hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas dalam bangunan gedung. RUU ini menghapus Pasal 27 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Tak hanya itu, RUU Cipta Kerja juga menambah daftar alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan mencantumkan alasan PHK bagi pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Alasan PHK itu dinilai diskriminatif, merugikan penyandang disabilitas, dan jauh dari semangat inklusif.

Kuota pekerjaan hilang

RUU Cipta Kerja menghilangkan pula kuota 1 persen bagi perusahaan swasta dan 2 persen bagi perusahaan/institusi pemerintah untuk merekrut penyandang disabilitas dari keseluruhan pegawai. "Tentu saja ini sangat mengurangi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja dan akan menjadikan penyandang disabilitas sulit dalam mengakses dunia kerja," tambah Nurul Saadah dari Yayasan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Sapda).

Persyaratan sehat "jasmani rohani" dalam RUU Cipta Kerja dinilai sumir dan akan mendiskriminasi penyandang disabilitas mental untuk mendapatkan akses pekerjaan. Bahkan, RUU ini tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas.

Karena itulah Presiden didesak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dalam waktu 14 hari. DPR diminta menjelaskan kepada publik mengapa mengabaikan kelompok penyandang disabilitas dalam pembahasan dan tidak mencantumkan UU Penyandang Disabilitas.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, RUU Cipta Kerja memperhatikan penyandang disabilitas, misalnya dalam pembangunan gedung, kelompok tersebut diatur dan diberi pengaturan khusus. Demikian pula ada pemberian jaminan bagi tenaga kerja kelompok disabilitas. "Tidak ada kluster khusus terkait dengan penyandang disabilitas, dalam rapat panja (panitia kerja) selalu diingatkan terkait masalah ini," katanya.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat berpendapat, sejak awal UU Penyandang Disabilitas tidak dimasukkan, tetapi tidak berarti tenaga kerja disabilitas tak diperhatikan. Hal itu justru menguntungkan disabilitas karena persoalan disabilitas tetap diatur dalam UU Penyandang Disabilitas yang lebih luas dan komprehensif.

"Soal masih menggunakan kata cacat, ini memang perlu dikoreksi. UU Nomor 8 Tahun 2016 jelas menyebut istilah disabilitas, bukan cacat," kata Harry. (SON/REK)

10 Alasan Jaringan Disabilitas Menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja

1. Kelompok atau organisasi penyandang disabilitas tidak pernah diperhitungkan dan dilibatkan sejak awal proses pembahasan.
2. Tidak harmonis dan sinkron dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Masih mengusung istilah cacat bagi penyandang disabilitas.
4. Menghapus Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung berupa aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
5. Penghapusan Pasal 27 Ayat (2) UU Bangunan Gedung, menunjukkan tidak mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akomodasi yang layak dalam dunia kerja.
6. Menambahkan 1 syarat yang dapat menjadi alasan bagi pemberi kerja untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yaitu "Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan".
7. Tidak mencantumkan ketentuan kuota 1 persen bagi perusahaan swasta dan 2 persen bagi BUMN/BUMD serta pemerintah/pemerintah daerah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dari keseluruhan pegawai, yang saat ini tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas.
8. Masih menggunakan sehat "jasmani rohani" sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan atau menempati jabatan tertentu, yang merupakan tindakan diskriminatif bagi penyandang disabilitas.
9. Tidak mengatur mekanisme pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap pekerja perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas.
10. Tidak mencantumkan poin-poin yang bisa memudahkan penyandang disabilitas untuk berusaha, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.



INFOGRAFIK: GUNAWAN

BAHASA

SAMSUDIN BERLIAN
Penggelut Makna Kata

Alkitab Kristen

Bagi Muslim, Alkitab adalah nama lain Alquran. Arti harfiahnya cukup jelas: Sang Buku. Itulah sebutan yang cocok untuk Buku Sejati. Bukunya buku. Rujanya buku. Itulah kitab suci umat yang diturunkan Tuhan sendiri.

Pemaknaan Yahudi dan Kristen atas kitab suci tak sama dengan itu. Yahudi dan Kristen tak kenal ajaran turunnya kitab suci. Tulisan-tulisan itu suci karena disucikan, bukan karena diturunkan Tuhan dari surga. Penulisnya dan penyuntingnya manusia dengan segala keterbatasan pengetahuannya, dan bahkan kekeliruannya.

Agama Yahudi menyebut kitab sucinya TNK (dibaca Tanak). TNK singkatan dari Torah, Nebi'im, Ketubim. Torah (Taurat) berarti pengajaran, tuntunan, atau hukum; terdiri dari lima kitab, mulai kisah penciptaan Adam sampai tibanya bangsa Israel di perbatasan negeri perjanjian Kanaan di bawah kepemimpinan Musa. Nebi'im atau Nevi'im (Nabi-Nabi) harfiah berarti jurubicara, terdiri dari delapan kitab. Bagian pertama berisi kisah masuknya Israel ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Yosua (Yusak) sampai dihancurkannya Yerusalem oleh Babel pada 587 SM. Bagian kedua berisi kisah dan ucapan para nabi pada masa-masa itu. Ketubim (Kitab-Kitab) harfiah berarti tulisan-tulisan, terdiri dari 11 kitab tentang kisah pembangunan kembali Yerusalem dan Bait Sucinya serta kitab-kitab lain seperti Mazmur/Zabur dan Ayub.

Kristen di Indonesia menyebut kitab sucinya *Alkitab* yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab-kitab Perjanjian Lama Kristen Protestan adalah sama persis dengan TNK, hanya urutannya berbeda. Perjanjian Lama Kristen Katolik berisi Tanak dan tujuh kitab lain yang dikenal dengan nama Deuterokanonika. Perjanjian Baru terdiri dari 27 tulisan yang terbagi menjadi lima bagian: empat kitab Injil, satu kisah murid-murid Yesus yang dipanggil rasul-rasul, 13 surat Rasul Paulus, 8 surat umum, dan satu kitab Wahyu.

Ikut memperkeruh adalah definisi-definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang menyesatkan. Misalnya, untuk *Injil*, definisi versi Kristen adalah "salah satu bagian dari kitab suci agama Kristen...; Perjanjian Baru". Masalah pertama, ini adalah definisi "kitab-kitab Injil" bukan "Injil". Kedua, hanya bagian pertama definisi itu yang bisa dianggap tepat. Bagian kedua "Perjanjian Baru" adalah definisi keliru sebab kitab-kitab Injil hanya salah satu bagian dari Perjanjian Baru. Tambahan lagi, Kristen biasa memakai kata *Injil* bukan dalam konteks kitab, melainkan dalam arti harfiah dari kata Yunani *Euanggelion*, Kabar Baik, yakni kabar turunnya Tuhan secara manusiawi ke dalam dunia untuk menolong manusia berdosa yang telah gagal menyelamatkan diri sendiri.

Untuk lema *Taurat*, ada definisi yang seolah-olah Kristen, "kitab Perjanjian Lama, terutama Pentateukh (lima buah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.)...". Perjanjian Lama dan Pentateukh adalah istilah Kristen, tapi definisinya bukan. Bagi Kristen (dan Yahudi), Pentateukh adalah istilah lain untuk kelima kitab Taurat yang tidak "diturunkan", melainkan dituliskan. Dan kepada nama Musa tidak disematkan "a.s.".

Wanted: Definisi yang menangkap nuansa makna pada kata dan istilah *Alkitab, Injil, kitab Injil, Nabi, Rasul, Firman,* dll.

ARKEOLOGI

Situs Gedog Diduga Petirtaan atau Candi

BLITAR, KOMPAS — Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Senin (12/10/2020), mengakhiri ekskavasi tahap kedua Situs Gedog di Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur, yang dimulai pada 5 Oktober 2020. Berdasarkan hasil ekskavasi, Situs Gedog diperkirakan merupakan bangunan petirtaan atau candi.

Ketua Tim Ekskavasi Situs Gedog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jatim, Nugroho Harjo Lukito, mengatakan, dalam proses ekskavasi tahap kedua ditemukan dasar bangunan induk berupa struktur batu bata. Struktur itu bisa mengarah ke petirtaan ataupun candi.

"Kami menemukan struktur yang diperkirakan candi atau petirtaan karena bagian luar belum kelihatan. Bagian luar masih melebar sehingga belum diketahui. Ini punya potensi untuk dikembangkan, dilakukan ekskavasi total tahun depan," ujar Nugroho.

Tim BPCB Jatim menggali dua kotak ekskavasi, masing-masing berukuran 2 meter x 21 meter dan 4 meter x 6 meter dengan kedalaman 2,5 meter. Kotak pertama merupakan struktur bangunan induk, sedangkan kotak kedua adalah struktur pagar.

> ***Artefak yang terbuat dari batu basal ini cara pemahatannya sangat detail dan halus.***
> Nugroho Harjo Lukito

Menurut Nugroho, asumsi petirtaan didasarkan pada temuan struktur bagian dalam yang berbentuk persegi panjang. Model seperti ini biasa ditemukan di bangunan-bangunan petirtaan. Sementara struktur bangunan candi umumnya berbentuk bujur sangkar.

Masa Singosari

Dugaan keberadaan candi didasarkan pada temuan tiga patung Kala, sebuah yoni besar, dan bagian arca. Meski ditemukan agak jauh dari struktur bangunan induk, beberapa artefak itu bisa menjadi data pendukung.

Artefak yang terbuat dari batu basal ini pengerjaannya relatif lebih halus. Cara pemahatannya sangat detail dan halus. Ini identik dan biasa kita lihat pada arca-arca masa Singosari. Diperkirakan Candi Gedog dibuat pada masa Singosari abad ke-13.

Menurut Nugroho, Situs Gedog juga identik dengan isi tulisan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Thomas Stamford Raffles dalam buku *History of Java*. Raffles bercerita tentang bangunan megah, memiliki relief indah, dan garapan halus di daerah Gedog.

Raffles juga menyebut ada yoni dan arca di bawah pohon beringin. Situs Gedog diperkirakan roboh dan material bangunan bagian atas banyak yang hilang.

Situs Gedog ditemukan secara tidak sengaja oleh Toiran (59), warga Gedog, pada Agustus 2019. Toiran menemukan batu berelief wajah Kala saat bercocok tanam. Temuan itu kemudian dilaporkan pada September 2019 kepada pihak berwenang dan BPCB Jatim yang ditindaklanjuti dengan ekskavasi tahap pertama, 7-11 Oktober 2019.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar Tri Iman Prasetyono mengatakan, temuan situs ini berpotensi menambah perbendaharaan peninggalan arkeologis di kawasan Blitar Raya. (WEI)

LANGKAN

Siswa Indonesia Raih Penghargaan "Absolute Winner"

Siswa SMA Ipeka Plus BSD, Stanve Avrilium Widjaja, meraih penghargaan "Absolute Winner" pada Olimpiade Matematika Internasional Tyumaada Ke-27 yang digelar 30 September-6 Oktober 2020 secara daring. Stanve meraih nilai tertinggi. Ia juga meraih penghargaan "Perfect Score" atau nilai sempurna dan "Special Award for Elegant Solution". Wakil Ketua 1 Yayasan Sinergi Mencerdaskan Tunas Negeri Surya Wijaya mengatakan, olimpiade matematika internasional ini diikuti 151 siswa dari Bulgaria, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Moldova, Romania, Singapura, dan Rusia. Mereka bersaing ketat memperebutkan dua medali emas, enam medali perak, enam medali perunggu, dan 11 medali "Honorable Mention". Siswa Indonesia lainnya, Elbert Benedict (SMA Kristen Penabur Gading Serpong), meraih medali perunggu dan "Special Award for the Theoretical Technique Virtuosity". Sandy Kristian Waluyo, siswa SMA Kristen Penabur Cirebon, juga meraih penghargaan "Honorable Mention". (MED)

Sikapi Kasus Kekerasan terhadap Jurnalis, PWI Datangi Mabes Polri

Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mendatangi Mabes Polri, Senin (12/10/2020), menyikapi kasus tindakan kekerasan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah wartawan saat meliput aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Kamis (8/10). Beberapa pengurus PWI yang hadir adalah Ketua Umum PWI Atal S Depari, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, dan Sekretaris PWI Jaya Naek Pangaribuan. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Polri akan kembali menyosialisasikan ke aparat di lapangan bahwa kerja wartawan dilindungi undang-undang. "Artinya, Polri juga wajib melindungi wartawan yang bekerja saat meliput aksi demonstrasi di lapangan," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono. Berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebanyak 28 jurnalis dan 6 anggota pers mahasiswa mengalami kekerasan oleh aparat keamanan saat meliput unjuk rasa penolakan RUU Cipta Kerja pekan lalu. (*/ABK)

KOMPAS
AMANAT HATI NURANI RAKYAT

Nantikan Harian Kompas
EDISI KHUSUS MENDORONG
#TRANSFORMASIUMKM



KOMPAS / PRADHITA PHANDEGA YASA, TOTOK WIJAYANTO

Baca besok, 14 Oktober 2020

#KawandalamPerubahan

TAJUK RENCANA

Jangan Euforia, Tetap Disiplin

Sudah lewat delapan bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Belum ada tanda kapan berakhir. Disiplin diri menjadi kata kunci menghadapi pandemi.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadi PSBB transisi, mulai Senin, 12 Oktober 2020, hingga 26 Oktober 2020. Kajian dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, secara epidemiologi menunjukkan telah terjadi perlambatan kasus kenaikan penularan Covid-19 di Jakarta. Rata-rata tingkat angka kematian dalam dua minggu terakhir juga berada dalam tren turun. Capaian itu perlu disambut baik.

Meski demikian, kita berharap pelonggaran PSBB transisi di Jakarta jangan dijadikan euforia. Jangan pernah menganggap ancaman Covid-19 sudah reda. Apalagi, demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih terjadi di Ibu Kota dan di sejumlah daerah. Kampanye pemilu kepala daerah (pilkada) serentak masih digelar di 270 wilayah. Kumpulan massa itu berpotensi meningkatkan kembali penularan Covid-19. Bemo penolakan RUU Cipta Kerja terjadi karena kekurangarifan DPR mengesahkan RUU kontroversial justru pada masa pandemi.

Ancaman Covid-19 masih nyata! Dalam kajian epidemiologi, data angka reproduksi penularan (Rt) berada di angka 1,07, turun dari angka 1,14 pada periode sebelumnya. Jakarta masih dalam kawasan dengan risiko sedang. Sebelumnya, Jakarta masuk dalam kawasan dengan risiko tinggi.

Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah warga positif Covid-19 terbesar. Berdasarkan data per Senin, 12 Oktober 2020, jumlah orang terkonfirmasi positif di Jakarta 86.963 orang (26,1 persen). Tingginya angka positif Covid-19 di Jakarta tentunya seiring dengan masifnya tes di Jakarta. Baik tes berdasarkan penelusuran kontak maupun tes mandiri. Dalam kurun waktu 3-9 Oktober 2020, sebanyak 63.474 orang telah melakukan tes PCR di Jakarta. Angka itu sama dengan 6 per 1.000 penduduk dalam satu minggu. Jauh lebih tinggi daripada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Oleh karena ancaman Covid-19 masih nyata, disiplin warga mengikuti protokol kesehatan—memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan—menjadi penting. Saatnya warga menjaga diri sendiri dan kekuarganya agar tidak terpapar Covid-19. Perlu dimunculkan kesadaran sesama warga untuk saling mengingatkan, saling menjaga dan melindungi diri.

Hak atas kesehatan dan hak hidup lebih berharga daripada hak memilih dalam pilkada, misalnya. Berkaitan dengan PSBB transisi di Jakarta, perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab memastikan protokol kesehatan ditaati di lingkungan perusahaan, termasuk di ruang-ruang publik.

Di sisi lain, pemerintah pun harus mengupayakan agar tes, penelusuran kontak, dan penanganan warga terpapar Covid-19 (3T) dilakukan sebagai kunci memutus rantai penularan Covid-19. Pemerintah pun perlu lebih bijak dan arif untuk tidak memancing terjadinya pengumpulan massa penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Turki dan Stabilitas Kawasan

Menyusul peresmian hubungan diplomatik Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan Israel, kini mereka meminta militer Turki keluar dari Qatar.

Pada Oktober 2015, untuk pertama kali militer Turki dikerahkan ke Qatar guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Di sisi lain, karena dinilai terlalu dekat dengan Iran dan kelompok radikal, terjadi pemutusan hubungan diplomatik beberapa negara di kawasan dengan Qatar. Dimotori Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, pemutusan hubungan diplomatik itu lalu diikuti Mesir, Libya, Yaman, dan Maladewa.

Arab Saudi dan kawan-kawan menutup perbatasan dengan Qatar, termasuk wilayah udara dan laut. Qatar pun seperti berada di bawah blokade pada Juni 2017. Padahal, Qatar mengimpor 40 persen bahan pangan dari negara tetangga itu. Pada perundingan antara Qatar dan Arab Saudi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), kehadiran militer Turki di Qatar juga dipersoalkan, bukan semata kedekatan dengan Iran dan kelompok radikal.

Arab Saudi, yang bersaing dengan Iran berebut pengaruh di kawasan, meminta Qatar mengakhiri kerja sama militer dengan Turki dan mengeluarkan semua pasukan Turki dari Qatar. Sebaliknya, Turki mengirim lebih banyak pasukan ke Qatar dan meningkatkan keberpihakannya. Posisi Qatar penting bagi AS, yang memiliki pangkalan militer di Doha (Kompas.id, 12/10/2020).

Kenapa Qatar yang berpenduduk sekitar 3 juta jiwa itu membangun hubungan sangat erat dengan Turki? Qatar berulang kali menyelamatkan perekonomian Turki dari kehancuran, bahkan saat dilanda pandemi virus korona baru akhir-akhir ini. Sebelumnya, negara kaya gas itu melipatgandakan perjanjian pertukaran mata uang menjadi 15 miliar dollar AS. Artinya, 15 miliar dollar AS dari sekitar 38 miliar dollar AS cadangan swap di bank sentral Turki sekarang terdiri atas riyal yang dibeli dari Qatar.

Seorang wartawan Turki, Tufan Türenç, mencatat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan keluarganya pergi ke Qatar sebanyak 56 kali dalam 12 tahun terakhir. Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dan rombongannya menguntungi Turki 45 kali. "Ada apa dengan kasih sayang ini?" tanyanya.

Apakah kehadiran militer Turki di Qatar cukup penting untuk mengimbangi kehadiran pangkalan militer AS—mengingat AS dekat dengan Arab Saudi, yang memberikan lampu hijau peresmian hubungan diplomatik dengan Israel. Wajar jika Qatar menyatakan, justru negara-negara tetangganya itu yang ingin merasuk ke wilayah teritorinya.

Kedekatan dengan Qatar hanyalah pintu masuk bagi Turki ke kawasan. Dengan bantuan negara-negara besar, Iran dan Arab Saudi saling berebut pengaruh di Timur Tengah. Kehadiran Turki diduga akan membuat situasi politik di kawasan kian bergairah, kalau tidak disebut memanas, dibandingkan dengan selama ini yang cukup dinamis.

KOMPAS
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965

Pemimpin Umum: Jakob Oetama
Wakil Pemimpin Umum: Lilik Oetama, Budiman Tanuredjo
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Sutta Dharmasaputra
Wakil Pemimpin Redaksi: Mohammad Bakir, P. Tri Agung Kristanto
Redaktur Senior: Ninok Leksono, Rikard Bagun, Ninuk Mardiana Pambudy
Redaktur Pelaksana: Adi Prinantyo
Wakil Redaktur Pelaksana: Marcellus Hernowo, Antonius Tomy Trinugroho, Haryo Damardono
Sekretaris Redaksi: Subur Tjahjono, Ilham Khoiri

RUU Cipta Kerja Pasca-persetujuan

Bambang Kesowo
Pemerhati Masalah HKI

Publik menyaksikan riuhnya Rapat Paripurna DPR sewaktu memberikan persetujuan terhadap RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020).

Banyak yang senyum-senyum meyimak bersemangatnya pimpinan sidang, atau ketika sedang bersitegang, juga ketika ada yang *walk out*. Di media, pemberitaan tentang reaksi yang menyusul juga beragam. Hari-hari berikutnya, entah apa motif dan tujuannya, ada yang demo. Itu yang terkait proses. Lantas, bagaimana pula tanggapan terhadap isi RUU itu sendiri?

Laporan media mengidentifikasi reaksi di empat spot di bidang ketenagakerjaan, lingkungan, pemerintah daerah/otonomi, dan pendidikan. Setidaknya itu. Atau sejauh ini, itulah yang ramai diperbincangkan. Bisa saja semua tadi baru sebatas isu-isu yang populer, yang meski tidak jelas benar atau salahnya, memang gampang menyulut emosi negatif. Ada yang bertekad mendemo. Namun, ada pula yang menasihati agar mengujinya ke Mahkamah Konstitusi. Tidak adakah contoh bidang lain yang dampaknya layak diperhatikan dan diantisipasi?

Kalau dicerna dengan sikap positif, kekhawatiran yang lebih layak diungkap tampaknya tentang kesiapan pelaksanaannya. Ihwal keribetan dan saran antisipasinya sudah diberikan. Bukan saja dalam elaborasi pengaturannya, melainkan lebih lagi dalam kesiapan pengadministrasiannya. Ambil contoh tentang Pusat Investasi. Bukan soal bagaimana nanti dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, tengoklah sisi lain dari keping kelembagaan itu.

Bukankah diketahui luas, dulu ada ikrar dan janji untuk berpemerintahan dengan organisasi yang ramping dan efisien? Baru kemarin memangkas kelembagaan (dan kabarnya masih akan ada lagi), sekarang sudah ancang-ancang membentuk lembaga baru lagi. Apalagi di tengah beban berat APBN saat ini.

Reaksi jenaka

Ada lagi yang lebih jenaka. Ada yang jenaka karena bukan mereaksi substansi, melainkan lebih tampil sebagai aktivitas. Mahasiswa dan pelajar ikut berdemo bersama dan menampilkan solidaritas buruh. Jenaka karena tak jelas dalam kaitannya dengan soal pendidikan atau apa, atau malah soal ketenagakerjaan. Ada lagi kejenakaan lain. Jauh dari makna hibur-menghibur, tetapi lebih dalam konteks politik hukum. Tepatnya politik hak kekayaan intelektual (HKI).

Dalam naskah RUU Cipta Kerja yang diajukan Presiden awal Februari 2020, sejauh tentang HKI, hanya ada satu usulan di Bagian Ketiga, Pasal 110 RUU yang isinya hanya satu pula, yaitu penghapusan Pasal 20 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Pasal 20 yang akan dihapus itu mengatur: "(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja."

Dengan dua artikel terdahulu (*Kompas*, 13/2/2020 dan 6/3/2020), penulis menyarankan: Pasal 20 UU Paten 2016 jangan dihapus. Batalkan Pasal 110 RUU Cipta Kerja yang diajukan Presiden.

Diselamatkan DPR

Sekarang, dalam RUU yang baru-baru ini disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Pasal 20 UU Paten No 13/2016 tak jadi dihapus. Namun, entah apakah itu hikmah dari sebuah koalisi politik yang dibangun Presiden dengan sejumlah parpol atau oleh pertimbangan lain, usulan tentang paten dalam RUU yang diajukan Presiden diselamatkan DPR. Tak menghapus atau meniadakan, DPR mengubah empat pasal UU Paten 2016, tentunya Pasal 20. Termasuk pasal yang diubah adalah Pasal 82 yang tampaknya terpaksa harus disesuaikan dengan perubahan isi Pasal 20.

Oleh DPR, Pasal 20 UU No 13/2016 diubah menjadi sebagai berikut. "(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia. (2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu: a. Pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten; b. Pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau c. Pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten."

Sementara Pasal 82 diubah sehingga rumusannya menjadi: "(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan: a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten; b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak dilaksanakan atau tanpa penggunaan Paten pihak lain yang masih dalam pelindungan. (2)Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai biaya."

Benarkah langkah untuk tak jadi menghapus Pasal 20 UU Paten 2016, tetapi mengubahnya, adalah sebuah penyelesaian *win-win*, pasti tergantung dari sudut pandangnya. Secara politis, terutama dalam hubungan Presiden dan DPR, hal itu mungkin. Tetapi, dari segi hukum, terutama dari sudut politik HKI, tampillah kejenakaan tadi.



Kewajiban yang diamanatkan kepada para pemegang paten yang diberi/didaftarkan di Indonesia untuk membuat produk dan menggunakan proses (dalam RUU Cipta Kerja yang baru disetujui = "wajib dilaksanakan di Indonesia"), bertolak dari prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum. Sedari penyusunan UU Paten 1989, hingga perubahan keempat di 2016, asas keadilan dipegang teguh untuk mewujudkan prinsip keseimbangan ini. Ada hak, ada kewajiban. Pembebanan kewajiban itu pun dilandaskan pada asas manfaat, yang diperlukan bagi upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kegiatan alih teknologi di Indonesia.

Hukum internasional

Dari sudut hukum internasional, mewajibkan pelaksanaan paten adalah hak berdaulat negara. Baik Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO/PBB) maupun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sekalipun tidak melarang. Traktat, konvensi, persetujuan, ataupun protokol (termasuk dan terutama TRIPs) yang diadministrasikan kedua lembaga dunia tadi juga tidak melarangnya. Ketentuan UU Paten Indonesia dirancang dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesesuaian dengan perjanjian internasional di bidang itu. Sebagai perunding HKI baik di WIPO hingga 1997 atau TRIPs dalam Putaran Uruguay GATT/WTO maupun perancangan UU Paten hingga perubahan yang ketiga pada 2001, penulis sangat mengetahui hal tersebut.

Namun, ketika teknik perumusan dalam perubahan Pasal 20 dalam RUU Cipta Kerja yang minggu lalu disetujui DPR dicermati, kejanggalan yang awalnya tampak tipis, malah kemudian mengganggu logika hukum rumusan Pasal 20 itu sendiri. Bagaimana mungkin, pelaksanaan dijabarkan hingga meliputi "mengimpor"? Sudah barang tentu, sebagai kata kerja, mengimpor juga bentuk pelaksanaan kegiatan. Namun, melaksanakan kegiatan mengimpor justru jauh artinya dari wajib memakai atau menggunakan paten di Indonesia! Sekalipun dibalut kata-kata yang sangat tipis bedanya, sungguh besar beda pikiran dasarnya, maknanya, dan wujud akhirnya!

Tes berikutnya menyangkut perubahan kata-kata awal pada Pasal 82 tadi. Kalau sudah meliputi arti boleh dengan cara mengimpor, lantas apa makna dan tujuan Pasal 82 itu? Sesungguhnyalah, secara materiil, yang namanya Pelisensian Wajib yang diatur dalam Pasal 82 sebagai sarana dalam politik penyeimbang tadi, menjadi kehilangan makna.

Apabila dapat diungkap dengan bahasa yang lebih jelas (bukan kasar), Presiden ketika mengajukan RUU mungkin tak diberi pemahaman yang lengkap tentang hal ini. Sebaliknya, walau dengan niat yang baik, upaya DPR memberikan "jalan keluar" itu pun malah membuat kita semua bagai tersesat dalam soal politik dan UU Paten tadi. Jenaka, bukan?

Siapa yang diuntungkan? Entah itu berkat tangan ketiga, keempat, atau tangan gaib, pemegang patenlah yang diuntungkan. Bukan rahasia, ada raksasa usaha yang jejaknya di dunia paling gigih merontokkan politik paten tadi demi politik dagang internasional mereka. Bukan rahasia, bagi kelompok tersebut strategi plastisnya adalah: *Compulsory Licensing must die!* Kalaupun mereka hadir sebagai entitas nasional, dan nyatanya memuat obat di Indonesia, sesungguhnya mereka tidak memerlukan perubahan tadi. Pengecualiannya, hanya pada obat atau vaksin baru.

Dalam kalkulasi dagang internasional, mereka lebih untung jika volume peredaran produk dan harga dapat dikendalikan oleh perusahaan induk. Untuk itu, baru yang namanya perubahan Pasal 20 menjadi sangat berarti bagi mereka.

Naman, itukah yang dimaksud dengan "kemudahan berusaha" dalam RUU Cipta Kerja? Patut dicermati, sekali lagi, tidak semua pemegang paten itu pengusaha, atau berusaha, atau investor. Sedari perancangan UU Paten 1989 hingga 2016, ataupun selama proses perundingan TRIPs, demikiandah keadaannya. Apakah usul penghapusan—walau akhirnya hanya menjadi perubahan Pasal 20 dan 82 yang jenaka tadi—karena kibasan berbisa tersebut, wallahualam. Apakah Presiden nantinya mengesahkan RUU tadi menjadi UU? Wallahualam juga.

Sedari awal sudah disampaikan, niat dan tujuan RUU Cipta Kerja itu baik. Hanya cakupan dan perumusannya yang dikhawatirkan akan menjadi masalah. Bukankah inti persoalannya kemudahan investasi dan berusaha serta perizinannya? Tak untuk dirugut, ide dan perumusan awal RUU sudah berlangsung jauh sebelum usrek soal Covid-19! Kalaupun kebutuhan membangkitkan (kembali) ekonomi yang rentan gara-gara Covid-19 saat ini dan nanti lantas menjadi lebih besar, bijakkah mengamputasi langkah yang justru menggoyang stabilitas sosial dan hukum, yang sesungguhnya dapat dihindari?

Pengalaman pula yang mengajarkan betapa susahnya mendapat kepercayaan, apalagi kalau yang butuh kepercayaan tak tahu bahwa dia tak mau paham.

Polemik "Diagnosiskan" Covid-19

Badrul Munir
Dosen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya; Dokter RS Saiful Anwar, Malang

Tuduhan membuat diagnosis Covid-19 ("meng-covid-kan") semua pasien yang berobat ke rumah sakit sudah lama kita dengar, tetapi kali ini tuduhan dilontarkan orang di lingkar Istana, yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Moeldoko mengecam RS agar tak gampang membuat diagnosis Covid-19 atau "meng-covid-kan" semua pasien hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi RS.

Adalah sebuah kehinaan bilamana ada oknum yang bermain mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan bangsa. Dan, jika tuduhan ini benar, sungguh tindakan yang sangat tercela mengambil keuntungan di atas penderitaan anak bangsa melawan keganasan Covid-19.

Pertanyaannya, benarkah tuduhan itu dan bagaimana dampaknya terhadap pemberantasan Covid-19 di Tanah Air.

Pentingnya penapisan

Corona virus disease (Covid-19) merupakan penyakit jenis baru dengan banyak gejala yang muncul dan organ yang terserang. Akibatnya, tanda-tanda gejala yang muncul sangat berbeda antara pasien satu dan pasien lainnya.

Virus ini juga mampu bermutasi dan memiliki daya sebaran (virulensi) tinggi sehingga mudah menularkan dan mematikan pasien yang terinfeksi. Dan, tempat di mana ada potensi terjadi penularan dan paparan tinggi adalah RS serta fasilitas layanan kesehatan lain.

Maka, di semua fasilitas kesehatan diperlukan sebuah sistem penapisan (*screening*) yang baik untuk menyaring agar pasien tak membahayakan orang lain di RS. Penapisan dimulai dari gejala klinis (panas, batuk, sesak, dan lainnya), pemeriksaan radiologis (rontgen, *CT-scan*, dan lainnya), hingga pemeriksaan laboratoris.

Hasil penapisan akan dianalisis oleh tim ahli dokter spesialis interdisiplin yang sudah terlatih untuk memutuskan status pasien apakah curiga Covid-19 atau bukan. Apabila curiga Covid-19, akan diperlakukan sebagai pasien Covid-19, termasuk cara merawat dan kamar perawatannya. Bahkan, jika meninggal, akan dilakukan protokol pemulasaraan dan pemakaman secara Covid-19.

Kepada pasien juga akan dilakukan tes usap (*swab test*) untuk memastikan kecurigaan Covid-19. Apabila hasil *swab* negatif, pasien akan dipindah ke ruang biasa dan diperlakukan bukan sebagai pasien Covid-19. Proses penapisan inilah yang sering kali dipersepsikan sebagai tindakan "meng-covid-kan" pasien oleh banyak orang (termasuk lingkar Istana).

Sebagai ilustrasi, terhadap pasien stroke yang datang ke RS, pasti akan dilakukan dulu penapisan saat berada di instalasi rawat darurat (IRD). Apabila dari hasil penapisan didapatkan gejala mayor Covid-19, seperti panas, batuk, dan sesak, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium dan foto rontgen untuk mendeteksi adanya infeksi virus. Apabila hasilnya mengarah ke Covid-19, pasien harus dites usap dan dirawat di ruang Covid-19 karena jika dirawat di ruang stroke biasa, pasien itu akan membahayakan pasien stroke lain (termasuk petugas medis).

Selain mendapatkan pengobatan stroke, pasien juga akan diterapi penyakit Covid-19 sesuai derajat keparahan penyakitnya, dengan harapan kesembuhan pasien lebih paripurna.

Sering kali, saat menunggu hasil *swab*, pasien meninggal dalam perawatan sehingga pemulasaraan jenazah akan mengikuti protokol kesehatan. Namun, jika hasil tes usap negatif, pasien diperlakukan sebagai pasien umum saat perawatan di RS dan pemulasaraan jenazahnya jika meninggal.

Laporan RS sangat ditentukan oleh hasil penapisan dan *swab* yang didapat. Permasalahan yang muncul adalah waktu yang lama menunggu keluarnya hasil *swab*. Dari pengalaman penulis, bisa 3-7 hari, bahkan bisa lebih lama. Kondisi seperti ini akan menyulitkan tim medis. Padahal, pemeriksaan *swab* ini merupakan pintu utama penegakan diagnosis Covid-19. Semakin cepat, semakin baik.

Lamanya menunggu hasil *swab* tidak hanya membahayakan pasien yang dirawat dan rumah sakit, tetapi juga membahayakan orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut sebelum dilakukan *tracing*. Padahal, orang yang pernah kontak juga melakukan kontak dengan orang lain sehingga mempercepat penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Lamanya hasil keluar dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah sampel yang diperiksa dan jumlah laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan *swab*. Hal ini akibat ketersediaan laboratorium yang mampu memeriksa tes *swab* sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Memang untuk membuka laboratorium yang bisa memeriksa *swab* harus memenuhi standar keamanan level tertinggi agar tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya akibat kebocoran virus.

Juga sudah ada upaya pemerintah memperbanyak kemampuan pemeriksaan *swab*, tetapi sampai saat ini masih belum memenuhi standar minimal WHO. Data yang dihimpun WHO menunjukkan, jumlah tes usap dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia terendah di seluruh dunia dan masih jauh dari standar minimal WHO. Yang ironis, di awal pandemi, pemerintah lebih memilih melakukan tes cepat (*rapid test*) daripada memperbanyak kemampuan tes usap.

Padahal, saat itu para ahli kesehatan Indonesia sudah mengingatkan pemerintah untuk lebih fokus memperbanyak tes usap daripada tes cepat yang tingkat sensitivitas dan spesivitasnya sangat rendah.

Perkuat komunikasi

Sesungguhnya polemik "meng-covid-kan" semua pasien tidak perlu terjadi jika para pemimpin lebih bersifat arif dan menjalin komunikasi yang efektif secara lintas sektoral.

Kalaupun ada dugaan oknum rumah sakit yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan memalsukan diagnosis Covid-19, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dapat melakukan tindakan pencegahan, bahkan penindakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku tanpa berpolemik.

Polemik akan menimbulkan berkurangnya para pejuang tenaga medis (tim kesehatan) yang sedang atau telah terpapar Covid-19 dan bahkan meninggal dunia. Hingga 12 Oktober 2020, sudah 237 dokter meninggal dunia karena Covid-19.

Kita tak ingin kehilangan lebih banyak lagi tenaga medis yang sangat berjasa dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Mereka adalah pahlawan kemanusiaan yang harus kita lindungi dan kita hormati.

POJOK

PSBB transisi lagi, warga diminta berdisiplin. *Perketat untuk lindungi diri dan sekitar.*

◆

Pemimpin seharusnya selalu bersama rakyat. *"Takhta" untuk rakyat....*

◆

Bekasi izinkan hiburan malam beroperasi. *Tetap jaga jarak dan pakai masker, ya.*

Mang Usil

Destruksi Legislasi Nasional

M Syafi'ie

Dosen Fakultas Hukum UII; Anggota Departemen Hukum Tata Negara

RUU Cipta Kerja akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. RUU ini sejak tahap perencanaan telah dikritik banyak kalangan, terutama para akademisi yang menilai adanya cacat serius pada aspek metodologi, paradigma, dan substansi pengaturannya.

Secara metodologi, UU ini menggunakan pendekatan *omnibus law* yang dalam teknis penyusunannya melingkupi banyak bidang sehingga akan berdampak pada perubahan dan penghapusan sekitar 79 UU terkait yang notabene memiliki muatan filosofi dan pertimbangan sosiologis berbeda.

Pada aspek paradigmatik, UU Cipta Kerja berorientasi pada tujuan bisnis dan investasi. Cara pandang ini bagian dari ideologi kapitalisme dan neoliberal, di antara cirinya ialah menghilangkan semua hal yang menghambat kepentingan investasi, liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, membuka keran secara tanpa batas investasi asing. Dalam konteks UU Cipta Kerja, ialah deregulasi dengan mengurangi peran, tanggung jawab, dan intervensi pemerintah.

Pada aspek substansi, sudah pasti UU ini meletakkan kepentingan investasi dan investor sebagai hal utama. Dalam hal ini, yang sangat terlihat ialah sentralisasi perizinan, aktor dan keran investasi diperbesar/diperluas, penghapusan dan pengurangan beberapa jaminan hak para pekerja, minimalisasi sanksi pelanggar lingkungan hidup, dan pemberian akses lebih mudah untuk alih fungsi lahan.

Beberapa catatan di atas sudah terdengar saat persiapan dan pembahasan RUU Cipta Kerja. Pengesahan RUU dan adanya reaksi penolakan yang sangat besar dari kalangan buruh, aktivis, dan akademisi ini bermakna tak ada akomodasi yang cukup baik dari pemerintah dan parlemen untuk memperbaiki RUU.

Pengesahan RUU Cipta Kerja oleh parlemen mengulangi kesalahan pengesahan UU No 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 3/2020 tentang Perubahan UU No 4/ 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, dan UU No 7/2020 tentang Perubahan Ketiga UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Minus kepercayaan

Pengesahan beberapa UU oleh parlemen yang mendapat perlawanan dari masyarakat dan akademisi memperlihatkan betapa serius permasalahan politik legislasi hukum di Indonesia. Pemerintah dan parlemen sekadar memaksakan kehendak untuk membuat hukum dan merusak secara total kepercayaan publik tentang makna agung sebuah norma hukum dan dalam skala yang panjang mendorong masyarakat untuk melawan dan menyepelekan aturan hukum.

Satjipto Rahardjo pernah mengatakan, hukum tidak berlaku karena ia memiliki otoritas untuk mengatur, melainkan karena hukum itu diterima oleh masyarakat. Pernyataan ini menjelaskan betapa penting bagi pemerintah dan parlemen yang memiliki otoritas untuk membuat hukum agar tidak menafikan pertimbangan filosofis dan sosiologis daripada hukum.

UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU No 15/2019 tentang Perubahan UU No 12/2011 juga menekankan makna penting naskah akademik yang di dalamnya harus menghadirkan analisis secara detail landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Naskah akademik UU Cipta Kerja dalam ketiga aspek masih menuai kritik dan dapat banyak ma-terus substantif dari masyarakat dan akademisi.

Pada aspek filosofis, sebuah perundang-undangan yang dibuat harus menghadirkan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk memasukkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pada aspek sosiologis, perundang-undangan yang dibuat harus menghadirkan pertimbangan/alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam berbagai aspeknya. UU tentang Pembentukan Perundang-undangan menyebut bahwa pertimbangan landasan sosiologis terkait fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sebuah peraturan tak boleh melahirkan dampak merusak bagi tatanan masyarakat dan negara.

Pada aspek yuridis, sebuah UU yang dibuat harus memastikan ada pertimbangan atau alasan yang memperlihatkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi masalah hukum atau untuk mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan hukum yang telah ada. Dalam hal ini, harus dipastikan bahwa UU yang akan dibuat tidak berbenturan dengan norma-norma pokok, terutama UUD 1945.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis selalu menjadi dasar dalam pembuatan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembuatan UU baru akhirnya harus dirancang dengan sangat serius dan melibatkan banyak kalangan, terutama masyarakat yang menjadi pihak atau korban langsung dari sebuah aturan. Cipta Kerja alih proses pembahasan dan pengesahannya berlangsung cepat, minimnya partisipasi masyarakat, tak mempertimbangkan masukan masyarakat dan akademisi, serta pengesahannya dilakukan pada masa pandemi suasana sangat dipaksakan.

Satjipto Rahardjo mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakat. Hukum merupakan pantulan masyarakatnya. Hukum tak berada di dunia yang abstrak, tetapi sebenarnya berada dalam kenyataan masyarakat. Karena itu, sebuah UU semestinya tak dilihat semata pencapaian hukum (*legal achievement*), tetapi lebih serius harus dilihat sebagai pencapaian sosial (*sosiological achievement*) dan dampak sosial (*sociological impact*). Pengesahan RUU Cipta Kerja, perubahan UU KPK, perubahan UU Minerba, dan perubahan UU MK adalah capaian legislasi demokrasi dalam hukum pada era pemerintahan dan parlemen periode ini. Namun, perlu dipikirkan dampak sosial dan capaian yang terjadi: apakah konstruktif atau destruktif untuk penghargaan pekerja, lingkungan yang sehat, dan tata kelola bernegara yang bertanggung jawab.

Teknik Penyuntingan Genom

Antonius Suwanto

Guru Besar Mikrobiologi IPB University; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

Jennifer Doudna dan Emmanuelle Charpentier adalah dua wanita pemenang Nobel Kimia tahun ini.

Temuan mereka mendasari teknik penting yang disebut penyuntingan genom (*genome editing*). Dengan teknik ini, manusia dapat menyunting, bahkan menulis ulang sandi genetik semua makhluk hidup, mulai dari bakteri, cendawan, tumbuhan, dan hewan, termasuk manusia sendiri.

Dengan teknik ini, He Jiankui, seorang peneliti di China, telah berhasil menyunting genom manusia menjadi kebal terhadap infeksi HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. HIV dapat menginfeksi manusia karena ada protein CCR5 pada sel darah putih tertentu. Virus ini tak dapat menginfeksi sel kulit manusia karena sel kulit tidak punya CCR5.

He Jiankui menghilangkan CCR5 pada sel darah putih sehingga diperoleh bayi, yang kebetulan kembar, bebas HIV meskipun terlahir dari ibu dan ayah yang terinfeksi HIV. Penelitiwa ini menggunakan cara kerja sains sekaligus kontroversial. Dr He dikecam dunia dan dihukum Pemerintah China karena melanggar etika penelitian dan bertindak ceroboh.

Terlepas dari kontroversi tersebut, teknik ini jelas menjadi salah satu sarana ampuh generasi milenial untuk mengubah bahan genetik makhluk hidup dengan implikasi positif atau negatif. Sejumlah orang mungkin sedang merenungkan apakah yang terjadi apabila mereka melakukan penyuntingan genom untuk menggagalkan infeksi SARS-CoV-2 (virus penyebab Covid) pada manusia.

Teknik penyuntingan genom tersebut dapat dikembangkan setelah manusia mengerti bagaimana sistem kekebalan pada bakteri. Apakah bakteri punya imunitas?

Penyuntingan genom

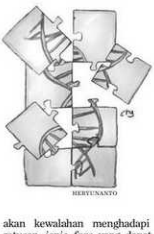
Bakteri telah ada paling tidak sekitar 3,5 miliar tahun lalu. Jika umur Bumi (sekitar 4,5 miliar tahun) dianggap setara 24 jam, bakteri sudah ada di Bumi sekitar pukul 08.00. Tanaman di darat baru ada sekitar pukul 22.00, dinosaurus sekitar pukul 23.41, dan manusia pada pukul 23.59.

Manusia baru ada di Bumi sekitar 1 menit saja dari total 24 jam umur Bumi, sedangkan bakteri telah ada selama 3/4 sejarah Bumi. Apabila kita merenungkan hal ini, mungkin tidaklah terlalu mengherankan jika virus penyebab Covid-19 dapat "menyandera" manusia modern hampir setahun.

Mereka itu sudah jauh berpengalaman di planet ini. Sebagaimana makhluk hidup lain, bakteri juga diinfeksi oleh virus. Virus yang menginfeksi bakteri ini biasa disebut *bakteriofage* atau *fage*. Jika satu partikel *fage* telah menginfeksi bakteri, *fage* itu akan berbiak menjadi ribuan atau jutaan partikel *fage* baru yang kemudian keluar dengan memecahkan sel bakterinya. Bakteri akan mati meninggalkan bangkai sel bakterinya yang hancur lebur.

Di alam banyak sekali *fage* ini, baik jumlah maupun macamnya. Jika tidak ada *fage*, mungkin seluruh Bumi ini telah dipenuhi bakteri. Tentu bakteri akan beradaptasi agar dapat lolos dari serangan *fage*. Salah satunya dengan cara membuat protein khusus yang bisa menggunting bahan genetik (DNA atau RNA) *fage*. Namun, gunting ini harus spesifik hanya bisa menggunting DNA *fage*, tetapi tidak DNA bakteri. Gunting-gunting khas yang dimiliki tiap jenis bakteri ini nanti yang menjadi alat penting dalam bioteknologi modern yang disebut sebagai enzim restriksi.

Namun, jika setiap gunting untuk setiap bakteri, bakteri



HERYUNANTO

akan kewalahan menghadapi ratusan jenis *fage* yang dapat menginfeksinya. Dalam kaitan ini, Jennifer dan Emmanuelle menemukan bahwa bakteri ternyata memiliki sistem kekebalan lain yang lebih canggih berdasarkan pada sistem *Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats* (CRISPR).

Dalam interaksinya dengan *fage*, bakteri dapat menyimpan sepotong kecil DNA dari *fage* dan menyisipkannya ke dalam DNA bakteri. Apabila ada *fage* baru, kejadian tersebut akan berulang sehingga ada bagian DNA bakteri yang berisi kumpulan potongan DNA setiap *fage* yang pernah menginfeksinya. Kumpulan potongan DNA yang hancur lebur.

Apabila ada infeksi oleh *fage*, sistem CRISPR ini akan mengaktifkan gunting DNA (enzim pemotong DNA) yang akan dipandu segmen RNA CRISPR untuk memotong DNA *fage* dan menggagalkan infeksinya. Meskipun terjadi pada sel bakteri, sistem CRISPR ini mekanismenya setara dengan sistem pembentukan antibodi pada manusia. Dari CRISPR ini, kita dapat menghargai bahwa makhluk seperti bakteri juga punya *adaptive immunity*.

Siapa yang menang atau kalah dalam interaksi bakteri dengan *fage* itu sifatnya dinamis. Saat bakteri telah mampu menemukan cara untuk mengontrol infeksi *fage*, *fage* juga akan menemukan cara untuk dapat menerobos pertahanan bakteri. Siklus menang-kalah ini hanya sementara dan berlangsung sepanjang sejarah evolusi bakteri dan *fage*-nya yang sudah berlangsung selama miliaran tahun. Kalah atau menang itu seperti putaran roda yang sudah menjadi bagian integral kehidupan itu sendiri.

Teknik menulis kembali

Mekanisme kerja CRISPR tidak saja menampilkan keindahan sistem pertahanan bakteri dari infeksi *fage*, tetapi juga memberi inspirasi pada manusia untuk memanfaatkan sistem biologi ini untuk menyunting genom. Sistem CRISPR ini telah memungkinkan manusia membuat jamur kancing (*Agaricus bisporus*) menjadi berwarna putih cerah dan tidak mudah menjadi coklat (*browning*) dengan menonaktifkan enzim profenol oksidase yang berperan dalam reaksi pencoklatan.

Tak seperti rekayasa genetika (*genetic engineering*) yang sering menimbulkan kontroversi, penyuntingan gen nyaris tidak dapat dibedakan dari mutasi yang terjadi secara alami. Itu sebabnya, jamur hasil suntingan tersebut dapat beredar di pasar tanpa melalui registrasi yang sangat ketat, seperti produk hasil rekayasa genetika.

Penyuntingan genom akan menjadi salah satu teknologi penting abad ke-21 dan bersama kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) akan membuka babak baru revolusi biologi dalam bidang pangan, pertanian, industri, medis, dan lingkungan. Jika dimanfaatkan dengan bijaksana, teknologi ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan membuat alam menjadi lebih indah.

Sudah sepantasnya penghargaan diberikan kepada peneliti yang sangat tekun mencari jawaban tentang apek biologi yang tampak sangat jauh dari aplikasi: interaksi bakteri dan virusnya.

SURAT KEPADA REDAKSI

Anda dipersilakan mengirimkan surat pembaca atau komentar mengenai kebijakan/layanan publik; konten artikel di halaman opini, ataupun pemberitaan di Kompas. Surat pembaca atau komentar dikirim ke **opini@kompas.id** atau ke Redaksi Kompas Jalan Palmerah Selatan Nomor 26-28, Jakarta 10270, dengan menuliskan nama lengkap, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi, disertai dengan fotokopi atau scan identitas diri.

Tukar Uang 75 Tahun RI

Anak saya ingin mendapatkan uang baru pecahan Rp 75.000 terkait peringatan Kemerdekaan Ke-75 Republik Indonesia. Ia antre hari Selasa (29/9/2020) di kantor Bank Indonesia (BI) Cabang Solo pukul 08.00-09.00.

Setelah cek antrean, cuci tangan, dan mengantre, dia didekati anggota satpam dan diminta memakai celana panjang. Saat itu ia memakai celana tanggung dan, menurut saya, cukup sopan. Ia terpaksa pulang untuk ganti pakaian.

Kembali ke BI, ia antre lagi, menyerahkan data pendukung, mengisi angket, dan seterusnya. Bersamaan dengan anak saya, ada orang yang juga mau tukar uang dengan bercelana pendek dan tidak disuruh pulang.

Setelah dipanggil ke loket untuk pemasukan data ke dalam komputer, ia masuk ke loket penukaran (kasir di lantai 2). Namun, baru sebentar anak saya keluar dan menangis. Ia gagal tukar uang.

Ternyata, dia tak boleh menukar uang karena dianggap belum menjadi penduduk (belum punya KTP). Padahal, dia memiliki dan membawa KIA (kartu identitas anak) asli, yakni KTP untuk anak yang dikeluarkan resmi oleh Disdukcapil Kota Surakarta.

Menurut Disdukcapil Kota Surakarta, identitas penduduk itu tidak ada kategori umur, yang penting telah terdata, berarti sah sebagai penduduk Indonesia.

Pertanyaannya, apa hubungannya tukar uang dengan pakaian? Usia? Bukankah KTP lebih sebagai alat bukti diri untuk kebenaran data?

WIDODO RUSMANTO
Joyosuran, Pusar Kliwon, Surakarta

Tentang Endemis Rabies

Saya ingin menambahkan informasi pada tulisan "26 Provinsi Endemis Rabies" dalam rubrik Sains, Lingkungan, & Kesehatan, *Kompas*, 26 September 2020. Menurut Didik Budijanto, Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan, pemahaman warga tentang rabies masih terbatas.

Yang saya prihatin, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa (hanya) anjing yang menularkan rabies. Bahkan, ada juga anggapan bahwa virus korona bisa ditularkan oleh anjing. Kiranya masyarakat perlu belajar sains soal anjing, satwa sahabat manusia yang setia.

Sejak kecil keluarga saya memelihara anjing. Anjing yang tidak divaksinasi rabies tidak serta-merta membuat anjing tersebut terjangkit rabies. Saya yang sudah berapa kali digigit anjing di rumah baik-baik saja.

Pun di kampung saya di Panguruan (di pulau Samosir, Sumatera Utara) dan di kampung ibu saya di Dolok-Sanggul, anjing dilepasliarkan. Saat itu tidak ada yang rabies dan tidak menggigit asal tidak diganggu.

Dalam buku *Zoonosis, Penyakit Menular dari Hewan ke Manusia* (Soeharsono, 2002) disebutkan, ada dua macam siklus rabies, yakni *urban rabies* di lingkungan permukiman dan *sylvatic rabies* yang ada di alam bebas.

Siklus *urban rabies* umumnya terjadi pada anjing geladak atau anjing liar, juga pada kucing, monyet, dan kadang ruminansia dan babi. *Sylvatic rabies* bersiklus pada satwa liar, seperti rubah (*fox*) di Eropa, skunk di Amerika Serikat dan Kanada, dan kelelawar pengisap darah (*Desmodus rotundus murinus*) di Amerika Selatan, Amerika Tengah, dan Meksiko. Jika satwa pembawa *sylvatic rabies* ini menggigit hewan piaraan, terjadilah *urban rabies*.

Tidak semua orang yang digigit hewan penderita rabies menjadi sakit karena munculnya penyakit rabies tergantung dari tingkat keparahan dan lokasi gigitan. Dengan jangka waktu virus sampai ke otak relatif panjang, ada kesempatan untuk mendapat serum antirabies.

Saat ini baru delapan provinsi bebas rabies: Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Sejumlah wilayah kepulauan juga bebas rabies, yaitu Pulau Weh (Aceh), Pulau Meranti (Riau), Pulau Sebatik (Kalimantan Utara), dan Pulau Makalehi (Sulawesi Utara).

BOYKE NAINGGOLAN
Jalan Mawar Merah, Perumnas Klender, Jakarta Timur

acara hari ini

Selasa, 13 Oktober 2020

KOMPAS TV

04.30 Kompas Pagi
07.00 Sapa Indonesia Pagi
09.30 Bincang Kita
10.00 Pop News
11.00 Ekonomi Siang
13.00 Sapa Indonesia Siang
14.00 Zona Inspirasi
14.30 Saksi Kunci
15.00 Update Korona
16.00 Kompas Petang
18.00 Berita Utama
19.00 Sapa Indonesia Malam
20.00 Indonesia Business Leadership
21.00 Kompas Malam
22.00 Laporan Khusus
22.30 Berkas Kompas
23.00 Kompas Sport Malam
23.30 Saksi Kunci
00.00 Kilas Kompas
00.30 Kompilasi Stand Up Comedy Indonesia
01.00 MNC Shop
01.30 Bingkai Inspirasi
02.00 Kompilasi Stand Up Comedy Indonesia

GTV

05.30 Nick Toon
06.30 Zak Storm
07.00 Kung Fu Panda: The Legend Continues
08.30 Hyperling
09.30 Obsesi
10.00 Buletin iNews Siang
11.00 The Spongebob Squarepants Movie
14.00 Kisah Viral
15.00 Legenda Sang Penunggu
16.00 Wadidaw... Bisa Gitu Yak
17.30 Naruto Shippuden The Movie: Ninja Clash in The Konohamaru Land
19.00 Bisa Gitu Yak
20.00 Warbiasah
21.00 Big Movies Platinum: Tremors 3: Back to Perfection
23.00 Catatan Si Danang
00.00 Gerebek
00.30 Buletin iNews Malam
01.00 MNC Shop
01.30 Travel Addict: Travelling Yuk!
02.00 iSinema

DAAI TV

06.00 DAAI Inspirasi
06.15 Lentera Kehidupan
06.30 Master Cheng Yen Bercerita
06.45 Kartun Petualangan Xiao Li Zi
07.00 Elias
07.15 Wusper
07.30 Puffin Rock
07.45 Ready Jet Go
08.00 Masak Sehat Bersama
08.30 Bincang Sehati
09.30 Sebarkan Kebaikan
10.00 Halo Indonesia
11.00 Drama Kisah Nyata: Dua Mutiara Kasih
12.00 Bingkai Sumatera
12.30 Helen's Little School
12.45 Wusper
13.00 Puffin Rock
13.15 Ready Jet Go
13.30 Master Chen Yeng Bercerita
13.45 Kartun Petualangan Xiao Li Zi
14.00 Dalam Ni Hao
14.30 Keliling Dunia Anak
15.00 Drama Kisah Nyata: A Railway Life
16.00 Bincang Sehati
17.00 Sebarkan Kebaikan
17.30 Halo Indonesia
18.30 DAAI Inspirasi
18.45 Lentera Kehidupan
19.00 Bingkai Sumatera
19.30 Refleksi
20.00 Drama Kisah Nyata: A Railway Life
21.00 Drama Kisah Nyata: Dua Mutiara Kasih
22.00 DAAI Inspirasi
22.15 Lentera Kehidupan
22.30 Refleksi
23.00 Halo Indonesia

TRANS 7

04.45 Treasure Trekkers
05.30 Khazanah
06.00 Redaksi Pagi
07.00 Ragam Indonesia
07.30 Selebrita Pagi
08.00 Trending
08.30 Warga +62
09.00 Kisah Para Nabi (God's Prophets)
09.30 Kisah Nabi Sulaiman A.K.A Hakeem Allah
10.00 Kepopedia
10.30 Bapau
11.00 Selebrita Siang
11.30 Redaksi Siang
12.00 Si Unyil
12.30 Si Bolang: Bocah Petualang
13.00 Si Otan
13.30 Tau Gak Sih
14.15 Jejak Petualang
15.00 Redaksi Sore
16.00 Jejak Si Gundul
16.45 Makan Receh
17.15 Selebrita Expose
18.00 Okay Bos
19.00 On The Spot
20.00 Opera Van Java
21.30 Indonesia Giveaway
22.30 The Police
23.30 Redaksi Malam CNN Indonesia
00.00 Theater
01.30 Apa Kata Dunia
02.30 Gara-gara Magic

trans7 rtv

05.30 Mask Mastor
06.30 Keluarga Somat
07.30 Go Astroboy Go
09.00 Semangat Hidup
09.30 Sinema Cerita: Jungle Book
10.30 CSI: Catatan Seputar Investigasi
11.00 Lensa Indonesia Siang
11.30 Super Wings
12.30 Fortime
13.00 Oddbods
14.30 Transformer
15.00 Keluarga Somat
16.30 Omar & Hana
18.00 Tobot Galaxy
19.00 Keluarga Somat
20.00 Masked Rider Black
21.00 Ultraman Mebius
22.00 Misteri Gunung Merapi
23.00 10-2
00.30 Semangat Hidup
00.30 Lensa Indonesia Malam
01.00 Cermin Hati
01.30 Sepakat Untuk Tidak Sepakat

JAKTV

05.00 Inside
05.30 Kiddies World
06.00 News Room
07.00 Lejel
08.00 Berkah Shop
09.00 Lejel
11.00 Animal Action
11.30 Kiddies World
12.00 ENPB
13.00 Cakrawala Action
13.30 Curcol Kuy
14.00 Presbikers
15.00 Lejel
16.00 Berkah Shop
17.00 ENPB
17.30 Inside
18.00 News Room
19.00 Galeri Publik
20.00 MNC Shop
21.00 Metropolis
22.00 Kabar Misteri
23.00 News Room
00.00 Dangdut Hour
00.30 Tawa Sutra
01.00 Rindu Tanah Suci

tv one

04.30 Kabar Pagi
06.00 Kabar Arena Pagi
06.30 Apa Kabar Indonesia Pagi
08.00 Rumah Mamah Dedeh
09.00 Lejel Home Shopping 2020
09.30 Coffee Break
10.00 Kabar Dunia
10.30 Sidik Jari
11.00 Liputan Siang
12.30 Kabar Pilkada
13.00 Hidup Sehat
14.00 Apa dan Siapa Tokoh Indonesia
14.30 Kabar Pasar Sore
15.00 Kabar Pandemi Corona
16.00 Ragam Perkara
16.30 Kabar Petang
18.30 Apa Kabar Indonesia Malam
20.00 Indonesia Lawyers Club
00.00 Kabar Hari Ini
00.30 Kabar Arena
01.00 Ragam Perkara
01.30 Buru Sergap

SCTV

04.30 Liputan 6 Pagi
06.00 Buser Pagi
06.30 Status Selebriti
07.00 FTV Pagi Spesial
08.30 FTV Pagi Spesial
10.00 FTV Pagi
12.00 Liputan 6 Siang
12.30 FTV Siang
13.45 FTV Sore
15.15 Princess Mermaid Season 2
16.45 Cinta Tapi Beda
17.45 Dari Jendela SMP
19.45 Anak Band
21.45 Samudra Cinta
23.15 FTV Primetime
01.45 Liputan 6 Malam
01.45 Sinema Dini Hari

TV RI

06.00 Klik Indonesia Pagi
07.00 Salam Olahraga
07.30 Ruang Demokrasi
08.00 Belajar dari Rumah
11.03 Indonesia Sehat: Info Dokter
12.00 Klik Indonesia Siang
13.00 Feature Kominfo
13.30 Feature LKBN Antara
14.03 Pesona Indonesia
14.30 Inspirasi Indonesia
15.03 The Train
15.30 Jendela Dunia: Golden Ribbon
16.00 Info Covid-19 Terkini
17.00 Protestan
23.15 FTV Primetime
18.00 Klik Indonesia Malam
19.00 Mencari Pemimpin
20.03 Musik Indonesia Indie
21.00 Dunia Dalam Berita
21.30 Film Nasional: Catatan Akhir Sekolah
23.30 Inspirasi Indonesia
00.00 Doa untuk Bangsa

TRANS TV

05.00 Islam Itu Indah
06.30 Insert Pagi
07.30 Good Morning
08.30 Sinema Indonesia Pagi (FTV)
10.00 Nih Kita Kepo
11.00 Safana
11.30 Insert Siang
12.30 Brownis (Obrowsie Manis)
14.00 Rumpi (No Secret)
15.00 Insert Today Weekdays
16.00 CNN News Update
17.00 Bikin Laper Weekdays
18.00 Keluarga Bosque
19.00 Santuy Malam
20.30 CNN Prime News
21.30 Bioskop Trans TV 1
23.30 Bioskop Trans TV 2
01.30 Drakor TTV Malam: What's Wrong With Secretary Kim

Resensi

SINEMA

Ridley Scott/ The Martian

Jutaan mil jauhnya dari planet tempat Mark Watney terdampar, NASA dan tim ilmuwan internasional bekerja tanpa lelah untuk membawanya kembali ke bumi. Jika tidak berhasil, misi penyelamatan tersebut dinyatakan gagal.



DOK IMDB

NADA

Disclosure/ Settle

Album studio debut Disclosure sukses dengan *single* utama "Latch" yang menampilkan Sam Smith. Edisi *deluxe* dari album ini berisi empat lagu bonus, termasuk *remix Disclosure* dari lagu Ware "Running".



DOK SPOTIFY

Ulas sebuah buku, album musik, atau film yang berkesan bagi Anda dalam 300 karakter. Kirim via surat ke resensi.klasika@kompas.com

KILAS IPTEK

"Live" Youtube 40 Jam pada 40 Tahun Walhi

Siaran langsung (*live*) Youtube selama 40 jam menjelang hari jadi ke-40 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) telah berlangsung selama dua hari. Tayangan ini bisa disimak sejak 10 Oktober sampai 15 Oktober 2020 pukul 12.00-18.00. Salah satu segmen siarannya diberi nama Klinik Omnibus Law. Dalam diskusi yang pernah berlangsung, terkait masyarakat adat dan reforma agraria, pengesahan *omnibus law* Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan mempersulit reforma agraria karena dinilai menjadi alat hukum baru liberalisasi tanah dan kekayaan alam. Hal itu akan memperparah ketimpangan struktur agraria dan mendegradasi keseimbangan ekologis. (*/ICH)

Perawatan Luka agar Segera Pulih

Perawatan luka sehari-hari secara benar penting agar segera pulih. Sebab, luka yang lama sembuh lebih mudah menimbulkan bekas luka yang mengganggu penampilan. "Dalam perawatan luka, banyak orang percaya mitos," ujar dokter Adisaputra Ramadhinara dalam acara daring "Pertolongan Pertama dan Perawatan Luka Akut Kecil dan Besar", Senin (12/10/2020), di Jakarta. Mitos itu meliputi, antara lain, memakai pasta gigi, mengisap luka, dan memakai cabai yang ditumbuk. "Warga perlu diedukasi untuk merawat luka sendiri dengan benar. Secara medis ada standar aturannya. Jangan sampai dari luka kecil yang salah dirawat menjadi luka besar yang membahayakan," ujar Adi. (ELN)

PERHUTANAN SOSIAL

Akses Masyarakat Hutan Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS — Di balik banyaknya kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, satu di antara materi di dalamnya disebut pemerintah dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui peraturan ini, masyarakat akan mendapatkan akses legal pengelolaan hutan yang sama dengan korporasi sehingga lebih terjamin akan kepastian hukumnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono menyampaikan, RUU Cipta Kerja merupakan wujud penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya bagi masyarakat di dalam kawasan hutan dan sekitarnya. Di dalam RUU Cipta Kerja terdapat penyebutan kata perhutanan sosial yang belum pernah tertulis dalam undang-undang sebelumnya.

"Inilah yang akan menjadi kepastian hukum, kepastian kawasan, dan kepastian usaha bagi masyarakat di dalam ataupun di sekitar kawasan hutan," ujar Bambang saat telekonferensi pers, Senin (12/10/2020).

Berdasarkan RUU Cipta Kerja versi 1.035 halaman yang disebut sebagai dokumen yang akan dibawa ke Presiden untuk ditandatangani, aturan tentang kegiatan perhutanan sosial tertuang dalam Pasal 29a dan 29b.

"Dengan adanya akses legal ini, tidak akan bisa lagi masyarakat dikenai pidana. Kalaupun ada kesalahan, maksimal itu hanya akan dikenai sanksi administrasi. Demikian juga kalau belum ada izin yang diberikan, dalam pasal-pasal yang mengatur tentang norma sanksi, kami sudah mendorong agar hanya diberikan sanksi administrasi saja kepada masyarakat," tutur Bambang.

KP

Pemanfaatan

Skema perhutanan sosial ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016. Aturan tersebut menyatakan bahwa perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk hutan desa, hutan rakyat, ataupun hutan adat.

Menurut data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) KLHK, terdapat 25.863 desa di dalam atau sekitar kawasan hutan. Dari total 42 juta hektar pemanfaatan hutan di Indonesia, masyarakat lokal hanya memanfaatkan sekitar 1,75 juta hektar atau 4 persen. Sementara seluas 40,46 juta hektar atau 96 persen lainnya dimanfaatkan swasta.

Direktur Jenderal PSKL KLHK Bambang Supriyanto mengatakan, berkaca dari kondisi tersebut, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Melalui skema itu, masyarakat ditargetkan dapat memanfaatkan hutan hingga seluas 12,7 juta hektar atau 30 persen dari total pemanfaatan yang ada. Realisasi perhutanan sosial hingga 30 September 2020 mencapai 4,2 juta hektar yang dikelola sekitar 860.000 keluarga. (MTK)

Kondisi Pesisir Utara Jawa



KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sisa tanaman mangrove berada di antara kawasan tambak yang akan digunakan sebagai lahan pembangunan pabrik di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). Sebagian besar kerusakan wilayah pesisir utara Jawa disebabkan faktor alam dan perubahan fungsi lahan.

Benahi Komunikasi Publik

Stigma sosial terkait Covid-19 memicu diskriminasi dan menghambat penanganan pandemi. Komunikasi publik dan keterbukaan informasi menjadi kunci untuk mengatasi stigma.

JAKARTA, KOMPAS — Persoalan stigma di masyarakat terhadap pasien Covid-19 terjadi karena kurangnya pemahaman yang tepat terkait penularan penyakit yang disebabkan oleh virus korona jenis baru ini. Untuk itu, komunikasi publik perlu dilakukan secara masif dan terstruktur dengan melibatkan semua sektor, terutama tokoh masyarakat.

Sejauh ini, stigma sosial terkait Covid-19 menjadi problem global, tetapi di Indonesia dampaknya lebih dalam karena belum ada langkah serius mengatasinya. Selain mempersulit upaya memutus siklus penularan, stigma memicu diskriminasi dan berdampak ekonomi terhadap penyintas.

Sebagian penyintas Covid-19 bahkan masih mengalami stigma dan diskriminasi setelah dinyatakan sembuh, seperti dialami Kristin, penyintas Covid-19 dari Mojokerto, Jawa Timur. Ia dirumahkan dari tempatnya bekerja sekalipun dinyatakan sembuh sejak dua bulan lalu. "Saya disuruh di rumah dulu dan dipotong gaji separuh. Pemilik yayasan sekolah belum mengizinkan saya masuk kerja, alasannya menjaga orangtua murid tidak khawatir," kata Kristin, Senin (12/10/2020).

Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengatakan, stigma terkait Covid-19 sangat berat, terutama jika dialami pekerja harian dan sektor informal yang jadi penopang ekonomi keluarga. "Status positif Covid-19 amat berat bagi mereka. Siapa yang akan menjamin anak dan istri jika mereka menjalani isolasi atau perawatan. Belum lagi jika distigma dan diskriminasi, misalnya warungnya tidak laku," katanya.

Menurut Imam, kondisi ini akan membuat mereka cenderung menolak pemeriksaan dan mengabaikan gejala yang pelacakan. Pada akhirnya, upaya memutus rantai penularan akan sulit dilakukan.

Stigma merajalela kalau warga mendapat pengetahuan tidak lengkap, bahkan salah tentang Covid-19, bagaimana penularannya dan mencegahnya. "Akibatnya, orang berprasangka buruk kepada mereka yang dianggap membawa virus hingga muncul diskriminasi," ujarnya.

Sejumlah Kebijakan Negara Menanggulangi Stigma Covid-19

Kanada
- Memberikan pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang rentan terkena stigma mengenai level bahayanya.
- Memberikan panduan dan contoh langsung seperti menunjukkan empati dengan cara memilih kata-kata yang sopan dan tidak diskriminasi.
- Menyediakan aplikasi Covid Alert yang mampu menginformasikan status infeksi pasien tanpa mencantumkan identitas pasien.

Belanda
- Membuat inisiasi dukungan ke sesama warga melalui jaringan media sosial dengan tagar #klapcoronadeweredluit atau bertepuk tangan bersama.
- Masyarakat saling memberikan dukungan dengan cara menyediakan makanan di depan pintu rumah untuk sesamanya, termasuk dukungan ke tetangga sekitar dari kaca jendela rumah.

Finlandia
- Bekerja sama dengan rapper, blogger, dan penulis untuk membagikan pengetahuan tentang Covid-19, termasuk aksi berbasis media sosial dengan tagar #flattenthecurve.
- Membuat perencanaan media komunikasi ke publik untuk menekan potensi stigmatisasi.
- Membentuk solidaritas publik melalui penyalaan lampu biru di Finlandia Hall dan menaruh boneka di kaca jendela rumah untuk memberi tahu kondisi keluarga.

Jepang
- Memberikan penjelasan tentang tiga gelombang pandemi pada publik, yaitu infeksi fisik, infeksi psikologis, dan infeksi sosial. Infeksi sosial mengarah pada tindakan-tindakan diskriminatif.
- Menyadarkan peran setiap individu saat pandemi, mulai dari menghindari kata-kata hinaan dan diskriminasi, hingga aktif memberikan informasi yang benar di media sosial.
- Memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara yang mengalami stigmatisasi.

Selandia Baru
- Pemerintah memilih untuk netral terhadap politik global sehingga mampu menekan stigma terhadap ras atau kelompok tertentu.
- Membentuk solidaritas etnis dan ras dalam menanggapi pandemi disertai slogan Unite Against Covid-19 dari pemerintah pusat.
- Membuat sistem peringatan secara nasional berdasarkan status laju infeksi yang terbagi menjadi empat level (*lockdown-restrict-reduce-prepare*).

Indonesia
- Mengajak masyarakat untuk memberikan apresiasi kepada penyintas Covid-19 terutama kepada tenaga kesehatan yang terpapar virus korona.
- Meminta masyarakat menghentikan stigma buruk terhadap pasien dan tenaga medis yang terkena Covid-19.

Sumber: LIPI, University of California, New Zealand Herald, Japan Times, Pemerintah Kanada, Selandia Baru, Jepang, Finlandia, Belanda, dan jurnal "Covid-19 Stigma Induced by Local Government and Media Reporting in Japan: It's Time to Reconsider Risk Communication Lessons from the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster", Susan Urbang Kompas/YOS

INFOGRAFIK: ISMAWADI

Transparansi informasi

Ahli biostatistik Indonesia yang mengajar di University of South Australia, Beben Benyamin, mengatakan, stigma sosial terkait Covid-19 juga terjadi di banyak negara lain, termasuk di Australia. "Stigma di sini biasanya terkait kelompok minoritas," katanya.

Namun, stigma tak sampai mengarah pada diskriminasi karena ada sanksi tegas. Hal yang membedakan Australia dan Indonesia adalah kerahasiaan data pasien dan keseriusan pemerintah menangani ini untuk meminimalkan stigma. "Kunci mengatasi stigma adalah keterbukaan dan keseriusan pemerintah. Jadi, masyarakat percaya kepada pemerintah sehingga tak panik ketika terkena Covid-19," ujar Beben.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Wiku Adisasmito, mengatakan, promosi kesehatan terkait Covid-19 makin digencarkan. Itu dilakukan agar warga memahami penyakit itu sehingga tak perlu ada lagi stigma.

"Komunikasi publik akan dilakukan secara masif agar tersjadi penetrasi mendalam di masyarakat. Pemahaman terkait Covid-19 harus dimengerti mulai dari pencegahan, penularan, pengendalian, hingga cara menanganinya. Ini bisa mengurangi stigma," katanya.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 secara rinci membagi tugas dan tanggung jawab dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu bidang yang dibentuk adalah komunikasi publik dan perubahan perilaku agar penyampaian informasi Covid-19 lebih baik. "Upaya yang harus difokuskan adalah promosi dan preventif. Jika ini diperkuat, soal stigma seharusnya tak lagi terjadi," ujarnya.

Stigma di masyarakat ditemui dalam beragam bentuk. Stigma atau pemahaman negatif banyak berupa penolakan sosial terhadap pasien Covid-19. Sejumlah orang menilai penularan Covid-19 karena perilaku buruk sehingga jadi aib.

Padahal, pada masa pandemi, penularan bisa dialami siapa pun, terutama kelompok rentan. "Semangat gotong royong dan saling peduli di masyarakat seharusnya lebih dihidupkan. Sudah banyak yang melakukan, tetapi perlu lebih luas lagi. Jadi, saat ada yang tertular bisa langsung ditanganI," katanya.

Pemerintah pun bekerja sama dengan pengelola hotel di daerah untuk menyediakan tempat isolasi bagi pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Fasilitas ini diharapkan mengatasi penolakan warga terhadap pasien Covid-19.

Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Ede Surya Darmawan mengatakan, komunikasi publik harus melibatkan tokoh masyarakat setempat, baik tokoh agama, tokoh budaya, maupun pemimpin adat. Masyarakat Indonesia yang beragam butuh cara pendekatan berbeda-beda.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Sumatera Selatan Subhan, pada awal pandemi, terjadi stigmatisasi terhadap tenaga kesehatan di daerah itu. Seiring masifnya sosialisasi dan tersedianya fasilitas penunjang perawatan, stigma terhadap tenaga kesehatan perlahan terkikis. (AIK/TAN/RAM)

IDENTIFIKASI COVID-19

Uji Diagnostik GeNose UGM Libatkan 1.600 Orang

YOGYAKARTA, KOMPAS — Alat deteksi Covid-19 melalui embusan napas yang dikembangkan tim peneliti Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, segera memasuki tahap uji diagnostik. Dalam tahapan itu, ditargetkan sebanyak 1.600 orang terlibat untuk diuji sampel napasnya oleh alat bernama GeNose tersebut.

"Harapan kami, minggu ini sudah bisa mulai uji diagnostik," kata anggota Tim Peneliti GeNose dari UGM, Dian Kesumapramudya Nurputra, seusai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Senin (12/10/2020).

Berbeda dengan alat deteksi Covid-19 yang umum saat ini, GeNose menggunakan embusan napas untuk penentuan infeksi Covid-19 atau tidak. Hasil pemeriksaan alat yang menggunakan sistem kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) itu diklaim bisa selesai dalam waktu sekitar 80 detik.

Dian menjelaskan, uji diagnostik itu bertujuan menguji akurasi GeNose dalam mendeteksi Covid-19. Dalam uji diagnostik itu, setiap orang akan diambil dua kali sampel napasnya sehingga total ada 3.200 sampel yang akan diperiksa.

"Ini merupakan prosedur yang harus dilalui untuk bisa mengembangkan alat kesehatan yang akurat. Tidak bisa sembarangan langsung mengklaim," ujarnya.

Dian menuturkan, uji diagnostik GeNose akan dilakukan di sembilan rumah sakit (RS) di sejumlah kota di Indonesia. Beberapa rumah sakit itu berlokasi di DIY, misalnya RS Umum Pusat Dr Sardjito, RS Akademik UGM, RS Bhayangkara Polda DIY, RS Lapangan Khusus Covid-19 (RSLKC) Bambanglipuro di Kabupaten Bantul, dan RS Pusat Angkatan Udara Hardjolukito.

Menurut Dian, uji diagnostik tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dua sampai tiga minggu. "Kalau satu rumah sakit bisa menguji 25 orang dalam sehari, dalam dua atau minggu insya Allah sudah terpenuhi," katanya.

Setelah uji diagnostik selesai, papar Dian, tim peneliti GeNose akan mempresentasikan hasilnya kepada Kementerian Kesehatan. Apabila hasil uji diagnostik tersebut dinilai berhasil, Kementerian Kesehatan akan mengeluarkan izin edar GeNose. Setelah itu, alat tersebut bisa mulai diproduksi.

"Kalau semua lancar, kami harapkan pertengahan atau akhir November sudah bisa diproduksi secara massal," ujar Dian yang juga dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM.

Uji diagnostik GeNose itu juga sekaligus menjadi uji klinis tahap kedua. Sebelumnya, GeNose telah menjalani uji klinis tahap pertama di RS Bhayangkara Polda DIY dan RSLKC Bambanglipuro. Dalam uji klinis itu, tim peneliti menggunakan GeNose untuk memeriksa 615 sampel napas dari 83 pasien, yakni 43 pasien positif Covid-19 dan 40 pasien negatif Covid-19.

Dian menyebut, pada uji klinis pertama itu, ada empat jenis perangti lunak (*software*) kecerdasan buatan untuk melakukan analisis. Dari keempat ini, Deep Neural Network (DNN) paling stabil dengan akurasi 96 persen.

Rektor UGM Panut Mulyono mengungkapkan, dalam pertemuan dengan Sultan HB X, pihaknya memohon dukungan untuk pengembangan GeNose. Panut menyebut, dalam pertemuan itu, pihaknya juga menyampaikan kemajuan pengembangan GeNose.

"Pertemuan kami dengan Bapak Gubernur untuk menyampaikan progres atau perkembangan GeNose. Kami juga memohon doa restu dan dukungan agar alat ini bisa cepat beredar di masyarakat," ujar Panut.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan HB X juga sempat mencoba GeNose secara langsung. Sultan, yang juga Raja Keraton Yogyakarta itu, mengembuskan napas ke dalam wadah yang disiapkan. Hasil embusan napas itu kemudian dianalisis menggunakan GeNose.

Cara kerja

Dalam kesempatan sebelumnya, Ketua Tim Peneliti GeNose UGM Kuwat Triyana mengatakan, GeNose menggunakan embusan napas untuk mendeteksi apakah seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak. Pola yang terbentuk dari embusan napas seorang yang terinfeksi Covid-19 akan berbeda dengan pola embusan napas orang sehat.

Kuwat menyebut, virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan menghasilkan *volatile organic compounds* atau senyawa organik mudah menguap yang khas. Senyawa organik mudah menguap itu juga terdapat dalam embusan napas seseorang.

Kuwat memaparkan, GeNose dilengkapi beberapa sensor yang bisa membentuk pola tertentu saat mendeteksi senyawa organik mudah menguap dari embusan napas. Pola yang terbentuk itu bisa dibedakan berdasarkan kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, pola yang terbentuk dari embusan napas seorang yang terinfeksi Covid-19 akan berbeda dengan pola embusan napas orang sehat.

Pola yang dihasilkan sensor tersebut dianalisis menggunakan sistem kecerdasan buatan, lalu bisa disimpulkan terinfeksi Covid-19 atau tidak. (HRS)

Hotel Tempat Isolasi Pasien Covid-19



KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, turun dari ambulans di Green Hotel, Kota Bekasi, yang dijadikan tempat isolasi khusus pasien positif Covid-19, Senin (12/10/2020). Manajemen hotel tersebut menyiapkan 90 tempat tidur untuk isolasi khusus pasien Covid-19 yang masa kontraknya 1-31 Oktober 2020. Sejak beroperasi, 20 pasien positif Covid-19 menempati kamar hotel tersebut. Hingga Senin (12/10) siang, tinggal 16 pasien yang menempati kamar.

Perbandingan Sejumlah Pasal Ketenagakerjaan Draf RUU Cipta Kerja

Draf 5 Oktober*

Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan **pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau penyesuaian tidak bersedia manerima pekerja/buruh**.
b. Perusahaan melakukan efisiensi;
c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian;
d. Perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan memaksa (force majeur);
e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
f. Perusahaan pailit;
g. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh;
h. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
i. Pekerja/buruh mangkir;
j. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
k. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib;
l. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan;
m. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
n. Pekerja/buruh meninggal dunia

Draf 12 Oktober**

Pasal 154A (1) Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan:

a. Perusahaan melakukan efisiensi **dilkuti dengan penutupan perusahaan atau tidak dikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian**.
c. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian **secara terus menerus selama 2 tahun**.
d. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeur).
e. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang;
f. Perusahaan pailit;
g. **Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:**
   1. **Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;**
   2. **Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;**
   3. **Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;**
   4. **Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;**
   5. **Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau**
   6. **Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.**
h. **Adanya putusan lembaga penyelesaian persilisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf g terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja.**
i. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri **dan harus memenuhi syarat:**
   1. **Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;**
   2. **Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan**
   3. **Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;**
j. Pekerja/buruh mangkir **selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis**
k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama **dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama**.
l. **Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana**;
m. Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan;
n. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun; atau
o. Pekerja/buruh meninggal dunia.

Draf 5 Oktober

Pasal 156 (1) - Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 (2) - Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **diberikan paling banyak** sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Masa kerja < 1 tahun, 1 bulan upah;
b. Masa kerja 1 tahun ≤ 2 tahun, 2 bulan upah;
c. Masa kerja 2 tahun ≤ 3 tahun, 3 bulan upah;
d. Masa kerja 3 tahun ≤ 4 tahun, 4 bulan upah;
e. Masa kerja 4 tahun ≤ 5 tahun, 5 bulan upah;
f. Masa kerja 5 tahun ≤ 6 tahun, 6 bulan upah;
g. Masa kerja 6 tahun ≤ 7 tahun, 7 bulan upah;
h. Masa kerja 7 tahun ≤ 8 tahun, 8 bulan upah;
i. Masa kerja > 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Draf 12 Oktober

Pasal 156 (1) - Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 (2) - Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) **diberikan dengan ketentuan** sebagai berikut:

a. Masa kerja < 1 tahun, 1 bulan upah;
b. Masa kerja 1 tahun ≤ 2 tahun, 2 bulan upah;
c. Masa kerja 2 tahun ≤ 3 tahun, 3 bulan upah;
d. Masa kerja 3 tahun ≤ 4 tahun, 4 bulan upah;
e. Masa kerja 4 tahun ≤ 5 tahun, 5 bulan upah;
f. Masa kerja 5 tahun ≤ 6 tahun, 6 bulan upah;
g. Masa kerja 6 tahun ≤ 7 tahun, 7 bulan upah;
h. Masa kerja 7 tahun ≤ 8 tahun, 8 bulan upah;
i. Masa kerja > 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Sumber: Draf RUU Cipta Kerja 5 Oktober dan draf RUU cipta kerja 12 Oktober versi dikirim ke Presiden, Diolah AGE

Draf yang disetujui untuk disahkan menjadi UU oleh pemerintah dan DPR dalam sidang paripurna (905 halaman).
****Draf akhir yang akan dikirim DPR ke Presiden Joko Widodo (812 halaman), berdasarkan keterangan Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, Senin (12/10) malam.**

Keterangan: Meskipun sejumlah ketentuan berubah di draf RUU Cipta Kerja versi 12 Oktober 2020, pasal-pasal krusial lain yang menjadi sorotan buruh tetap ada. Antara lain, Pasal 59 yang menghapus batasan tegas masa kontrak pekerja PKWT (perjanjian kerja kontrak waktu tertentu); penghapusan Pasal 65 yang menjadikan batasan tegas jenis pekerjaan yang bisa dialihdayakan; penetapan upah buruh berdasarkan satuan waktu lewat Pasal 88B; penetapan upah minimum kab/kota yang diatur bersayarat dan penghapusan upah minimum sektoral dalam Pasal 88.
Ketentuan yang ditengarai memudahkan proses pemutusan hubungan kerja juga masih diatur dalam draf terbaru. Misalnya, penghapusan Pasal 158 dan Pasal 159 yang meniadakan pembuktian serta hak buruh untuk membela diri dan menggugat pengusaha jika tidak diterima di-PHK atas alasan kesalahan berat.

K

INFOGRAFIK: KINGGA WAYATI

Pasal Berubah di Detik Akhir

Sejumlah pasal RUU Cipta Kerja di kluster ketenagakerjaan berubah di detik-detik akhir. Perubahan terjadi di beberapa substansi yang sebelumnya diprotes oleh kalangan buruh.

JAKARTA, KOMPAS — Substansi kluster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja berubah di detik-detik akhir, Senin (12/10/2020), menjelang diserahkan kepada Presiden. Perubahan itu dinilai menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengacu draf RUU Cipta Kerja versi 12 Oktober 2020 pagi, tebalnya 1.035 halaman, ada delapan poin dalam kluster ketenagakerjaan yang substansinya berubah jika dibandingkan dengan draf versi 5 Oktober 2020 yang 905 halaman.

Kedelapan poin itu, antara lain, soal istirahat/cuti panjang, aturan pengenaan denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah dan bagi buruh yang melakukan pelanggaran yang disengaja, serta penegasan bahwa Dewan Pengupahan memberikan saran dan pertimbangan ke pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan upah.

Ada pula ketentuan tambahan tentang alasan pemutusan hubungan kerja (PHK), ketentuan pembayaran pesangon, sanksi untuk buruh yang mogok kerja, penegasan bahwa iuran jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) akan ditanggung oleh pemerintah pusat, serta penegasan bahwa JKP akan diberikan paling banyak enam bulan upah.

Sejumlah substansi itu merupakan sebagian poin-poin yang sebelumnya diprotes oleh buruh. Aturan pesangon, misalnya, pada Pasal 156 dalam draf versi 5 Oktober disebutkan, pemberian pesangon saat PHK diberikan "paling banyak" 19 kali upah sesuai masa kerja. Mengacu ketentuan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan pesangon diberikan "paling sedikit" 19 kali upah sesuai lama masa kerja.

Sementara dalam draf RUU versi 12 Oktober pagi, frasa "paling banyak" dihapus. Sebagai gantinya, Pasal 156 di draf itu berbunyi, uang pesangon diberikan "dengan ketentuan" 19 kali upah sesuai masa kerja.

Isu lain mengenai PHK. Draf versi 12 Oktober pagi juga memunculkan ketentuan tambahan pada ketentuan Pasal 154A Ayat (1) mengenai alasan PHK. Draf itu memasukkan lagi aturan bahwa pengusaha harus memberi tiga kali surat peringatan sebelum mem-PHK pekerja. Sebelumnya, di draf yang dibawa ke paripurna, ketentuan dalam Pasal 161 UU Ketenagakerjaan itu dihapus.

Hal lain yang berubah dalam draf versi 12 Oktober pagi adalah buruh tetap bisa menggugat dan memohon di-PHK ke pengadilan hubungan industrial jika pengusaha merugikan mereka. Sebelumnya, perubahan itu muncul setelah RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi UU pada Senin (5/10), memantik aksi unjuk rasa penolakan di sejumlah daerah pada 6-8 Oktober 2020. Penolakan datang dari serikat pekerja dan buruh, mahasiswa, serta elemen masyarakat lain.

Jalan tengah

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, tim Kementerian Ketenagakerjaan dilibatkan dalam proses merapikan redaksional draf terbaru dengan DPR. Proses itu dilakukan sepekan terakhir setelah RUU Cipta Kerja disetujui untuk disahkan menjadi UU di Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). "Betul, kami ikut memberi masukan. Sebab, kami sudah ikut mengawal sejak di panja (panitia kerja). Ada tim khusus untuk itu," katanya.

Terkait sejumlah perubahan ketentuan dalam draf 1.035 halaman, kata Anwar, beberapa hal yang pada draf sebelumnya belum jelas, dibuat jelas. Saat ditanyakan apakah perubahan itu dibuat untuk meresponsi penolakan dan unjuk rasa dari publik, Anwar mengatakan tidak semata-mata seperti itu. "Ada perujukan pasal per pasal yang memang harus dilakukan penyesuaian," katanya.

Saat ditanyakan mengenai sejumlah ketentuan yang berubah, misalnya isu pesangon yang tidak lagi diberikan "paling banyak", menurut Anwar, perubahan itu dilakukan agar tidak merugikan pihak mana pun sebagai jalan tengah.

"Mungkin begini, jangan sampai (pemilihan kata) itu terlalu menguci. Kalau kita membatasi paling sedikit, juga ada yang dirugikan. Jadi, ya, sudah kita buat kalimat yang tidak usah menggunakan kata-kata itu," ujarnya.

Draf baru

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, Senin (12/10) malam, Badan Legislasi (Baleg) DPR telah memutuskan perbaikan terhadap draf RUU Cipta Kerja yang terdiri atas 812 halaman. Draf ini berbeda dengan format sebelumnya yang dirilis oleh Kesekretariatan Jenderal, Senin (12/10) pagi, yakni dengan draf dalam 1.035 halaman.

Terdapat sejumlah perubahan kembali di dalam draf 812 halaman, terutama pada bagian retribusi dan pajak. "Ini hanya soal perubahan format. Tadi, kan, 1.035 halaman dalam bentuk A4, sekarang dalam bentuk legal. Soal format kertas saja. Lalu, ada perubahan substansi sedikit," katanya.

Indra menegaskan, draf 812 halaman itu merupakan draf terakhir dan tidak akan ada lagi perbaikan draf oleh Baleg. "Ya, itu yang terakhir. Tidak ada lagi rapat perbaikan karena sudah selesai," ujarnya.

Saat *Kompas* mengecek, ada dua pasal di kluster ketenagakerjaan yang berbeda antara draf pagi (1.035 halaman) dan malam (812 halaman), yakni Pasal 88 C Ayat 4 dan Pasal 156 (1). Pada Pasal 88 C Ayat 4 draf pagi disebutkan, syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Adapun pada draf malam (812 halaman) disebutkan, syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sebelumnya, pada Senin siang, Indra sempat membenarkan, draf berjumlah 1.035 halaman itu sebagai draf terakhir yang akan dikirim ke Presiden. Namun, ia juga mengatakan, DPR masih memiliki waktu sampai Rabu (14/10) untuk merapikan redaksional.

Menanggapi perubahan itu, Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Jumisih mengatakan, substansi draf yang terus berubah membuat masyarakat kian bingung dan informasi semakin simpang siur. "Bagaimana mungkin, RUU sudah diketok palu, tetapi masih ada perubahan secara substansi?" ujarnya.

Menurut dia, kemunculan draf terakhir, beserta perubahan substansinya, menandakan proses formal telah diabaikan oleh pemerintah dan DPR. Bukan hanya kluster ketenagakerjaan, melainkan juga kluster lain yang merugikan rakyat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menuturkan, buruh tetap menempuh jalur hukum dan non-hukum untuk memprotes RUU Cipta Kerja. Selain uji materi ke Mahkamah Konstitusi, buruh mendesak *executive review* dan *legislative review* secara unjuk rasa susulan secara tertib. (AGE/REK)

RUU CIPTA KERJA

Pajak Jadi Daya Tarik, Penerimaan Berisiko Merosot

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan merelaksasi sejumlah peraturan dan mengubah sanksi administrasi pajak. Langkah ini diharapkan menambah daya tarik investasi yang ditawarkan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, selain pemberian insentif.

RUU Cipta Kerja meliputi perubahan berbagai ketentuan dalam tiga UU terkait perpajakan, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Sebelumnya, pemerintah menyusun RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian Perpajakan. Namun, RUU itu dihentikan sebagian ketentuannya dimasukkan ke dalam RUU Cipta Kerja.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, investasi menjadi kunci penciptaan lapangan kerja, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Namun, iklim investasi masih menghadapi berbagai tantangan sehingga perlu reformasi besar dan cepat.

Iklim investasi yang belum ideal tercermin dalam peringkat kemudahan berusaha yang dirilis Bank Dunia. Dalam Laporan Kemudahan Berusaha 2020, Indonesia di peringkat ke-73 dari 190 negara. Beberapa indikator dalam kemudahan berusaha belum optimal, terutama terkait perizinan, hukum, dan perpajakan.

"Peringkat kemudahan berusaha Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Perbaikan ini harus dilanjutkan dengan reformasi," kata Febrio dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Dalam RUU Cipta Kerja, reformasi perpajakan mencakup empat aspek, yaitu penghapusan pajak penghasilan atas dividen yang diinvestasikan di Indonesia, perubahan penentuan subyek pajak orang pribadi, pengaturan ulang sebagian pengertian penyerahan barang kena pajak, dan kemudahan administrasi perpajakan.

Febrio menambahkan, reformasi perpajakan dalam RUU Cipta Kerja terutama dalam konteks perizinan. Pemerintah memberikan sejumlah insentif pajak, tetapi titik berat kebijakan adalah menyederhanakan dan merelaksasi regulasi. Tujuannya, memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia.

Peringkat kemudahan berusaha Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. Perbaikan ini harus dilanjutkan dengan reformasi.

Febrio Kacaribu

Insentif pajak

Pemerintah memberi beberapa insentif fiskal untuk meningkatkan daya tarik investasi. Salah satunya penghapusan PPh dividen dari dalam dan luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia. Sebelumnya, wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25 persen dikenai tarif PPh normal dan wajib pajak orang pribadi dikenai PPh final 10 persen. Tarif PPh 26 atas penghasilan bunga dari dalam negeri yang diterima subyek pajak luar negeri dapat diturunkan lebih kecil dari 20 persen. Adapun aturan saat ini 20 persen.

Bagian laba atau sisa hasil usaha koperasi serta dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) juga tidak dikenai PPh. RUU Cipta Kerja mengatur penghapusan pinalsilan kedua institusi tersebut bukan merupakan obyek pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengakui, pemberian insentif berisiko menurunkan penerimaan pajak. Risiko penurunan penerimaan sudah dipertimbangkan dan terkalkulasi dalam proyeksi APBN 2020 dan 2021. Insentif pajak perlu diberikan sebagai daya tarik. "Pemberian insentif perpajakan akan lebih selektif dengan mempertimbangkan penciptaan lapangan kerja dan investasi baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi," ujar Suryo.

Pemerintah juga mengubah sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu pada suku bunga yang ditentukan Menteri Keuangan dibagi 12, ditambah *uplift factor* sesuai tingkat kesalahan wajib pajak. Aturan saat ini, sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap 2 persen.

Menurut Suryo, sanksi administrasi pajak diatur ulang karena terlalu besar dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku umum. Pengaturan tentang sanksi juga dibarengi perbaikan administrasi pajak dan pemberian kepastian hukum.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, menuturkan, reformasi perpajakan di tengah pandemi Covid-19 tetap harus dilakukan. Jika tidak, potensi penerimaan akan terus merosot. Rata-rata realisasi penerimaan perpajakan dalam satu dekade terakhir sekitar 93 persen dari target. Titik terendah pada 2015 yang hanya 83,29 persen.

Adapun rasio perpajakan pada 2019 sebesar 9,8 persen atau terendah dalam 10 tahun terakhir. "Rasio perpajakan terus merosot yang mencerminkan penurunan kinerja perpajakan," kata Nailul. (KRN)

ENERGI TERBARUKAN

Dukungan Swasta

Pemerintah Indonesia punya target ambisius sebagai konsekuensi ikut menandatangani Perjanjian Paris 2015. Target itu adalah mendorong peran energi terbarukan hingga sedikitnya 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025. Target itu bakal sulit dicapai tanpa dukungan swasta.

Angka 23 persen setara dengan kapasitas terpasang listrik 45.000 megawatt (MW). Padahal, kapasitas terpasang listrik dari energi terbarukan Indonesia saat ini masih di angka 10.000-an MW. Nyaris mustahil rasanya membangun 35.000 MW dalam lima tahun mendatang.

Mengapa mustahil? Berkaca di masa lalu, pertumbuhan rata-rata pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan di Indonesia hanya 400-500 MW per tahun. Pertumbuhan kapasitas terpasang listrik masih didominasi sumber energi primer batubara.

Berbagai sumber energi terbarukan yang didorong adalah tenaga bayu, surya, panas bumi, dan hidro. Pertumbuhan yang lambat bukan disebabkan potensi sumber energi terbarukan, melainkan faktor-faktor di luar itu. Sebut saja masalah perizinan yang ruwet, penolakan dari masyarakat, dan urusan birokrasi menyangkut kepastian berusaha.

Bicara potensi sumber energi terbarukan di Indonesia, segala jenis ada. Selain yang sudah disebutkan di atas, Indonesia juga punya potensi dari arus atau gelombang laut, biomassa, bahkan bahan bakar nabati. Total potensi energi terbarukan di Indonesia lebih dari 400.000 MW. Bandingkan dengan pemanfaatannya yang masih 10.000 MW.

Apakah peminat pengembang energi terbarukan di Indonesia rendah? Tidak juga. Sebenarnya banyak pemain yang ingin terlibat. Namun, seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar dalam peluncuran Indonesia EBT-KE Conex 2020, pekan lalu, minat swasta tinggi, sayangnya kendala ada di pemerintahan. Salah satunya menyangkut kepastian berusaha.

Sudah jamak bahwa di Indonesia banyak sekali aturan, mulai dari undang-undang (UU), peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga surat edaran pejabat tingkat eselon I. Di level UU kerap berbuah, bahkan tumpang tindih. Di sektor energi, ada UU tentang Energi, UU tentang Ketenagalistrikan, UU tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. DPR juga tengah menyusun Rancangan UU tentang Energi Baru dan Terbarukan.



SUPRIYANTO

Sudah jamak pula, UU di Indonesia bisa direvisi dalam waktu singkat, misalnya kurang dari 10 tahun. Cepatnya perubahan tersebut membuat investor bersikap menunggu sebelum mengeksekusi investasinya. Berdasarkan catatan Institute for Essential Services Reform (IESR), sejak 2008 sampai 2017, ada tujuh aturan yang dikeluarkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai harga listrik dari energi terbarukan jenis panas bumi. Begitu cepatnya perubahan tersebut jelas membingungkan investor.

Pemerintah sudah menjanjikan membuat kebijakan yang pro terhadap pengembangan energi terbarukan. Salah satunya melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembelian Listrik dari Energi Terbarukan oleh PLN. Kebijakan lain adalah menciptakan pasar baru energi terbarukan dengan program energi terbarukan berdasarkan pengembangan industri dan memaksimalkan potensi bioenergi dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota besar di Indonesia.

Terobosan pemerintah memang sedang ditunggu investor. Bahkan, sektor industri mulai melirik energi terbarukan seiring pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap yang kian gencar. Dalam dua pekan terakhir, dua industri besar di Indonesia, yaitu PT Tirta Investama dan Coca Cola Amatil Indonesia, memasang PLTS di atap pabrik masing-masing. Total daya terpasang sekitar 10 *megawatt peak* (MWp).

Kesadaran menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dengan meninggalkan sumber energi kotor mulai meningkat. Apalagi, sejumlah pasar di Eropa mensyaratkan produk yang mereka beli berasal dari sektor industri pengguna sumber energi terbarukan. Adapun pertimbangan lain adalah menghemat pengeluaran biaya operasional.

Menteri ESDM Arifin Tasrif, dalam pidato pembukaan peluncuran secara virtual The 9th Indonesia EBTKE Conex 2020, menyatakan dukungan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan. Dukungan ini tentu hal menggembirakan kendati masih perlu dibuktikan. Bagaimanapun, sektor swasta tetap menjadi mitra penting pemerintah merealisasikan berbagai program. (ARIS PRASETYO)

Proyek Hunian



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Berdasarkan data Bank Indonesia, kredit properti per Agustus 2020 tumbuh 2,9 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan dengan per Juli 2020 yang tumbuh 3,5 persen secara tahunan.

Indikator Perdagangan di Bursa Efek Indonesia

DATA SENIN, 12 OKTOBER 2020

KOMPAS 100

Kode	Nama Emiten	Seb	Ttg	Trd	Pnt	+/-	Vol	PER
ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.	1.550	1.600	1.540	1.590	40	6.982.400	37,86
ADRO	Adaro Energy Tbk	1.115	1.130	1.110	1.110	-5	54.603.000	8
ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.	555	575	550	565	10	12.253.800	89,25
ASSA	Adi Sarana Armada Tbk	505	510	500	505	-	6.242.400	19,95
APLN	Agung Podomoro Land Tbk	102	106	102	103	1	52.947.200	-389,56
AKRA	AKR Corporindo Tbk.	2.620	2.670	2.620	2.640	20	14.094.400	12,28
ANTM	Aneka Tambang Tbk.	765	790	765	780	15	108.453.600	110,49
AALI	Astra Agro Lestari Tbk.	10.925	11.150	10.950	11.100	175	1.935.200	27,26
ASII	Astra International Tbk.	4.740	4.810	4.700	4.700	-40	23.749.400	8,36
BRIS	Bank BRISyariah Tbk	855	910	860	900	45	301.368.000	36,93
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk	3.420	3.600	3.470	3.590	170	15.972.100	33,66
BBKP	Bank Bukopin Tbk.	214	266	216	250	36	1.327.498.100	75,08
BBCA	Bank Central Asia Tbk.	28.875	29.375	29.150	29.275	400	16.583.700	29,19
BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.	2.280	2.340	2.280	2.280	-	1.241.000	12,36
BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk.	5.550	5.650	5.550	5.625	75	38.973.500	12,62
BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	4.640	4.710	4.660	4.670	30	31.644.500	9,67
PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.	800	810	790	795	-5	3.670.400	6,92
BJBR	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	915	945	920	930	15	9.990.100	5,61
BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	545	550	530	540	-5	39.877.500	5,21
BNLI	Bank Permata Tbk.	1.975	2.460	2.050	2.460	485	7.917.500	93,18
BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	3.150	3.210	3.150	3.190	40	156.519.700	19,33
BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.230	1.285	1.240	1.260	30	59.895.400	8,6
BRPT	Barito Pacific Tbk	850	860	835	840	-10	99.023.100	-308,85
BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk	173	176	171	172	-1	51.225.000	-22,27
BULL	Buana Lintas Lautan Tbk.	316	320	314	316	-	187.331.900	4,17
PTBA	Bukit Asam Tbk.	1.985	2.020	1.980	2.020	35	15.389.500	6,44
BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.	780	810	790	795	15	70.909.500	-94,24
HOKI	Buyung Poetra Sembada	800	815	780	800	-	17.118.600	39,81
TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.	7.775	7.875	7.750	7.850	75	3.288.300	-163,93
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	5.950	6.000	5.900	5.975	25	1.911.000	29,64
CTRA	Ciputra Development Tbk.	700	730	715	720	20	26.208.700	39,42
ELSA	Elnusa Tbk.	210	212	208	212	2	21.296.600	5,94
ERAA	Erajaya Swasembada Tbk	1.605	1.635	1.605	1.620	15	12.551.100	22,79
GIAA	Garuda Indonesia (Persero) Tbk	236	240	230	230	-6	20.771.400	-0,29
BMTR	Global Mediacom Tbk.	226	240	226	232	6	262.012.200	3,49
GGRM	Gudang Garam Tbk.	44.250	44.900	44.500	44.550	300	1.716.500	11,22
HMSP	H.M. Sampoerna Tbk.	1.550	1.570	1.550	1.560	10	10.860.800	18,57
HKMU	HK Metals Utama Tbk	74	75	73	74	-	13.323.800	-4,93
INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	8.850	8.925	8.775	8.775	-75	3.361.800	8,26
INDY	Indika Energy Tbk.	925	935	915	915	-10	14.966.900	-7,6
ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk.	8.100	8.200	8.100	8.200	100	1.042.200	10,84
INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.	10.775	10.950	10.825	10.875	100	1.760.900	42,59
INAF	Indofarma Tbk.	3.110	3.340	3.110	3.250	140	15.114.000	-1.080,09
ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10.050	10.075	9.950	9.950	-100	6.518.600	17,18
INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.	7.225	7.325	7.200	7.200	-25	5.120.500	11,12
ISAT	Indosat Tbk.	2.070	2.110	2.050	2.060	-10	2.158.000	-16,41
SIDO	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk	785	835	785	795	10	19.369.600	28,82
WOOD	Integra Indocabinet Tbk	396	404	396	402	6	23.246.700	11,16
PSAB	J. Resources Asia Pasifik Tbk	224	236	226	228	4	50.322.700	198,88
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.	1.135	1.155	1.130	1.135	-	15.095.800	9,68
JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk.	3.780	3.840	3.760	3.800	20	5.703.900	130,42
JRPT	Jaya Real Property Tbk.	420	424	418	420	-	806.400	7,17
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	1.570	1.595	1.565	1.580	10	18.457.000	28,91
KAEF	Kimia Farma Tbk.	3.080	3.340	3.080	3.270	190	62.502.000	186,94
KINO	Kino Indonesia Tbk.	2.980	3.100	2.980	3.080	100	32.100	18,54
KBLI	KMI Wire & Cable Tbk.	312	318	314	316	4	853.100	-7,05
LINK	Link Net Tbk.	2.100	2.220	2.110	2.130	30	12.859.700	6,68
LPKR	Lippo Karawaci Tbk.	130	137	128	129	-1	86.103.900	-3,66
MAIN	Malindo Feedmill Tbk.	540	565	545	545	5	5.725.300	-13,8
LPPF	Matahari Department Store Tbk	960	1.010	965	995	35	76.045.800	-3,65
MYOR	Mayora Indah Tbk.	2.430	2.440	2.400	2.400	-30	1.659.300	28,59
MEDC	Medco Energi Internasional Tbk.	354	360	352	354	-	48.120.400	-8,07
MNCN	Media Nusantara Citra Tbk	790	805	790	800	10	96.946.100	6,22
MDKA	Merdeka Copper Gold Tbk	1.770	1.810	1.775	1.790	20	116.272.800	35,81
MTDL	Metrodata Electronics Tbk.	1.610	1.620	1.605	1.605	-5	501.400	12,63
MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.	605	670	620	645	40	35.513.600	-13,12
MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	2.510	2.540	2.500	2.510	-	21.140.300	61,92
TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.	6.050	6.200	6.075	6.200	150	3.300.100	7,53
PWON	Pakuwon Jati Tbk.	382	402	388	396	14	107.262.300	21,74
PNLF	Panin Financial Tbk	190	192	187	189	-1	34.586.600	3,42
PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.	980	1.005	985	1.000	20	153.562.000	126,08
PTPP	PP (Persero) Tbk	895	935	900	905	10	51.967.100	175,95
LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.	940	965	940	955	15	34.485.300	35,42
DMAS	Puradelta Lestari Tbk	232	238	230	232	-	37.067.200	70,83
RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.	570	590	570	575	5	32.410.300	380,54
SIMP	Salim Ivomas Pratama Tbk	314	322	314	316	2	11.895.200	-24,09
TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk	1.025	1.040	1.025	1.030	5	114.662.700	20,19
CLEO	Sariguna Primatirta Tbk	474	478	470	472	-2	6.764.000	43,77
SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	800	815	800	805	5	49.900	-5,66
SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	1.295	1.325	1.290	1.325	30	2.894.100	43,28
SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk	486	510	486	505	19	30.670.700	-18,22
SMGR	Semen Indonesia Tbk	9.175	9.450	9.250	9.400	25	5.312.400	45,52
SILO	Siloam International Hospitals Tbk	4.900	4.940	4.880	4.930	30	31.100	-30,82
SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk	202	208	202	208	6	23.628.700	2,98
SMRA	Summarecon Agung Tbk.	590	625	595	625	35	85.898.600	441,76
SCMA	Surya Citra Media Tbk.	1.255	1.265	1.235	1.240	-15	4.927.600	15,24
SPTO	Surya Pertiwi Tbk	398	400	398	400	2	1.095.100	14,49
SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk.	442	456	442	444	2	29.029.400	-8,5
TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	2.730	2.760	2.710	2.730	-	77.479.100	12,31
TINS	Timah Tbk.	735	755	735	745	10	18.136.300	-7,1
TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk	1.335	1.365	1.325	1.360	25	89.169.300	28,64
UNVR	Unilever Indonesia Tbk.	8.050	8.100	7.950	7.950	-100	6.704.300	43,01
UNTR	United Tractors Tbk.	22.400	22.700	22.150	22.500	100	4.369.600	10,33
INCO	Vale Indonesia Tbk	3.690	3.950	3.750	3.940	250	25.151.000	25,76
WSBP	Waskita Beton Precast Tbk	163	168	158	163	-	152.111.100	414,97
WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	585	655	575	650	65	113.187.900	-4,03
WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.	1.215	1.245	1.215	1.215	-	28.359.000	21.774,19
WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	182	185	178	180	-2	35.055.500	8,92
WTON	Wijaya Karya Beton Tbk	248	254	244	250	2	19.986.100	29,73
EXCL	XL Axiata Tbk	2.280	2.240	2.190	2.210	10	14.458.100	6,77

Sumber: Limas

KILAS EKONOMI

KKI Seri II Hasilkan Komitmen Pembiayaan

Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2020 Seri II yang digelar secara virtual oleh Bank Indonesia (BI), 7-9 Oktober 2020, mempertemukan 18 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan empat lembaga keuangan. Total nilai komitmen pembiayaan yang disepakati Rp 4,71 miliar. Selama KKI Seri II, omzet penjualan produk UMKM kain, kerajinan, serta makanan dan minuman Rp 3,79 miliar. Total omzet penjualan UMKM dalam KKI Seri I dan II Rp 8,65 miliar. "BI akan selalu berkomitmen mengembangkan UMKM agar dapat menjadi tulang punggung perekonomian," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam siaran pers, Senin (12/10/2020). (*/HEN)

Produk Raja Gula Kemasan Baru Diluncurkan

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI meluncurkan kemasan baru produk gula kristal putih Raja Gula. Peluncuran produk ini bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas gula yang dihasilkan perusahaan serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan produk gula di masyarakat. Direktur Utama RNI Eko Taufik Wibowo mengatakan, produk ini juga diharapkan dapat menstimulus geliat bisnis UMKM. Harga jual Raja Gula dipastikan tidak akan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. "Saat ini Raja Gula telah tersebar di 13.000 *outlet* di seluruh Indonesia dengan harga Rp 12.000-Rp 12.500 per kilogram," ujarnya. (*/HEN)

Peternakan di Kota



KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Somad (38) memerah susu sapi di kandang sapi miliknya di Kampung Pacilong, Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Kampung dengan permukiman padat penduduk ini memiliki 23 peternak sapi perah dan menjadi sentra penghasil susu sapi di tengah kota. Selain dipasok ke sejumlah pabrik pengolahan makanan, susu hasil perahan para peternak juga menggerakkan sejumlah unit usaha kecil menengah (UKM) ritel susu murni di Bogor.



KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pekerja mendempul dan menghaluskan badan pesawat model serat kaca di bengkel kerja pembuatan miniatur pesawat Anglo Aircraft Model di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Marison, pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah itu adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yang memperoleh dana pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM.

Perjelas Definisi UMKM

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dinilai menjawab persoalan yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun, definisi UMKM masih perlu diperjelas.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama beberapa hari terakhir menyosialisasikan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Sosialisasi meliputi kluster koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada Senin (12/10/2020), akun Instagram Kemenkop dan UKM menyosialisasikan pemberian akses pasar bagi pelaku UMKM dan koperasi.

Mengacu pada RUU Cipta Kerja Pasal 97 dan 104, pelaku UMKM dan koperasi diberi porsi paling sedikit 40 persen dari hasil pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah pada 2020 sebesar Rp 725 triliun sehingga ada potensi besar bagi UMKM untuk memanfaatkan kesempatan itu.

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun saat dimintai pandangan menilai positif perihal dukungan bagi UMKM di RUU Cipta Kerja. Dukungan itu, antara lain, soal kemudahan dan kecepatan perizinan serta sertifikasi halal.

Satu hal di dalam RUU Cipta Kerja yang masih menjadi pertanyaan adalah menyangkut definisi atau kriteria UMKM yang dinilai masih kabur.

"(Hal) ini berbeda dengan UU No 20/2008 tentang UMKM yang jelas menyebutkan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dari sisi omzet dan kepemilikan aset," kata Ikhsan.

Akumindo berpendapat, definisi atau kriteria UMKM harus dijelaskan di dalam peraturan pemerintah sebagai turunan undang-undang.

Secara umum, RUU Cipta Kerja kluster UMKM dan koperasi dinilai dapat menjawab persoalan yang dihadapi pelaku UMKM.

Ikhsan mencontohkan banyak UMKM yang tidak mampu apabila harus memenuhi ketentuan sebelumnya mengenai upah minimum regional.

Akumindo dilibatkan dan dimintai masukan saat penggodokan RUU Cipta Kerja. Salah satu masukan Akumindo yang diakomodasi menyangkut sertifikasi halal.

"(Sertifikasi halal) usaha mikro kecil jadinya gratis, dibayarkan oleh pemerintah. Hal itu permintaan kami semua dan tertera di RUU Cipta Kerja," katanya.

Ikhsan menambahkan, RUU Cipta Kerja dibuat untuk menyederhanakan sekian banyak UU di berbagai sektor, termasuk UMKM. Terkait hal tersebut, Akumindo tidak bisa terlalu berharap aturan turunannya dapat cepat dirampungkan.

"Namun, bagi kami, lebih cepat ada aturan UU ini akan lebih bagus meskipun kami dengar akan ada yang mengajukan uji materi," ujarnya.

Secara terpisah, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Maxensius Tri Sambodo, berpendapat, tantangan pengembangan ada pada sumber daya serta kapabilitas koperasi dan UMKM dalam menciptakan nilai tambah dari kesempatan yang diberikan kepada mereka.

"Dalam hal ini, *level of playing field* antara koperasi dan UMKM dengan badan usaha lainnya perlu mendapat perhatian," katanya.

Aturan turunan

Seperti halnya saat menggodok RUU, Akumindo berharap juga dilibatkan dalam penyusunan PP nantinya. Ia menyarankan semua pemangku kepentingan sebaiknya dilibatkan dalam penyusunan aturan yang bersifat teknis itu.

Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) Syahnan Phalipi mengatakan, Hipmikindo mengikuti sekitar enam kali forum tentang pembahasan RUU Cipta Kerja bidang UMKM. Mereka juga berharap nantinya dilibatkan dalam penyusunan PP.

"Poin kami, bagaimana nanti dibuat suatu PP untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja di lapangan agar UMKM bisa berusaha dengan baik dan membantu menyerap tenaga kerja," kata Syahnan.

Berdasarkan data Kemenkop dan UKM, per akhir 2018, ada 64,194 juta UMKM di Indonesia yang menyerap 116,978 juta tenaga kerja. Berdasarkan data di laman yang sama, ada 123.048 koperasi aktif di Indonesia dengan 22,463 juta anggota.

Menkop dan UKM Teten Masduki mengatakan tidak harus menunggu uji materi dalam penyusunan PP.

"Saya kira kami tidak harus menunggu karena biasanya di uji materi, kalau ada perbaikan, lebih ke parsial. Kami optimistis kluster koperasi dan UMKM hampir tidak ada yang perlu diuji materi," katanya. (CAS)

Regulasi Baru untuk Koperasi dan UMKM

UU No 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 6

(1) Kriteria Usaha Mikro:
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, b, ayat (2) a, b, dan ayat (3) a, b, nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan peraturan presiden.

UU Cipta Kerja

Bagian ketiga
Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah

Pasal 6
(1) Kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dengan peraturan pemerintah.

UU No 25/1992 Tentang Perkoperasian

Pasal 6 (1) **Koperasi Primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang**

UU Cipta Kerja

Pasal 6 (1) **Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang**

Sumber: RUU Cipta Kerja/Kementerian Koperasi dan UKM

INFOGRAFIK: DICKY

NOBEL EKONOMI

Format Baru Lelang Raih Penghargaan

STOCKHOLM, SENIN — Dua ekonom dari Stanford University, Amerika Serikat, Paul Milgrom (72) dan Robert Wilson (83), ditetapkan sebagai peraih Nobel Ekonomi 2020, Senin (12/10/2020). Panitia Nobel menyatakan, format baru lelang yang mereka temukan dan kembangkan dapat digunakan secara praktis sesuai perkembangan zaman sekaligus berguna bagi masyarakat dunia.

Milgrom dan Wilson, dikutip dari pernyataan pers Panitia Nobel di Stockholm, telah menekuni cara kerja lelang. Mereka juga merancang format baru lelang untuk barang dan jasa yang sulit dijual dengan cara tradisional. Contohnya lelang frekuensi radio. Penemuan mereka telah menguntungkan penjual, pembeli, dan pembayar pajak di seluruh dunia.

"Pemenang (Nobel) Ilmu Ekonomi tahun ini memulai dengan teori fundamental, kemudian menggunakan hasilnya dalam aplikasi praktis yang telah menyebar secara global. Penemuan mereka sangat bermanfaat bagi masyarakat," kata Peter Fredriksson, Ketua Komite Hadiah Nobel, dalam keterangannya.

Lelang memiliki sejarah panjang. Pada zaman Romawi Kuno, pemberi pinjaman menggunakan lelang untuk menjual aset yang mereka sita dari peminjam yang tidak dapat membayar utang. Rumah lelang tertua di dunia, Stockholms Auktionsverk, yang didirikan pada 1674 juga untuk tujuan menjual properti. Sesuai perkembangan, lelang tidak semata soal barang pertanian dan barang seni, tetapi juga barang lain, termasuk properti. Proses lelang pun dilakukan secara daring atau melalui agen properti.

Pemenang (Nobel) Ilmu Ekonomi tahun ini memulai dengan teori fundamental dan menggunakan hasilnya dalam aplikasi praktis.

Hasil lelang sangat penting bagi pembayar pajak dan warga negara. Lelang pengadaan barang oleh pemerintah atau sektor swasta diumumkan proses dan hasilnya. Jangkauan telepon seluler, misalnya, bergantung pada frekuensi radio yang diperoleh operator telekomunikasi melalui lelang spektrum.

Semua negara sekarang mengambil pinjaman dengan menjual surat utang pemerintah melalui lelang. Tujuan lelang tunjangan emisi Uni Eropa, sebut saja, adalah untuk mengurangi pemanasan global.

Jadi, lelang memengaruhi setiap level kehidupan masyarakat sekaligus semakin rumit. Komite Nobel menyatakan, dalam hal itulah Milgrom dan Wilson memberikan kontribusi besar. Mereka tidak hanya menjelaskan cara kerja lelang dan mengapa para peserta lelang berperilaku dengan cara tertentu. Milgrom dan Wilson juga menggunakan penemuan teoretis mereka untuk menciptakan format lelang yang sama sekali baru untuk penjualan barang dan jasa.

Robert Wilson mengembangkan teori pelelangan benda dengan nilai yang sama—nilai yang tidak pasti sebelumnya, tetapi pada akhirnya sama bagi semua orang. Contohnya termasuk nilai frekuensi radio masa depan atau volume mineral di suatu daerah tertentu. Wilson menunjukkan mengapa penawar rasional cenderung menempatkan tawaran di bawah perkiraan terbaik mereka dari nilai umum.

Adapun Paul Milgrom merumuskan teori lelang yang lebih umum yang tidak hanya memungkinkan nilai-nilai umum, tetapi juga nilai pribadi yang bervariasi dari satu penawar ke penawar lain. Dia menganalisis strategi penawaran dalam sejumlah format lelang terkenal. Dia menunjukkan, format itu akan memberikan kepada penjual pendapatan yang diharapkan lebih tinggi pada saat penawar mempelajari lebih lanjut tentang taksiran nilai satu sama lain selama penawaran. (AP/AFP/BEN)

PERDAGANGAN GLOBAL

Pemulihan Bergantung pada Penanganan Pandemi

JAKARTA, KOMPAS — Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dalam laporan terbarunya pada 6 Oktober 2020 menyebutkan, perdagangan global tahun ini menunjukkan tanda-tanda pulih dari kemerosotan akibat imbas pandemi. Namun, untuk mengembalikannya ke titik normal, dibutuhkan waktu yang lebih lama karena Covid-19 belum mereda.

WTO memperkirakan pertumbuhan volume perdagangan dunia pada 2020 akan turun 9,2 persen. Proyeksi ini lebih baik dibandingkan perkiraan pada April lalu yang menyebut volume perdagangan global akan tumbuh minus 12,9 persen. WTO juga memperkirakan perdagangan global pada 2021 tumbuh 7,2 persen.

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan dengan April lalu yang diperkirakan tumbuh 21,3 persen. Namun, WTO menegaskan, tingkat ketidakpastian perkiraan ini sangat tinggi karena bergantung pada perkembangan pandemi dan upaya penanganan setiap negara.

Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjadja Kamdani, Senin (12/10/2020), mengatakan, perubahan proyeksi itu mencerminkan tingginya ketidakpastian terhadap pemulihan ekonomi global. Hal itu disebabkan pemulihan ekonomi bergantung pada kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di setiap negara.

"Kebijakan penanganan ini turut memengaruhi peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja sehingga menggerakkan permintaan terhadap perdagangan dunia," ucapnya saat dihubungi dari Jakarta.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan Muhri menilai, perubahan proyeksi WTO turut mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 di sejumlah negara yang kasusnya cenderung melandai, contohnya China, Selandia Baru, Italia, Thailand, dan Irlandia.

Oleh karena itu, strategi pendekatan pasar ekspor Indonesia juga berorientasi pada negara-negara yang kasusnya relatif melandai. "Melandainya kasus berarti kegiatan ekonomi dan perdagangan pulih lebih awal dibanding negara lain (yang belum melandai)," katanya.

Agar peluang ekspor ke negara-negara tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, Kemendag memetakan karakteristik permintaan dan kebutuhan di negara tujuan. Informasi itu dihimpun atase perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center, dan perwakilan Kantor Besar RI setempat. (JUD)

Merindu "Tapis Berseri" Jadi Kenyataan

Kerusakan lingkungan membuat Bandar Lampung kian jauh dari slogan "kota tapis berseri". Pilkada 2020 memberi asa hadirnya pemimpin yang mampu mengatasi problem lingkungan dan membangun kota secara berkelanjutan.

Vina Oktavia

Tumpukan sampah menjadi pemandangan biasa bagi nelayan di pesisir Kota Bandar Lampung. Saban hari, mereka harus memilah ikan di antara sampah plastik.

Sampah mengotori pesisir Bandar Lampung di sejumlah titik, mulai dari Kecamatan Bumiwaras hingga Kecamatan Panjang. Sampah didominasi bekas pembungkus makanan ringan dan mi instan. Ada juga ranting sampah kayu, sayuran, hingga daging busuk.

Kondisi perairan yang semakin kotor juga mengancam mata pencarian nelayan setempat. Hasil tangkapan menurun, sedangkan kebutuhan hidup semakin tinggi.

"Sekarang ini susah mencari uang Rp 50.000 sehari dari melaut," kata Lilik (56), nelayan yang sudah lebih dari 30 tahun mencari ikan di perairan Sukaraja, Kamis (8/10/2020).

Ketua Komunitas Nelayan Sukaraja Maryudi mengatakan, kawasan pantai Sukaraja mulai tercemar sampah plastik sejak tahun 2000-an. Sampah plastik berasal dari aliran sungai yang terbawa hingga ke laut.

Sebelum perairan tercemar sampah, nelayan masih mudah mencari ikan. Hasil tangkapan melimpah dan jenis beragam. Namun, kini beberapa jenis ikan, seperti simba dan kembung, sulit dicari.

Penumpukan sampah hanyalah satu dari berbagai problem lingkungan di Bandar Lampung. Persoalan krusial lainnya adalah pendangkalan sungai, pengerukan bukit, hingga minimnya ruang terbuka hijau.

Padahal, selama ini Bandar Lampung dikenal sebagai "kota tapis berseri". Slogan itu mencerminkan visi untuk menjadi kota yang tertib, aman, patuh, beriman, sejahtera, bersih, sehat, rapi, dan indah.

Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, saat ini ada 23 sungai di Bandar Lampung yang kualitas airnya sangat buruk. Selain mengalami pendangkalan dan penyempitan, sungai juga masih menjadi tempat pembuangan limbah.

Sebagian besar perbukitan di Kota Bandar Lampung juga rusak akibat aktivitas pertambangan ilegal. Dari 33 bukit, sebanyak 20 bukit dalam kondisi hancur. Sementara kapasitas ruang terbuka hijau di Bandar Lampung baru terpenuhi 11,08 persen. Kondisi itu jauh dari ideal yang semestinya minimal 20 persen.

Kerusakan lingkungan yang kian parah membuat Kota Bandar Lampung menjadi langganan banjir saat musim hujan. Saat kemarau, sejumlah daerah juga dilanda kekeringan.

Direktur Eksekutif Walhi Lampung Irfan Tri Musri menilai, pemerintah daerah juga belum memiliki kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Selain persoalan penumpukan sampah di pesisir, pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bakung juga masih menggunakan sistem pembuangan terbuka.

Selain itu, sampah yang masuk ke TPA itu juga sudah melebihi kapasitas. Setiap hari, volume sampah rata-rata 800-1.000 ton, lebih besar dari kapasitas TPA yang idealnya menampung 230 ton sampah per hari.

Berbagai persoalan lingkungan itu membuat Kota Bandar Lampung mendapat predikat kota besar terkotor dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2019. Selama 11 tahun terakhir, Bandar Lampung juga tidak pernah meraih Penghargaan Adipura.

Ketua Pusat Studi Kota dan Daerah Universitas Bandar Lampung Ilham Malik mengatakan, akar persoalan lingkungan di Bandar Lampung adalah penataan ruang yang tidak memperhatikan fungsi dan konektivitas. Dia mencontohkan, dataran tinggi yang semestinya menjadi kawasan konservasi justru dijadikan permukiman dan pertambangan.

Lemahnya regalasi pemerintah membuat aktivitas pertambangan ilegal kian masif. Pembangunan permukiman dan tempat usaha juga kerap mengabaikan daya dukung lingkungan. Sejumlah hotel, misalnya, dibangun di kawasan perbukitan hingga daerah aliran sungai.

Ilham mengatakan, Kota Bandar Lampung memerlukan pemimpin yang mampu menyusun visi baru Kota Bandar Lampung hingga tahun 2045. Selain memperkuat posisi Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan dan jasa, kepala daerah juga harus mampu merancang kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Perubahan iklim membuat pembangunan kota berkelanjutan menjadi amat penting untuk mengantisipasi bencana. Jika tidak, banjir, longsor, hingga banjir rob akan terus menjadi ancaman di Bandar Lampung," papar Ilham.

Selain perbaikan lingkungan, Bandar Lampung juga membutuhkan sistem transportasi perkotaan seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengembangan bus transit cepat, kereta api perkotaan, angkutan air, hingga jalur sepeda dan pejalan kaki perlu dipikirkan.

Pacu infrastruktur

Terlepas dari sejumlah persoalan itu, Bandar Lampung sudah dekade terakhir ini terus berbenah. Daerah seluas 197,22 kilometer persegi itu memacu pembangunan infrastruktur.

Setidaknya ada 10 jembatan layang dan 1 jalan terowongan yang dibangun di Bandar Lampung. Aksesibilitas menuju Bandar Lampung pun kian terbuka, terutama sejak tol Trans-Sumatera yang menghubungkan Lampung dan Sumatera Selatan beroperasi penuh pada 2019. Aktivitas industri juga semakin bergairah.

Pembangunan nonfisik juga diupayakan pemerintah, antara lain peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 75,98 (2016) menjadi 77,33 (2019). Persentase kemiskinan menurun dari 10,15 persen (2016) menjadi 8,71 persen (2019). Tingkat penganggaran terbuka pun turun dari 8,1 persen (2017) menjadi 7,12 persen (2019).

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Asrian Hendi Caya, menuturkan, kendati tingkat penganggaran terbuka menurun, persentase penganggaran di Bandar Lampung masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Lampung. Kondisi itu menunjukkan pengangguran di perkotaan masih menjadi masalah yang perlu diluntaskan.

Tingginya pengangguran memicu persoalan kriminalitas di Bandar Lampung. Saat ini, berbagai tindak kejahatan jalanan, seperti perampokan dan pencurian, masih kerap terjadi.

Untuk mengatasi pengangguran, pemerintah perlu membuat terobosan demi mendorong masuknya investasi di daerah. Di sisi lain, sumber daya manusia yang berkualitas harus disiapkan dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja pada masyarakat, khususnya bagi anak-anak muda.

Dalam Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020, ada tiga pasangan calon yang akan bersaing. Mereka ialah Rycko Menoza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo, dan Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Semuanya diusung partai politik.

Pengamat politik dari Universitas Lampung, Robi Cahyadi Kurniawan, menilai, semua pasangan calon yang maju dalam pilkada di Bandar Lampung memiliki peluang untuk menang. Persaingan bakal berlangsung ketat karena setiap pasangan memiliki basis massa.

Setiap kandidat dituntut menghadirkan solusi. Mereka harus kreatif dan peka terhadap krisis mengingat siapa pun yang terpilih akan menghadapi problem berat di sektor ekonomi dan sosial akibat pandemi.

>> BACA SELASA:
Kota Banjarmasin
BACA JUGA E-PAPER HLM E

Pilkada Kota Bandar Lampung

Pasangan Calon Kepala Daerah

1. **Rycko Menoza** – Bupati Lampung Selatan (2010-2015)
   Johan Sulaiman – Anggota DPRD Provinsi Lampung (2004-2009) (2014-2019) (2019-2020)
   Partai dan Perolehan Kursi: Golkar 6, PKS 6
2. **Muhammad Yusuf Kohar** – Wakil Wali Kota Bandar Lampung (2016-2020)
   Tulus Purnomo – Anggota DPRD Provinsi Lampung (2004-2009) (2014-2019) (2019-2020)
   Partai dan Perolehan Kursi: PAN 6, Demokrat 5, PKB 3, Perindo 2, PPP 1
3. **Eva Dwiana** – Anggota DPRD Provinsi Lampung (2014-2019) (2019-2020)
   Deddy Amarullah – Asisten Bidang Pemerintahan Kota Bandar Lampung (2010-2017)
   Partai dan Perolehan Kursi: PDI-P 9, Gerindra 7, Nasdem 5



- **Jumlah penduduk (2019):** 1.051.500 jiwa
- **Sektor ekonomi terbesar (2019):** Industri pengolahan (21,39%); perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,5%); serta transportasi dan pergudangan (13,49%).

Pertumbuhan Ekonomi (persen)



Rencana Pola Ruang



Fungsi lindung
- Resapan air
- Perlindungan setempat (sempadan pantai; sempadan sungai, sekitar mata air, dan sempadan rel kereta api)
- Ruang terbuka hijau
- Cagar budaya
- Kawasan rawan bencana

Fungsi budidaya
- Perumahan
- Perdagangan dan jasa
- Perkantoran
- Industri
- Pariwisata
- Ruang terbuka non hijau
- Ruang evakuasi bencana
- Kegiatan sektor informal

Komposisi Sampah di TPA Bakung Tahun 2017



Estimasi Produksi Sampah (ton)



Keterangan: Estimasi setiap penduduk menghasilkan 0,16 ton sampah per tahun dan hanya 80 persen yang dibuang ke TPA.

Sumber: KPU, BPS, Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2030, Jurnal Karakteristik Sampah Padat Kota dan Estimasi Emisi Gas Rumah Kaca di TPA Bakung Kota Bandar Lampung (JPB, 2019); Dolah Listang, Kompas/ANA

INFOGRAFIK: ARIE

Tolak RUU Cipta Kerja



KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Ribuan pengunjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (12/10/2020). Demonstrasi diwarnai bentrok. Massa dipukul mundur dengan tembakan gas air mata.

BENCANA HIDROMETEOROLOGI

Banjir dan Longsor di Sejumlah Daerah Telan Korban Jiwa

BANDUNG, KOMPAS — Hujan deras melanda Jawa Barat bagian selatan sehingga berdampak pada bencana hidrometeorologis di Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Seorang warga dilaporkan tewas dalam longsor di Tasikmalaya.

Potensi bencana sebagai dampak dari cuaca ekstrem ini masih terjadi karena sebagian besar wilayah Jabar memasuki musim hujan. Garut dan Tasikmalaya terdampak banjir dan tanah longsor setelah hujan deras melanda pada Senin (12/10/2020) dini hari.

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, yang meninjau lokasi bencana di Tasikmalaya, meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan. Uu memaparkan, bencana di Tasikmalaya tersebar di 35 titik di 12 kecamatan dan menelan satu korban jiwa saat longsor di Kecamatan Cikunungtunjung.

"Secara geografis, di Tasikmalaya banyak daerah tebing yang curam. Harapan kami, masyarakat tetap harus waspada dengan adanya banjir dan longsor seperti ini," ujar Uu.

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tasikmalaya, bencana alam akibat hujan yang tergolong sejak Minggu (11/10) telah menutup akses jalur provinsi yang melintas Tasikmaya-Kuningunggal serta jalur kabupaten dan desa.

"Salah satu jalur yang terputus adalah akses Jalan Kecamatan Manonjaya-Gunungtanjung-Salopa," kata Uu.

Sementara itu, kemarin, banjir bandang melanda tiga kecamatan di Garut bagian selatan akibat luapan Sungai Cipalebuh, Cikasi, dan Cibera. BPBD Jabar mencatat sedikitnya 800 rumah terdampak banjir di Kecamatan Pameungpeuk dan Kecamatan Cibalong.

Selain berdampak pada akses jalan dan permukiman, banjir ini juga menyebabkan aliran listrik di bagian selatan Garut terputus. General Manager PLN Unit Jabar Agung Nugraha memaparkan, sebanyak 298 gardu distribusi di Kecamatan Pameungpeuk, Garut, belum bisa dioperasikan karena masih terendam banjir.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Bogor Abdul Mutholib menjelaskan, potensi hujan yang tinggi masih terjadi sebagai akibat fenomena La Nina. Fenomena cuaca sebagai dampak dari dinginnya suhu di Permukaan Samudra Pasifik ini berdampak pada musim hujan dengan curah hujan yang tinggi di Indonesia. Hal ini diprediksi berdampak pada potensi bencana hidrometeorologis atau bencana akibat cuaca ekstrem, seperti longsor dan banjir yang semakin tinggi.

"Pada Oktober, sebagian Jabar memasuki musim hujan, di antaranya Garut dan Tasikmalaya. Apalagi, fenomena La Nina ini berdampak pada peningkatan akumulasi hujan," ujarnya.

Di Kudus, Jawa Tengah, dua orang tewas tertimbun longsor di Desa Soco, Kecamatan Dawe, Senin. Warga diminta waspada karena Jateng mulai memasuki musim hujan.

Kepala BPBD Kudus Budi Waluyo membenarkan kejadian tersebut. Dua orang yang tewas ialah Riyan (19) dan M Najib (20). Keduanya warga Desa Soco yang bekerja membuat fondasi tersarang rumah warga.

Longsor terjadi sekitar pukul 10.30 saat empat pekerja membangun fondasi terasering rumah. Seorang pekerja sempat merasakan getaran tanah, yang diikuti longsoran tanah dari tebing setinggi sekitar 10 meter.

Dua pekerja bisa menyelamatkan diri, sedangkan dua lainnya tertimbun material longsor sedalam 2 meter. Tim gabungan dari BPBD Kudus, Relawan FRPB, TNI, Polri, Palang Merah Indonesia, dan warga mengevakuasi kedua korban sekitar pukul 11.30.

Dari Jawa Timur dilaporkan, BPBD Sidoarjo juga menyiapkan mitigasi bencana banjir di tengah pandemi Covid-19 di Desa Kedungbanteng dan Desa Banjarasri. Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengatakan, berdasarkan prediksi Stasiun BMKG Juanda Surabaya, saat ini memasuki musim pancaroba. Pada musim ini ada peluang terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sidoarjo baru memasuki musim hujan pada November mendatang.

Permukiman

Adapun di Jakarta Selatan, 169 warga RT 004 RW 002 Ciganjur, Jagakarsa, masih mengungsi akibat banjir yang tiga hari terakhir menggenangi rumah mereka. Tinggi air di dalam rumah kini berkisar 15-30 sentimeter. Turap setinggi 10 meter di perumahan Melati Residence, yang berhadapan dengan permukiman warga RT 004, ambrol, Sabtu (10/10).

Sugi (50), warga RT 004, mengatakan, permukiman warga tidak pernah banjir sebelumnya kendati hujan lebat mengguyur lokasi ini. Karena itu, ia amat terkejut saat air meluap dari saluran pembuangan kamar mandinya pada Sabtu lalu. Rumahnya berjarak 20 meter dari Kali Setu.

"Pintu rumah posisinya tertutup waktu itu. Lalu, terdengar bunyi gemuruh. Pas pintu saya buka, air langsung tinggi. Hanya dalam hitungan detik, air sudah setinggi dada (sekitar 1 meter)," katanya ketika ditemui di rumahnya. Pada Senin (12/10) siang, ketinggian air masih sekitar 5 sentimeter di rumah Hamdani.

Banjir akibat longsoran turap ini membuat seorang perempuan berusia sekitar 40 tahun tewas. Rumah Hamdani berada di depan rumah korban. Saat kejadian, Hamdani mendengar suami korban berteriak meminta tolong.

"Dia bilang, istrinya tertimpa reruntuhan. Warga dan tim SAR menemukan jasadnya di depan rumah dalam posisi tertimpa puing reruntuhan," ujar Hamdani.

(ITG/NIK/DIT/JAL/FAI)

KILAS DAERAH

Kecelakaan Tunggal di Cikampek, Tiga Tewas

KARAWANG — Tiga orang tewas dalam kecelakaan tunggal di Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Senin (12/10/2020). Kecelakaan terjadi sekitar pukul 05.00 di ruas Tol Jakarta-Cikampek Kilometer 70,700. Kendaraan minibus Daihatsu Luxio dengan nomor R 8597 SH yang dikemudikan Saprudin (36) melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Dia bersama delapan penumpang lainnya berangkat dari Kabupaten Banyumas. Saat tiba di lokasi, tiba-tiba kendaraan oleng ke kiri, keluar dari lajur satu, dan menabrak pohon sawit di pinggir jalan. "Pengemudi diduga lalai, saat berjalan tidak penuh konsentrasi," kata Kepala Satlantas Polres Karawang Ajun Komisaris Peterson Timisela. Saprudin tewas di lokasi kejadian, disusul dua penumpang lain, Hendri (21) dan Melani (9), yang meninggal di rumah sakit. (MEL)

Empat Tewas Tersetrum di Sawah Bojonegoro

SURABAYA — Empat orang dari satu keluarga petani tewas tersetrum di persawahan Dusun Prijek, Desa Tambahrejo, Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu (11/10/2020) malam. Mereka ialah Parno (60) dan Riswati (51), serta dua anak mereka, Jayadi (30) dan Zaenal Arifin (21). Saat ditemukan warga, korban tergeletak di sawah dengan posisi memegang kabel listrik dari tiang yang roboh. Listrik pada kabel itu diduga sengaja dialirkan ke sawah tetangganya untuk jebakan atau mengusir hama tikus. Kasus ini disidiliki Polres Bojonegoro. "Masih proses pemeriksaan saksi-saksi," kata Kepala Polres Bojonegoro Ajun Komisaris Besar M Budi Hendrawan saat dihubungi, Senin (12/10). Kejadian petani tersengat listrik dari jebakan tikus di Bojonegoro juga terjadi pada Juni dan Agustus lalu masing-masing menewaskan satu petani. (BRO)

Covid-19, Pesta Pernikahan Dilarang di Padang

PADANG — Seiring peningkatan kasus Covid-19, Pemerintah Kota Padang melarang pesta pernikahan serta memperketat penerapan protokol kesehatan di perkantoran dan restoran. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Padang Edi Hasymi, Senin (12/10/2020), mengatakan, kasus Covid-19 di Padang meningkat signifikan. Hal itu dipicu kelonggaran sesuai berakhirnya pembatasan sosial skala besar yang diganti dengan normal baru. Saat kluster perkantoran merebak, pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan di kantor-kantor diperketat. Begitu juga pengawasan di restoran. Mengantisipasi agar kasus tidak meluas, Pemkot Padang untuk sementara melarang adanya pesta pernikahan. "Mulai 9 November 2020, kami tidak keluarkan lagi rekomendasi untuk pesta pernikahan. Besok mulai kami sampaikan ke camat dan lurah," kata Edi. Kebijakan ini diberlakukan bulan depan agar warga yang telanjur merencanakan pesta dalam waktu dekat tidak dirugikan. (JOL)



SUPRIYANTO

KILAS METRO

LBH Masyarakat: 214 Orang Masih Hilang

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat Muhammad Afif, Senin (12/10/2020), mengatakan, Tim Advokasi untuk Demokrasi menerima pengaduan terkait orang yang kemungkinan ditangkap terkait demo menolak RUU Cipta Kerja yang ricuh pekan lalu dan belum ada kabarnya. Sejak Selasa (6/10) terhimpun 517 aduan. Sejauh ini, 303 orang sudah ditemukan. "Ada 214 orang itu yang belum diketahui keberadaannya di mana," ujar Afif. Dari Polda Metro Jaya, data terakhir ada 54 tersangka dalam kasus kerusuhan, Kamis (8/10), dengan 28 orang ditahan. "Penyelidikan dan penyidikan masih berlangsung. Dimungkinkan jumlah tersangka akan bertambah," kata Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana, kemarin. (JOG)

Pemkot Bogor Siapkan 300 Kamar bagi OTG

Pemerintah Kota Bogor menyiapkan satu hotel berkapasitas 300 kamar untuk isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala atau OTG. Pemkot masih menunggu penilaian kelayakan hotel oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Wakil Wali Kota Bogor, yang juga Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, penambahan kasus Covid-19 menyebabkan tingkat okupansi di rumah sakit rujukan kini lebih dari 70 persen, melampaui standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang 60 persen. "Kami mempercepat penambahan ruang isolasi atau tempat tidur di fasilitas non-kesehatan. Saat ini disiapkan satu hotel dengan 300 kamar untuk pasien OTG," kata Dedie, Senin (12/10/2020). (GIO)

PSBB Transisi Tekan Optimisme

Angka kasus positif di Jakarta dan sekitarnya terus naik. Namun penerapan PSBB transisi di DKI malah diikuti dengan makin longgarnya kebijakan di daerah tetangga. Ini menekan optimisme soal pengendalian wabah di Jabodetabek.



FOTO: KOMPAS/ERABTYA HERADHUMI; INFOGRAFIK: HANS

JAKARTA, KOMPAS — Tren kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta memang melandai pada periode medio September hingga awal Oktober. Namun, hal itu belum bisa dibilang rendah karena tren peningkatan kasus positif masih 22 persen. Pada awal September, tren peningkatan kasus 32 persen. Tinginya persentase menjadi salah satu alasan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar transisi di Ibu Kota.

Pada Senin (12/10/2020), data dari corona.jakarta.go.id, menunjukkan penambahan 1.168 kasus di Jakarta sehingga total menjadi 88.174 kasus. Selain itu, ada penambahan 21 orang meninggal sehingga total 1.922 kasus meninggal. Angka kesembuhan 72.633 kasus.

Penambahan kasus juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Data satuan tugas Covid-19 setempat, pada Senin, menunjukkan, akumulasi kasus Covid-19 di daerah itu mencapai 4.917 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.045 kasus sembuh, 133 kasus meninggal, dan 739 kasus masih dirawat atau isolasi mandiri. Akumulasi kasus Covid-19 di Kota Bekasi pada Selasa (6/10) sebanyak 4.001 kasus. Artinya, selama enam hari terakhir ada penambahan 916 kasus baru.

Selain lonjakan kasus, angka kepositifan di Kota Bekasi juga tinggi, yaitu mencapai 13,75 persen. Presentasi itu jauh lebih tinggi dari standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu 5 persen.

Di saat kasus Covid-19 masih terus melonjak, kebijakan pembatasan jam operasional atas aktivitas usaha di malam hari sampai pukul 18.00 yang didasarkan pada Maldumat Wali Kota Bekasi kini tak lagi diperpanjang.

"Kami kemarin melakukan seminggu (pembatasan jam operasional 2-9 September) tidak banyak perubahan. Ini karena kami terus melacak dan melakukan pengendalian di daerah-daerah yang dianggap terjadi penularan secara masif," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, kemarin.

Penambahan kasus dan longgarnya penerapan pembatasan turut dilaporkan terjadi di Tangerang Selatan, Banten. Kasus terkonfirmasi Covid-19 di kota itu sepekan terakhir, 5-12 Oktober 2020, sesuai data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tangsel, rata-rata ada penambahan di atas 20 kasus per hari.

Kenaikan kasus secara drastis di Tangsel ini terjadi tiga pekan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat pada 14 September 2020. Saat itu, Pemkot Tangsel tidak mengikuti langkah DKI Jakarta yang mengetatkan PSBB.

Kontraproduktif

Pelonggaran PSBB menjadi masa transisi dinilai sejumlah pengamat membawa penanganan penularan Covid-19 di Ibu Kota ke arah yang kian pesimistis. Apalagi, unjuk rasa penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja mempertinggi risiko jumlah kasus positif baru.

"Sekali lagi tidak tampak ada kajian perilaku manusia selama masa PSBB dengan pengetatan maupun PSBB transisi fase pertama," kata Rakhmat Wijayanto, sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta.

Menurut dia, ketidakpedulian warga terhadap protokol kesehatan merupakan kendala utama dalam pengendalian pandemi Covid-19. Hal seperti memakai masker dan menjaga jarak dari Maret hingga Oktober masih terus sulit dicapai secara komprehensif. Kemblinya PSBB transisi ini akan membuat masyarakat berpikir bahwa segala kegiatan bisa kembali seperti seolah tidak ada pengendalian.

Menurut dia, kehadiran pemerintah harus kentara selama PSBB transisi. Dalam hal ini adalah aturan mengenai protokol kesehatan, pengawasan, penindakan yang tegas, dan sosialisasi terus-menerus kepada masyarakat. Pada PSBB transisi Agustus, elemen-elemen ini sempat nyaris menghilang sehingga jumlah kasus positif meningkat.

"Namun, idealnya justru untuk dua pekan ke depan kita melaksanakan PSBB ketat. Apalagi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tengah mengalami peristiwa unjuk rasa besar-besaran yang berarti tidak ada jaga jarak dan risiko penularan virus korona menjadi tinggi," kata Rakhmat.

Penurunan angka kematian juga dinilai tidak tepat jika dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan. "Percuma,jika angka kematian menurun, tapi angka orang terinfeksi Covid-19 tetap meningkat," kata Rakhmat.

Pelonggaran PSBB Jakarta juga dikhawatirkan mengacaukan situasi di wilayah Bodetabek. Langkah-langkah di wilayah tetangga Ibu Kota itu masih berkembang dan dalam tahap penyelarasan dengan Jakarta. Akan tetapi, dengan Jakarta tiba-tiba memutuskan melakukan PSBB transisi, upaya yang masih prematur ini rontok. Sinergi pengendalian Covid-19 berbasis wilayah Jabodetabek akan mundur.

Antropolog Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Fadjar Thufail, mengemukakan, penerapan kebijakan berbasis peta watak dan perilaku masyarakat adalah keniscayaan. Kegiatan ekonomi merupakan turunan dari budaya serta perilaku sosial sehingga segala aspek dalam PSBB harus dilihat secara komprehensif.

"Sudah jelas ada kejenuhan di masyarakat dan ada ketegangan sosial karena kegiatan ekonomi berkurang drastis. Isu penolakan RUU Cipta Kerja akhirnya memicu masyarakat keluar rumah tanpa peduli rambu kesehatan," katanya.

Pemastian kedisiplinan tidak hanya pada tempat-tempat formal, seperti kantor, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum, tetapi juga pada lingkungan informal. Ia mengingatkan bahwa mental masyarakat Indonesia pada dasarnya akan mengikuti aturan apabila penegakan hukumnya jelas.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti menjelaskan, untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19, Dinkes DKI memastikan kini total ada 90-an rumah sakit rujukan. Selain itu, DKI juga berkomitmen menambah tempat isolasi mandiri dan tenaga kesehatan hingga 1.000-an orang lagi.

Meski demikian, Widyastuti menegaskan, penerapan disiplin individu dalam menerapkan protokol kesehatan berperan vital dalam PSBB transisi ini. Untuk itu, penegakan aturan dan pengendalian di lapangan tetap dilakukan.

(DNE/IGA/HLN/VAN/DIV)

KP

KLASIFIKASI IKLAN

Seluruh tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh tim iklan Kompas. Informasi pada iklan merupakan tanggung jawab pemasang iklan.

GAYA HIDUP

Bangun Minat Konsumen Lewat "Copywriting" Yang Menggugah Emosi

Dunia *copywriting* mengalami perkembangan pesat, terutama sejak maraknya media dan platform digital. Sekitar tahun 2000, *copywriting* didefinisikan sebatas tulisan yang diasosiasikan dengan iklan. Kini, *copywriting* merambah berbagai bentuk.



Simak penjelasannya di http://bit.ly/kla1310

IKLAN BARIS & KOLOM

RAGAM	13
PROPERTI	13
OTOMOTIF	13
KARIER	13

PINDAI QR CODE INI UNTUK CARA MUDAH PASANG IKLAN

HOTLINE
(021) 2567 6000

PASANG IKLAN
bit.ly/pasangikl

Lakukan 5 Hal Ini agar Mobil Terhindar dari "Overheat"

Panas berlebih (*overheat*) pada mesin dapat membuat mobil mogok. Tak hanya itu, suhu yang amat tinggi juga dapat memicu rusaknya sejumlah komponen penting. Oleh sebab itu, lakukan 5 langkah berikut ini agar mobil kesayangan Anda terhindar dari *overheat*.



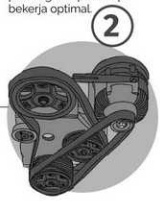
Pindai QR Code
Simak artikel menarik lainnya di Klasika.kompas.id



1

Cek sarang radiator

Rutinlah mengecek kondisi sarang radiator. Bila terdapat kotoran atau batu kecil pada komponen ini, jangan ragu untuk membersihkan kotoran tersebut dengan udara bertekanan. Pastikan pula jarak sarang radiator dengan kipas tidak terlalu dekat agar tidak saling berbenturan.



2

Periksa *fanbelt*

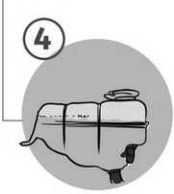
Bila terdengar suara decit dari balik kap mesin, jangan ragu untuk memeriksa kondisi *fanbelt* yang berhubungan dengan sistem pendingin. Komponen berbahan karet ini mengeluarkan suara decit jika sudah getas atau retak. Segera ganti dengan yang baru agar komponen sistem pendingin mesin seperti *water pump* dan kipas pendingin dapat tetap bekerja optimal.



3

Periksa saluran

Lakukan pemeriksaan secara rutin terhadap semua saluran pendingin. Pastikan saluran terpasang dengan baik. Bila terdapat kebocoran pada selang atau pipa saluran pendingin, jangan ragu untuk menggantinya dengan yang baru. Hindari melakukan penambalan pada saluran, kecuali dalam kondisi darurat.



4

Cek air radiator

Biasakan untuk selalu mengecek kondisi air radiator. Pastikan air radiator yang terdapat pada tabung reservoir berada pada batas yang ditentukan. Segera tambahkan air radiator bila cairan ini berada di bawah garis yang ditentukan. Jika air ini berkurang secara drastis, segera bawa mobil ke bengkel tepercaya untuk mendapat penanganan lebih lanjut.



5

Gunakan *radiator coolant*

Agar pendinginan mesin berjalan optimal, gunakan *radiator coolant* berkualitas. Dengan menggunakan cairan berkualitas, selain mesin tetap berada pada suhu ideal, radiator dapat awet dan terhindar dari korosi.

@KompasKlasika @KompasKlasika Kompas Klasika

teks : B Adi Yuwono | infografis : Wahyu Hidayat

Klik!

KLINIK FOTOGRAFI



Mombuat Foto Produk secara Sederhana

Salah satu genre fotografi yang memiliki banyak peminat ialah "still life", yaitu memotret obyek benda mati yang dibuat "hidup" untuk tujuan tertentu sesuai konsep yang diinginkan. Foto produk merupakan salah satu contohnya. Di era pemasaran daring seperti saat ini, kebutuhan foto produk yang bagus menjadi keniscayaan. Setiap hari foto-foto yang menawarkan produk memenuhi linimasa. Kita pun bisa membuat foto produk secara sederhana dengan hasil luar biasa.

Hendra A Setyawan

Foto produk yang bagus tentu memiliki banyak keuntungan. Keuntungan itu meliputi membentuk persepsi harga, memengaruhi psikologi konsumen, mewakili *brand* produk, memberikan informasi produk, menarik pelanggan baru, serta membangun loyalitas dan kepercayaan konsumen.

Menurut fotografer yang berkecimpung di dunia foto produk, Zainal Andi Saputra, membuat foto produk yang bagus tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan, hal itu dapat dilakukan dengan peralatan sederhana yang ada di rumah. Foto yang bagus bisa meningkatkan nilai jual produk itu.

Saat mengisi materi dalam webinar *Kompas* Talks Photography Weeks #1, Zainal Andi mengungkapkan, untuk membuat foto produk yang bagus, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain pencahayaan, komposisi, properti, penataan (*stylish*), konsep, dan *editing*. Namun, sebelum memulainya, perlu dipersiapkan alat-alat yang hendak digunakan, seperti kamera, gawai, lensa, tripod, dan pencahayaan.





FOTO-FOTO: ARSIP ZAINAL ANDY SAPUTRA

Dalam pencahayaan, hal ini dibagi dua, pencahayaan natural (*available light*) dan pencahayaan buatan (*artificial light*). Jika ingin memanfaatkan pencahayaan natural, cahaya matahari bisa dimanfaatkan saat sinarnya belum terlalu keras.

Waktu terbaik untuk memanfaatkan pencahayaan natural mulai pukul 07.00 hingga 09.00. Pemotretan bisa dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Selain itu, bisa dimanfaatkan pula motif seperti bayangan jendela yang bergaris atau bayangan pepohonan.

Untuk penggunaan cahaya buatan, bisa digunakan metode *four point lighting* yang meliputi lampu utama (*key light*), lampu untuk mengurangi kontras (*fill light*), lampu untuk memisahkan obyek dari latar belakangnya (*back light*), dan lampu untuk menerangi latar belakang (*background light*).

Sumber penerangan yang digunakan tidak harus lampu studio, tetapi bisa lampu belajar, senter, cahaya dari gawai, dan sebagainya. Yang penting konsep pencahayaan buatan dipahami secara baik.

Sudut pengambilan atau "angle"

Sudut pengambilan foto produk bisa dilakukan secara horizontal (*eye level*), *low angle* (10-20 derajat), *mid angle* (45 derajat), ataupun *overhead* (90 derajat). Setiap sudut pengambilan memiliki hasil yang berbeda-beda, demikian pula informasi yang dihasilkan dari ragam sudut pengambilan itu.

Ukuran sudut sesuaikan dengan konsemotret, semua *angle* diambil untuk memperkaya hasil foto.

Ada beberapa komposisi yang bisa diterapkan dalam pemotretan produk, antara lain aturan sepertiga (*rule of third*), yakni membagi bidang gambar dalam tiga bagian sama besar dan proporsional, baik secara horizontal maupun vertikal.

Jenis komposisi kedua ialah *golden ratio*. Sebuah obyek dalam suatu *frame* foto dibagi menjadi beberapa kotak, kemudian dari satu kotak ditarik satu garis melengkung menuju ke satu sudut lain secara diagonal. Lalu, ada komposisi *golden linear* atau diagonal. Komposisi kurva menarik karena membentuk gari-garis lengkung sehingga foto lebih dinamis.

Selanjutnya ialah komposisi segitiga yang membentuk susunan-susunan segitiga dalam bidang yang difoto. Teknik pembingkaian (*framing*) lazim pula digunakan dalam pemotretan produk. Biasanya ruang kosong (*negative space*) dalam teknik *framing* dipakai untuk memberikan tulisan atau logo.

Kemudian, ada teknik repetisi atau pengulangan. Obyek disusun secara teratur sehingga membentuk pola. Komposisi lain yang dapat diterapkan ialah permainan warna dan refleksi.

Properti

Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan properti ialah alas foto dan latar belakang (*background*), peralatan penunjang, bahan-bahan untuk membuat produk tersebut, pemilihan tempat, pemilihan warna, serta materi dasar properti.

Searah jarum jam: Sepatu By Craft, Pecel, Siomay

Dalam memotret produk, diperlukan pula penataan. Langkah ini meliputi penentuan alas foto dan *background* serta penempatan dan komposisi obyek. Selain itu, perlu diatur pula penempatan warna-warna semua elemen foto, pemilihan dan penataan elemen pendukung (*ingredient*), serta pengaturan momen ataupun cerita terhadap foto itu.

Konsep

Konsep menjadi fondasi utama pemotretan produk. Sebaiknya konsep telah matang sebelum eksekusi.

Dalam pemilihan konsep, perlu ditekankan apakah era modern, tempo dulu, retro, kafe, elegan, penuh warna, dan sebagainya. Selain itu, bisa juga dipilih lam), ada aktivitas manusia atau tidak, dan berdasarkan tempat (*indoor* atau *outdoor*). Ada dua aliran besar dalam konsep fotografi produk, *dark mood* (foto dominan gelap) dan *bright mood* (foto dominan terang).

Dalam proses selanjutnya, *editing* merupakan hal yang dilakukan pada prinsipnya ialah mempercantik visual yang telah ada. Langkah ini meliputi mengoreksi *white balance*, *brightness*, *shadow*, *contrast*, koreksi warna dan saturasi, serta *cropping*.

Fotografer Zainal Andi Saputra memberikan tips dalam pemotretan produk, antara lain tak harus memasukkan semua properti ke dalam *frame*. Alasannya, hal itu dapat mengaburkan inti produk yang hendak ditonjolkan.

Fotografer disarankan pula melihat sesuatu dari sudut pandang kamera dan lensa, bukan mata. Selain itu, fotografer harus selalu berpikir "liar" (*out of the box*) agar ide segar muncul. Yang terakhir, terapkan ATM, yakni amati, tiru, dan modifikasi foto-foto produk yang tren.

ARTHA GRAHA PEDULI

OTOMOTIF

MOBIL DICARI

A-A abad21 Akan Beli Mobil thn 1997-2019 Hub : Mas Tio : 0812. 890.7676 / 0877.8186.1225.TGR

MOBIL DIJUAL

LAIN-LAIN

RR Evoque 12/13 4pnt merah met km3rb STNK pjk Permc V20 Tp Meridian 087878555259

BMW

BMW 740Li.th 11.vivid royal blue km 27rb full option,antik .sgt baru 087878555259-08119702141

HONDA

Acc, Brio Civic, CRV, Mobilio Jazz,HRV ClearanceSale Brio 0% Mugen 7973000, 08111966969

All Promo Spesial akhir tahun semua type Honda R.stock Dp ringan,Kredit s/d thn Honda Permata Serpong 021-29000123

All Promo Spesial akhir tahun semua type Honda R.stock Dp ringan,Kredit s/d thn Honda Permata Hijau 021-5332566

HYUNDAI

SantaFe Sport '2015+Grand i10 '14 & 17+H-1 XG CRDi 17+H-1 Elg Bensin 17, AutoSF Cibubur 087771228136 / 021-29484511

PROPERTI

APARTEMEN

DIJUAL

Jual Murah Apart Urban Heigh BSD Cluster studio. Igsg nama ke pembeli 350jt 089733145500

Residnce8,Senopati,Ls 180m,3Br Gandaria City,Ls 194m,3br,strgs RwBarito7399607-08128615645 5

DISEWAKAN

Bellagio Residence Lt.30, 201m2, 3BR, Fully Furnished. Pool View. Hub Pemilik 08119334559

RUMAH DIJUAL

BODETABEK

BSD-mau punya rmh bagus,bisa usaha? strategis,475/500 harga Mrh. 0896.2852.4668 KreasiPro

JAKARTA PUSAT

Cmpk Pth,Rmh Shm,128/200,bbs bnjr, grs 2mbl, bersewa 9th,300jt /th. 3.7M/Nego. T: 08111010032

Menteng Jl. Cemara Jarang Ada. LT:360 / LB:200.[1][2] ERAMiza [3][4] [5]08119590420, 08599906503[6]

Menteng, Jambu 986m, Diponegoro - Teuku Umar 1000 - 3000m hub 08128322627

Radio Dalam,Kby Baru, 575/600 2 Lt, SHM,siap pakai,jual cepat ! RwBarito7399607-08571801855 88

RUMAH DIKONTRAKKAN

Jln Lembang menteng, 490/525, 4br. 2 levels, Semi Furnished/ Furnished. Hub: 08778911 2315

JAWA TENGAH & DIY

Hunian Eklusif di Yogya Barat dkt UMY,Kav siap bangun type 75. Hub:087739223648

Jl Tnh 235m2 SHM.200m Utara UGM,Trbaik u/Rmh Kos, Pasive income 50jt/bln: 087839410497

Jual Kav Tnh SHMP Sdh Pecah, di Sentolo K.Progo, L790m. Dkt Bandara NYIA:087738886399[7]

KARIER

LOWONGAN

LAIN-LAIN

Bth.SPV laki[1]umur max.35th D3 kimia industri bs bkrj di bwh tekanan,bs comp. wawasan luas mampu memimpin tim & peng, mngatur orang diutamakan domisili. Serpong selatan-Bogor : danielalridan74@gmail.com

TEKNIK PRODUKSI

Konsultan MK Membutuhkan: S2 Sipil Management Konstruksi, S1 Arsitektur/Sipil. S1 MSE, Drafter Sipil& MEP Syarat: Max. 40 thn Lok. Depok CV by WA: 0813 8491 0799

RAGAM

MESIN & ALAT BERAT

Dijual Motor Greder Merk Komatsu, Type GD 605 R. Hub : 081317149855.

jual murah genset silent 60kva 100jt,open60kva 85jt mitsubishi siap pakai,bs kredit 08161923880

PEMBORONG/BIRO TEKNIK

Ahli Bocor. gdg. ktr. rmh. tembk k.mndi.dak.dll.100%Garansi.tgg jwb.Raja bocor: 082112239999

KEHILANGAN

BPKB mobil Merc Benz S 400 No: N00509651 nopol B 19 RV thn 2016 an PT. Duta Palma Nusantara

PERHIASAN

Beli Arloji & Berlian dg hrg tgg rolex dll.King Arloji,08171154 16 jl.kyai maja 7C dpn psr mayestik

Beli Berlian,Rolex dll dgn harga tertinggi. Trima jual sementara toko Goodwill.0819 32 9191 99

LELANG

Kedutaan Besar India, Jakarta telah menerbitkan Pengumuman Tender untuk Survei Pasar (i) Pasar Gandum Indonesia dan (ii) Ekosistem Startup di Indonesia yang akan dibuka pada 28.10.2020. Tender akan diadakan di situs Kedutaan Besar India www. indianembassyjakarta.gov.in

SERVICE REPARASI

AC..AC.Cool,Freezer,K.Gas,Kulkas M.Cuci,Sihrt,P.Air "Tehnik Cool" 085100481084 - 085101457718

Hlg BPKB H-8803-RQ an. Handy Sutantio. Jl Srinindito VII Rt3/1 Smg Brt

Hlg BPKB K-8984-F an. Warsono. Ringinkidul Rt3/1 Gubug Grobogan

DAERAH-DAERAH

BOGOR

Jual tnh lok tmn sfari 1000-2Ha cck u villa pertn view bgs air sbr jl asgal, srt SHM hrg 150rb hub 081398878182/082111371698

JAWA TENGAH & DIY

KEHILANGAN

Bpkb ibm Toyota H8432WF An. Miftachur R. Purwosari 2 03/03 Tambaknjo GayamsariSemarang

Stnk spm Honda K3694CJ An. Agus Hadi Susilo Kandangan 02/ 02 Kandangan Pwd Grob

JAWA BARAT

Hilang BPKB No.14236212 Nopol: D-3904-UCT an. M.Mahdi Idris Tidak Berlaku Lagi

Hilang BPKB:2218496-H, No.Pol: D.3964.BH a/n: Lukman Mulyana Ttd: Amar Amzari

Hlng bpkb motor nopol: E6504BT, an: Lingga Anggriawan Hayat. Jl. Tuparev, Kec.Sukapura, Cirebon.

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah menganuniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
(Yohanes 3:16)

Rest In Peace

Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga dalam damai, pada **hari Minggu, 11 Oktober 2020 pukul 23.45 WIB,** Suami, Papa dan GrandPa kami yang terkasih:



KUNTO HARSONO

(LIE KOK TOEN)

Dalam usia 88 tahun

Jenazah disemayamkan di **Rumah Duka Oasis Lestari, Jl. Gatot Subroto KM 7-8, Jatake, Tangerang, Ruang Cempaka.**

Misa Tutup Peti: **Selasa, 13 Oktober 2020, pukul 17.00 WIB** (bagi yang berkenan bergabung secara zoom, silahkan menghubungi)

Misa Pemberangkatan Jenazah: **Rabu, 14 Oktober 2020, pukul 10.30 WIB**

Kami yang mengasihi:

Istri:
Andayani Harsono (Kho Gin Tjioe)

Anak:	Menantu:	Cucu:
Tina Harsono	Sutanto Hartono	Christie & Evan Hartono
Lita Harsono		Michael Margono
Siska Parker	Jason Parker	Axel Parker

Kami berterima kasih atas persahabatan, bantuan dan doa yang telah Bapak dan Ibu berikan semasa hidup Almarhum Bapak Kunto Harsono. Mengingat pentingnya kita untuk bersama mendukung pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kami dari pihak keluarga sepenuhnya memahami kendala untuk berkunjung ke rumah duka. Kami mengapresiasi semua doa dan dukungan moral yang diberikan kepada keluarga kami. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu sekalian.

Turut Berduka Cita

Menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya :



Bpk. Robby Sumampow

Dalam usia 76 tahun

Meninggal pada hari Minggu, tgl. 11 Oktober 2020 di Singapura

Semoga arwah beliau diterima ditempat terbaik disisi-Nya
Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman

SUKARDI TANDIJONO TANG
IGIANTO JOE
HENDRY SALIM
JASMIN JANTO

Gelar Supremasi "Raja dan Pangeran" LA Lakers

LA Lakers menyambut masa depan cerah setelah mengakhiri satu dekade puasa trofi juara NBA bersama LeBron James dan Anthony Davis. Mereka akan terus menjaga kejayaan "dinasti" Lakers.

Satu dekade terakhir, jalan-jalan di sekitar pusat kota Los Angeles, Amerika Serikat, selalu senyap seusai final NBA. Namun, masa-masa itu telah berlalu. Kemarin, ribuan warga LA, pendukung Lakers, berhamburan di jalan untuk merayakan gelar juara tim kebanggaan mereka tersebut.

Pesta yang sudah sangat lama tidak terjadi itu berlangsung sangat meriah di sekitar Staples Center, markas kebanggaan Lakers. Saking ramai dan tidak terkontrol, kepolisian California sampai menutup akses ke pusat kota LA.

Euforia ini kembali hadir setelah Lakers memastikan gelar juara ke-17 NBA pada Senin (12/10/2020) WIB di "gelembung" Orlando. LeBron James dan rekan-rekannya juara musim ini seusai menaklukkan Miami Heat, 4-2, di final.

Kemeriahan yang terjadi ini merupakan pelampiasan dahaga prestasi para pendukung klub basket ternama itu. Terakhir kali Lakers Nation, julukan *fans* klub NBA itu, berpesta seperti ini adalah pada 2010, yaitu saat masih dipimpin almarhum Kobe Bryant.

Pesta meriah juga berlangsung di ruang ganti Lakers di Orlando. Para pemain skuad berjersei kuning dan ungu itu saling menyiram sampanye. Bintang Lakers, LeBron James, tampak sangat santai. Dia tertidur di lantai sambil mengisap cerutu, lalu menelepon ibunya, Gloria.

Ada momen istimewa yang tertangkap kamera saat pesta ini. James dan Anthony Davis berfoto bersama sambil memegang trofi. James dengan trofi Most Valuable Player (MVP) Final miliknya, sedangkan Davis dengan trofi juara. Foto ini identik dengan potret duo legendaris Lakers era 2000-an, Bryant dan Shaquille O'Neal.

Foto tersebut amat bermakna. James dan Davis sudah siap meneruskan duo legendaris Lakers tersebut. Mereka adalah simbol kejayaan "dinasti" baru Lakers. Kedua pemain bertubuh atletis ini sangat dominan, membuat Lakers nyaris tak tersentuh dalam perjalanannya menuju takhta juara.

Sebuah statistik bisa menggambarkan dominasi mereka. James dan Davis merupakan dua pemain dengan poin terbanyak sepanjang *playoff*. Terakhir kali duet yang bisa melakukan performa itu adalah Bryant dan O'Neal pada 2002.

Tim Legler, pengamat dan mantan pemain NBA, berkata, kombinasi James dan Davis sangatlah komplet. Keduanya saling melengkapi. James butuh bakat dan energi Davis, sedangkan Davis butuh kepemimpinan dari sosok James.

"Tidak ada satu pun yang bisa melengkapi James lebih baik dari Davis, begitu juga sebaliknya. Mereka kombinasi sempurna, mulai dari kekuatan fisik, kemampuan, hingga sikap," ucap Legler.



AP PHOTO/JOHN RAOUX

Para pemain Los Angeles Lakers merayakan gelar juara NBA musim 2019-2020 seusai mengalahkan Miami Heat, 106-93, dalam gim keenam final NBA di Orlando, Amerika Serikat, Senin (12/10/2020) WIB. Itu adalah gelar juara pertama Lakers dalam satu dekade terakhir.

James paham dia butuh Davis, seperti halnya Michael Jordan dengan Scottie Pippen di Chicago Bulls. Maka itu, saat datang ke Lakers pada 2018, "Sang Raja", julukan James, langsung meminta petinggi tim, Jeanie Buss dan Rob Pelinka, memboyong Davis dari New Orleans Pelicans. Permintaan itu baru bisa dikabulkan pada awal musim ini.

Menepis keraguan

Hasilnya, duo fenomenal ini langsung padu di bawah asuhan Pelatih Frank Vogel. Mereka menepis keraguan dari pendukung. Sebelumnya, James dianggap terlalu tua, 35 tahun, untuk bisa memimpin tim menuju gelar juara. Adapun Davis dinilai tidak bermental juara karena belum pernah melaju jauh di *playoff* bersama Pelicans.

Nyatanya, mereka seolah diciptakan untuk bersama. Tiada ego pribadi. Hal itu berbeda dengan duo hebat di tim-tim lain yang gagal total, misalnya Kawhi Leonard dan Paul George di LA Clippers.

Menurut James, sangat mudah bermain dengan Davis. "Kami tidak punya ego dan berupaya saling percaya. Kami ingin yang terbaik untuk tim, baik di dalam maupun luar lapangan. Dia (Davis) mirip saya waktu muda saat datang ke Heat," ucap James yang sudah meraih empat cincin juara.

James datang ke Heat pada usia 26 tahun sebagai pebasket tanpa gelar juara. Di sana, dia dibantu seniornya, Dwyane Wade dan Chris Bosh. Hasilnya, dia meraih dua gelar juara bersama Heat. James ingin melakukan hal sama untuk Davis yang datang sebagai pemain nirgelar di usia 26 tahun.

Ketiadaan ego di antara mereka terlihat saat penyerahan MVP Final kepada James. Bukannya cemburu, Davis justru menghampiri seniornya itu. Mereka kemudian melakukan tos dan saling memeluk.

Bagi Davis, James adalah seorang mentor yang sangat berharga. James selalu membangunkan dirinya saat kehilangan kepercayaan diri. "Kami saling hormat dan sangat dekat di dalam dan luar lapangan. Tidak ada rasa cemburu. Kami hanya selalu ingin menang," katanya.

Dalam wawancara seusai juara, James menginginkan Davis menjadi pemain yang lebih besar darinya. Hal ini bisa menjadi sebuah pertanda akan masa depan cerah bagi dinasti Lakers di masa depan.

Puncak performa Sang Raja", yang dua bulan lagi genap 36 tahun, mungkin hanya tersisa dua atau tiga musim ke depan. Namun, Lakers tidak perlu terlalu cemas. James telah memilih Davis sebagai "pangeran" yang akan meneruskan warisannya.

Musim "asterisk"

Banyak fan NBA yang menilai musim ini tidak sah karena cacat atau "asterisk", sebutannya. Hal itu mengingat musim ini sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Penyelenggaraan musim reguler pun dibuat lebih singkat daripada biasanya. Laga kandang-tandang dan penonton juga tidak ada selama di "gelembung".

Namun, dengan segala permasalahan itu, justru bisa dikatakan Lakers adalah juara sejati. Mereka sukses melewati musim sangat panjang, mencapai 355 hari. Mereka bisa menaklukkan badai masalah yang terjadi sejak awal tahun di dalam dan luar lapangan.

James dan rekan-rekannya diganggu pandemi Covid-19. Pandemi membuat mereka terhenti berkompetisi hingga empat bulan. Setelah liga dilanjutkan di dalam "gelembung", mentalitas pun diuji karena pemain sempat tidak bisa bertemu keluarganya. Pertandingan juga kurang bergairah tanpa kehadiran penonton.

Puncaknya, muncul pula protes kesetaraan rasial yang dilakukan seluruh pemain akibat penembakan warga kulit hitam di AS. Pemain sempat memboikot pertandingan hingga akhirnya liga dilanjutkan seusai kesepakatan dengan petinggi klub dan liga.

Menurut Pippen, semua masalah ini membuat tim juara pantas mendapatkan apresiasi setinggi mungkin. Ibarat kapal, mereka bisa menaklukkan samudra terkejam yang penuh dengan badai besar. "Jika bisa memilih MVP Final, saya pilih semua pemain tim (yang juara) mengingat perjuangan mereka dalam gelembung," ucapnya.

Kekuatan besar Lakers itu mungkin berasal dari mendiang Bryant. Sebelum liga dilanjutkan, skuad Lakers sudah berkomitmen memper-sembahkan gelar juara musim ini untuk sang legenda yang meninggal bersama putrinya, Gianna, akibat tragedi kecelakaan helikopter pada awal tahun ini.

Memori tentang Bryant selalu dibawa skuad Lakers di "gelembung". Itu mulai dari yel-yel tim, "1-2-3 Mamba!" sampai penggunaan jersei khusus "Mamba Hitam" yang didesain Bryant.

"Kobe dan Gianna menuntun tim ini sepanjang tahun," kata Pelinka, Manajer Umum Lakers. (AP/KELVIN HIANUSA)

TENIS

Persaingan "Fedal" Masih Akan Berlanjut

Segera setelah Rafael Nadal menyamai prestasi Roger Federer dengan meraih 20 gelar juara Grand Slam, satu pertanyaan muncul. "Bagaimana kelanjutan persaingan dua rival terbaik di arena tenis itu?"

Nadal menambah koleksi trofi Grand Slam dengan menjuarai Perancis Terbuka, 27 September-11 Oktober. Pada laga final di Lapangan Philippe Chatrier, Roland Garros, Minggu (11/10/2020), petenis Spanyol itu mengalahkan Novak Djokovic 6-0, 6-2, 7-5.

Gelar ke-13 Perancis Terbuka yang diraih tanpa kehilangan satu set pun dalam tujuh babak itu kian menegaskan statusnya sebagai "Raja Lapangan Tanah Liat". Namanya sejajar dengan Federer, yang lebih dulu mendapat gelar ke-20 ketika menjuarai Australia Terbuka 2018. Menyusul di belakang mereka Djokovic dengan 17 gelar Grand Slam.

"Saya selalu sangat menghormati teman saya, Rafa, sebagai pribadi dan sebagai seorang juara. Sebagai rival terbesar saya bertahun-tahun, saya yakin kami telah saling memotivasi untuk menjadi pemain yang lebih baik. Oleh karena itu, merupakan kehormatan bagi saya untuk memberi selamat atas kemenangan Grand Slam ke-20."

Ucapan tersebut diunggah Federer dalam akun media sosialnya begitu Nadal juara. Dia mengunggahnya dengan foto dirinya bersama Nadal di Cape Town, Afrika Selatan, Februari. Saat itu mereka tampil dalam pertandingan amal yang diselenggarakan Yayasan Roger Federer.

Federer tak berada di Paris pekan lalu, juga di New York, Amerika Serikat, ketika Grand Slam AS Terbuka digelar pada 31 Agustus-13 September. Dia telah mengakhiri musim 2020 sejak Juni karena menjalani operasi lutut kanan.

Meski rekor sebagai tunggal putra dengan gelar Grand Slam terbanyak disamai rivalnya, Federer memberinya pujian. Dia bahkan berharap perjalanan mereka berlanjut. "Saya berharap 20 hanyalah menjadi angka yang menandai langkah berikutnya dalam perjalanan kami," katanya.

Persaingan kedua petenis, yang kemudian mendapat julukan "Fedal" dari penggemar mereka, dimulai pada 2004. Lima belas tahun kemudian, mereka telah bersaing 40 kali. Nadal unggul 24-16, tetapi tujuh kali kalah dalam delapan pertemuan terakhir.

Maestro tenis asal Swiss itu telah berusia 39 tahun dan memasuki tahun ke-22 di arena tenis profesional. Namun, belum sekali pun dia berbicara tentang rencana pensiun. Federer bahkan telah menatap musim 2021 dan menargetkan bisa tampil pada Australia Terbuka meski belum bisa menjalani program latihan dengan raket secara penuh.

"Saat ini, fokus saya adalah meningkatkan stamina dan kekuatan. Saya tak memberi diri sendiri beban besar dan akan kembali ke turnamen ketika saya 100 persen. Semoga saya bisa kembali ke Melbourne, Januari," ujarnya.

Rasa hormat

Nadal pun menikmati semua bentuk hubungan dengan Federer. Ketika diminta menjelaskan ikatannya dengan Federer, dalam wawancara dengan CBS, Nadal mengatakan, "Saya pikir, kami memiliki berbagai bentuk hubungan. Kami memiliki persaingan intens sepanjang karier, persaingan yang diiringi rasa hormat. Kami juga telah mencapai satu tahap lain dalam hidup, yaitu menilai persaingan ini tak sebatas persoalan menang."

Atas dasar itulah, Nadal tak ingin terobsesi meraih Grand Slam terbanyak ketika suatu saat mengakhiri karier yang dijalani sejak 2001. "Tentu saja, saya ingin menambah gelar lagi, tetapi saya tak ingin selalu berpikir, Novak telah meraih ini atau Roger telah menjuarai itu. Anda tak bisa selalu merasa sengsara ketika tetangga Anda memiliki rumah atau perahu lebih besar atau ponsel yang lebih bagus," katanya.

Nadal tak memungkiri, rekor yang telah dibuatnya untuk menyamai Federer sangat berharga. Rekor gelar Grand Slam menjadi referensi yang sangat berarti karena melibatkan tiga petenis yang masih aktif pada tunggal putra.

Hal ini berbeda dengan Serena Williams yang hanya melawan dirinya sendiri untuk menyamai rekor Margaret Court dengan 24 gelar. Di bawah Serena (23 gelar), ada kakaknya, Venus, dengan jumlah terpaut jauh, tujuh gelar.

Berbeda dengan Djokovic, yang beberapa kali mengungkapkan target menjadi juara Grand Slam terbanyak, Nadal dan Federer terfokus pada apa yang ada di depan mata. Keduanya hanya memastikan bahwa perjalanan akan berlanjut, begitu pula hubungan mereka: sebagai rival yang saling menghormati dan sahabat. (YULIA SAPTHIANI)

VARIA OLAHRAGA

Cavendish Berpikir untuk "Gantung Sepeda"

Pebalap sepeda Inggris, Mark Cavendish, berpikir "menggantung sepeda" setelah hasil mengecewakan di balapan Gent-Wevelgem di Belgia, Minggu (11/10/2020). Pebalap tim Bahrain-McLaren itu finis urutan ke-74 dalam balapan Gent-Wevelgem yang berjarak 232,5 kilometer. "Mungkin itu adalah balapan terakhir dalam karier saya," ujar Cavendish emosional kepada *Sporza* seusai balapan. Cavendish, yang memenangi 30 etape Tour de France, akan habis kontraknya dengan Bahrain-McLaren akhir tahun ini. Namun, ada pembicaraan untuk memperpanjang kontrak tersebut setahun ke depan. Cavendish pun tidak masuk sebagai pebalap Bahrain-McLaren di Tour de France 2020. Niat Cavendish untuk pensiun mengejutkan karena pebalap berusia 35 tahun itu sebelumnya akan mengikuti balapan Scheldeprijs di Belgia, Rabu (14/10). (REUTERS/WAD)

Kejuaraan Senam untuk Pemanasan Olimpiade

Kejuaraan senam internasional akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang, 8 November 2020, sebagai pemanasan bagi tuan rumah sebelum ajang Olimpiade Tokyo 2020 pada 23 Juli-8 Agustus 2021. Sebanyak 32 pesenam dari China, Rusia, Amerika Serikat, dan Jepang akan tampil pada ajang internasional pertama yang diselenggarakan Jepang di masa pandemi Covid-19. Morinari Watanabe, Presiden Federasi Senam Internasional (FIG), Senin (12/10/2020), mengatakan, turnamen ini bisa menjadi acuan lomba di masa pandemi. "Jika upaya ini bisa mendukung Olimpiade, saya sangat senang," ujarnya. Para pesenam menjalani tes Covid-19 sebelum berangkat ke Jepang dan akan dites setiap hari selama berada di Jepang. Ajang ini akan disaksikan sekitar 2.000 penonton, kurang dari seperlima kapasitas tribune Yoyogi First Gymnasium yang menjadi arena kejuaraan. (AFP/WAS)

Sei-young Juara PGA Putri



AFP/GETTY IMAGES/PATRICK SMITH

Pegolf asal Korea Selatan, Kim Sei-young, mencium trofi juara PGA KPMG putri, Minggu (11/10/2020), di Aronimink Golf Club, Newtown Square, Pennsylvania, Amerika Serikat.

banyak baca
tabung wawasan



Simak berbagai artikel dan tips praktis yang inspiratif di **klasika.kompas.id** atau scan dakode ini dari ponsel anda

@KompasKlasika

Stigma dan Derita

(Sambungan dari halaman 1)

dan bingung karena diminta pergi dari rumah," katanya.

Bukannya mendukung, pengurus RT kembali meminta Inriaty segera pergi. Hari itu juga dia mengajak anaknya meninggalkan rumah yang ditinggali 20 tahun terakhir. Beruntung, ada saudaranya yang meminjamkan rumah kosong jauh dari keramaian. "Saya sedih karena harus terusir dari rumah. Kami orang pertama di kompleks itu," ucapnya.

Ketidakpastian

Terusir dari tempat tinggal merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dipicu stigma sosial kepada penyintas Covid-19 di Indonesia. Kondisi ini pula yang dialami Budi (23), bukan nama sebenarnya, karyawan salah satu BUMN yang menyewa kamar indekos di Kota Depok, Jawa Barat.

Awalnya, teman indekos Budi, seorang perawat, positif Covid-19 dan dirawat di rumah sakit. Budi dan empat temannya yang punya riwayat kontak dan mengalami gejala berinisiatif menjalani tes mandiri.

Begitu dinyatakan positif Covid-19, Budi menyampaikan hasilnya kepada pemilik indekos. Ia minta bantuan ke puskesmas terdekat hingga kantor kelurahan guna dicarikan tempat isolasi, tetapi tak ada respons. Dia juga menghubungi pusat layanan Covid-19 di Depok dan RS Darurat Wisma Atlet, tetapi hingga malam tak ada tanggapan. "Sakit saya tak parah, tapi saya butuh tempat isolasi. Sulit isolasi di kos karena kamar mandi di luar. Khawatir menulari," ujarnya.

Di tengah kebuntuan, pemilik indekos memberikan ultimatum agar Budi meninggalkan indekos paling telat keesokan hari. "Saya tak tahu harus ke mana. Keluarga saya di Kalimantan. Tak mungkin nebeng ke teman kos lain," tuturnya.

Budi akhirnya menghubungi salah satu sukarelawan Laporcovid19, platform warga berbagi data dan informasi Covid-19. Sukarelawan Laporcovid19, dokter Tri Maharani, membantu Budi mencarikan RS. Maharani menelepon Dinas Kesehatan Depok dan teman dokter UGD salah satu RS. Pukul 01.30, Budi dibawa ke RS.

Hari berikutnya, teman-teman Budi juga dinyatakan positif Covid-19 dari tes usap mandiri. "Saya mencarikan satu tempat di Wisma Atlet. Puskesmas tinggal menyiapkan ambulans, tetapi tak datang," kata Maharani.

Maharani lalu menghubungi Dinas Kesehatan Depok dan meminta agar mereka turun tangan. Akhirnya, pasien dibawa ke Wisma Atlet. "Saya pernah mengalami Covid-19, tahu rasanya sakit dan berpikir tak akan selamat. Kalau ditambah beban mental karena distigma, berat rasanya," kata Maharani.

Stigma terkait Covid-19 membuat derita berkepanjangan secara psikis dan ekonomi. Bahkan, mereka yang sembuh masih menanggung derita ini, seperti dialami Kristin dari Mojokerto, Jawa Timur. "Saya belum boleh kerja karena orangtua murid khawatir kalau saya kembali bekerja meski anak-anak belum masuk. Padahal, saya sembuh dua bulan lalu," kata Kristin, pesuruh di salah satu sekolah swasta.

Stigma memperdalam dampak pandemi. Bahkan, menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Akmal Taher, stigma menghambat upaya memutus penularan. "Banyak orang menghindari tes dan tak terbuka saat tertular. Ini menghambat penanganan dan *tracing* (pelacakan kontak)," katanya.

Covid-19 mematikan dan mengharuskan kita menjaga jarak. Namun, wabah ini seharusnya mendekatkan kita secara sosial. Kebersamaan dan saling menguatkan menjadi benteng terakhir melawan pandemi.

Draf UU Cipta Kerja

(Sambungan dari halaman 1)

812 halaman, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, dirinya belum mengetahui hal itu. "Coba cek di kesekjenan," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi draf UU itu 1.035 halaman, Senin siang. "Halamannya betul, tetapi isinya saya mesti lihat dulu," katanya.

Anggota Baleg DPR dari Golkar, Firman Soebagyo, meminta publik bersabar. "DPR memiliki waktu tujuh hari untuk melihat kembali dari sisi penyusunan. Jangan sampai ada *typo* (salah ketik) atau ada bahasa asing," katanya.

Namun, Firman menegaskan tidak boleh ada perubahan substansi karena telah disepakati dalam rapat paripurna. "Perbaikan tidak mengubah substansi. Tidak boleh mengurangi dan menambah substansi," ujarnya.

Sebaliknya, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengonfirmasi telah ada perubahan bunyi pasal setelah RUU disetujui untuk disahkan. Tim dari Kemenaker, menurut dia, dilibatkan dalam proses merapikan redaksional draf UU dengan DPR setelah RUU itu disetujui untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna.

Soal pasal pesangon, sebagai contoh, perubahan agar tidak merugikan pihak mana pun atau sebagai jalan tengah.

"Mungkin begini, jangan sampai (pemilihan kata) itu terlalu mengunci. Kalau kita membatasi paling banyak, tentu ada yang dirugikan. Kalau kita membatasi paling sedikit, juga ada yang dirugikan. Jadi, ya, sudah kita buat kalimat yang tidak usah menggunakan kata-kata itu," ujar Anwar.

Ketentuan tentang pesangon dalam RUU Cipta Kerja menjadi hal yang diprotes buruh. Palnya, pesangon itu lebih rendah daripada yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Cacat formil

Berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja serta tidak adanya kepastian draf ini dinilai menyalahi ketentuan dan berpotensi cacat formil ketika diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Paripurna adalah institusi tertinggi pengambilan keputusan dalam penyusunan UU. Artinya, ketika RUU sudah diketok, tak ada lagi pembahasan apa pun terhadap RUU itu, apalagi ada perubahan substansi. Kalau itu terjadi, artinya makna paripurna sebagai pengambilan putusan akhir gugur," kata Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Asep Warlan Yusuf.

Perbaikan tanda baca dan tata bahasa, apalagi substansi, semestinya sudah tuntas sebelum rapat paripurna.

Perubahan substansi, lanjut Asep, menimbulkan ketidakpastian hukum dan itu mengabaikan tata cara perundang-undangan yang baik.

Pengajar hukum tata negara Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai, dugaan perubahan yang terus terjadi melanggar asas konstitusionalisme. "Semestinya tidak boleh berubah seusai rapat paripurna. Penambahan dan pengurangan substansi itu tugas DPR dan pemerintah. Kok, ini dilakukan tertutup oleh Baleg dan tim tertentu?" tanyanya.

Dengan berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja, wajar jika publik mempertanyakan draf UU sebenarnya yang disahkan dalam rapat paripurna. "Ini berpotensi cacat formil dan bukan naskah yang disetujui di dalam rapat paripurna, melainkan diedit oleh tim *editing* yang tidak ada kewenangan mengubah dan menambah UU," ujar Charles.

(REK/AGE)



ANTARA/PUSPA PERWITASARI

Pengunjung menyimak sidang putusan perkara korupsi pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui layar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (12/10/2020). Dalam sidang yang dilaksanakan secara virtual itu, dua eks direktur dan seorang bekas Kepala Divisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) divonis hukuman seumur hidup.

Seumur Hidup bagi Eks Direktur

Dua eks direktur dan seorang bekas Kepala Divisi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) divonis hukuman seumur hidup. Kejaksaan Agung juga kembali menetapkan tersangka baru.

JAKARTA, KOMPAS — Bekas direkrur dan pejabat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vonis bagi mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo dijatuhkan sesuai tuntutan. Sementara vonis lebih berat ditujukan bagi mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim serta mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Syahmirwan.

Putusan itu dibacakan ketua majelis hakim Susanti dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap empat terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (12/10/2020).

Namun, hingga pukul 23.00, majelis hakim belum selesai membacakan vonis terhadap terdakwa, yang juga Direktur PT Maxima Integra Tbk, Joko Hartono Tirto.

Sebelumnya, keempat terdakwa yang diadili ialah mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Hary Prasetyo, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Syahmirwan, serta Direktur PT Maxima Integra Tbk Joko Hartono Tirto. Mereka menghadiri sidang secara virtual.

Hary divonis pidana penjara seumur hidup. Hal itu sesuai tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Mengadili dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," ujar Ketua Majelis Hakim Susanti.

Majelis hakim juga menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup bagi Hendrisman. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU berupa hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Demikian pula bagi Syahmirwan, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU yang menuntut 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Adapun sidang untuk dua terdakwa lainnya, yakni Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat, untuk sementara ditunda. Penyebabnya, mereka terpapar Covid-19 sehingga kini dirawat di Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Jakarta.

Tersangka baru

Sementara itu, saat sidang berlangsung, penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

Tersangka baru tersebut adalah Piter Rasiman atau PR yang diduga mendirikan perusahaan terafiliasi dengan salah seorang terdakwa, Joko Hartono Tirto.

"PR mendirikan perusahaan yang digunakan untuk menempatkan uang yang berasal dari PT Asuransi Jiwasraya dengan modus seolah-olah perusahaan tersebut menjalankan kegiatan reksa dana dengan nilai saham yang perlahan-lahan naik. Padahal, perusahaan itu berafiliasi dengan terdakwa Joko Hartono Tirto," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono.

Menurut Hari, delapan perusahaan tersebut diduga digunakan untuk mengatur investasi dari PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya, bukti perbuatan PR diakui tidak cukup. Namun, kini penyidik memiliki bukti permulaan yang memadai, maka PR ditetapkan tersangka. PR masih menjabat Direktur Utama PT Himalaya Energi Perkasa Tbk.

PR, antara lain, dijerat Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PR kini ditahan di Rutan Salemba 20 hari ke depan.

Penyidik Kejagung juga mulai menahan tersangka FH di Rutan Salemba, kemarin. FH sebelumnya ditetapkan tersangka pada Juni lalu sebagai Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA Otoritas Jasa Keuangan Februari 2014-Februari 2017. (NAD)

270 Juta Vaksin Disiapkan

(Sambungan dari halaman 1)

terus didorong untuk 2022," tutur Airlangga.

12 kabupaten/kota

Pada rapat terbatas kemarin, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian pada 12 kabupaten/kota di Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19. "Saya minta dua minggu ke depan ini diprioritaskan untuk 12 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif lebih dari 1.000, yang menyumbang 30 persen dari total kasus aktif nasional," tutur Presiden.

Secara berurutan, ke-12 kota tersebut adalah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Pekanbaru, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Padang, Jayapura, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, dan Ambon.

Sementara itu, terkait penanganan di 8 provinsi prioritas juga tetap ditangani secara khusus. Bahkan, menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, seusai rapat terbatas, provinsi prioritas ditambah dua, yakni Aceh dan Bali.

"Terjadi tren angka penurunan juga, kecuali Bali. Jawa Timur dan Papua sempat naik, tetapi turun lagi pada sepekan terakhir. Angka kesembuhan di provinsi prioritas, ditambah Bali dan Aceh, mengalami peningkatan, kecuali Papua," ujar Doni yang juga Ketua Satgas Penanganan Covid-19.

Ditingkatkan

Presiden Joko Widodo, pada rapat terbatas, pun meminta supaya penularan Covid-19 terus ditekan dengan menyampaikan pentingnya kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Selain itu, pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pasien juga terus diperbaiki.

Diharapkan, pemeriksaan yang tinggi dan memenuhi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seperti di DKI Jakarta, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan, bisa dilakukan di wilayah lain. "Gap antara provinsi yang satu dan yang lain, terutama mengenai *testing*, kita kejar dengan baik," kata Presiden.

Terkait dengan penularan Covid-19, pemerintah mengklaim terdapat penurunan kasus aktif. "Per 11 Oktober, rata-rata kasus aktif di Indonesia 19,97 persen. Saya kira bagus karena ini lebih rendah daripada rata-rata kasus aktif Covid-19 dunia yang mencapai 22,1 persen. Kita lebih baik. Pada 27 September lalu, rata-rata kasus aktif Covid-19 Indonesia masih 22,46 persen," ujar Presiden. (MTK/INA/RAZ)

ARSIP
www.kompasdata.id

Indonesia Menyambut Ganefo II

KOMPAS, 13 OKTOBER 1965

Presiden Soekarno berencana menyediakan Conference Hall Ganefo (Games of the New Emerging Forces) dan Administrative Building Ganefo di Jakarta untuk persiapan Ganefo II yang, menurut rencana, dilakukan di Phnom Penh, Kamboja, tahun 1966. Sebagai pencetus Ganefo, Indonesia ikut membantu persiapannya dengan menyediakan sarana bagi persiapan Ganefo berikutnya.

Mendobrak Kelambanan

(Sambungan dari halaman 1)

Selain dua hal itu, gugatan menjurus pada urgensinya. Jika tujuannya meningkatkan investasi, masalah korupsi lebih krusial dibereskan daripada meluncurkan RUU Cipta Kerja. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara destinasi utama investasi asing selama ini. Kita tidak kekurangan investasi, mengapa perlu upaya ekstra meningkatkannya?

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 dan 3, tujuan RUU Cipta Kerja ialah menciptakan lapangan kerja (pertama-tama) melalui pemberdayaan koperasi serta unit usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentu ada banyak pasal terkait investasi strategis yang nilainya besar dan melibatkan investor (asing) besar pula. Meski begitu, anggapan RUU Cipta Kerja hanya berorientasi mendatangkan investasi (asing) berskala besar tak sepenuhnya valid. Jika dibaca lebih detail, tampaknya RUU ini bermaksud mendorong transformasi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi domestik.

Mungkin perdebatan selanjutnya ialah mengapa perlu perubahan peraturan sebanyak itu sehingga muncul pasal-pasal yang cenderung merugikan sejumlah pihak. Hal ini menjadi dilema lain yang harus dijawab secara nyata.

Relaksasi dan transformasi

Semangat RUU Cipta Kerja adalah relaksasi di berbagai bidang secara komprehensif dan cepat. Keyakinan umum tentang cara paling cepat meningkatkan produktivitas dan daya saing ialah relaksasi atau liberalisasi. Relaksasi diyakini akan menarik lebih banyak investasi sehingga tercipta lebih banyak kesempatan kerja. Pendukung RUU Cipta Kerja meyakini, jika proteksi pada pekerja menurun, proteksi terhadap pekerjaan itu meningkat.

Dari kacamata pekerja, argumen ini ganjil karena mereka harus menanggung efek negatifnya. Bisa dipahami pekerja tak rela kualitas hidupnya menurun meski demi kesempatan kerja lebih luas (bagi orang lain) pada masa depan. Perlu kompromi atas dilema ini. Namun, tampaknya ada banyak dilema lain di berbagai aspek dalam aturan seluas ini.

Bagaimana kita keluar dari aneka dilema ini? Pertama, perlu pemetaan komprehensif dengan mengundang partisipasi sejumlah pihak guna merumuskan aturan turunan yang optimal. Kedua, perlu akselerasi kerja birokrasi agar lebih responsif, baik dalam menampung masukan maupun merancang kebijakan lanjutannya.

Kalaupun RUU Cipta Kerja bisa begitu saja disahkan, tanpa penolakan dan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, tak serta-merta persoalannya selesai. Persoalannya justru baru dimulai karena kuncinya berada di fase implementasi. Berbagai upaya relaksasi hanya relevan jika peta jalan transformasinya dijabarkan serta tahapan implementasinya dijalankan dengan baik. Fase ini sangat mengandalkan kompetensi dan kecepatan birokrasi.

Soal pengurusan izin investasi satu pintu lewat perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*/OSS), misalnya. Meski sudah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, dalam implementasinya masih banyak kendala sehingga hasilnya tak maksimal. Mekanisme yang diharapkan meningkatkan minat berinvestasi di Indonesia ini tak serta-merta membuahkan hasil. Investasi tak sekadar dipengaruhi kemudahan administrasi, tetapi juga faktor fundamental lainnya. Namun, fakta ini perlu menjadi pelajaran agar *omnibus law* tidak bernasib serupa; relaksasi tak diikuti transformasi.

Terlepas banyaknya pasal yang konsensusnya belum tercapai, ada (lebih) banyak pasal lain yang valid segera ditindaklanjuti. Katakan saja relaksasi pendirian koperasi primer yang hanya memerlukan 9 orang dari ketentuan sebelumnya 20 orang. Juga relaksasi perizinan pendirian perseroan terbatas (PT) serta usaha mikro kecil (UMK) yang praktis tak memerlukan izin, cukup pemberitahuan. RUU Cipta Kerja cukup rinci mengatur penguatan UMK, dari penyatuan data, insentif fiskal, hingga kewajiban pendampingan oleh pemerintah dan dunia usaha.

Pasal-pasal peningkatan kapasitas dan pemberdayaan UMK menjadi salah satu bagian pokok dari RUU Cipta Kerja dalam rangka transformasi ekonomi. Maka, kalaupun masih banyak pasal dianggap kontroversial, sepertinya tak perlu membatalkan semua konstruksi hukumnya. Meski upaya hukum masih terbuka lebar, diperlukan konsensus agar transformasi ekonomi lewat peningkatan produktivitas dan daya saing tetap bisa diakselerasi.

Di lain pihak, perlu konsistensi agar RUU Cipta Kerja tak bias kepentingan investor besar. Diperlukan langkah nyata mewujudkan transformasi ekonomi domestik melalui pemberdayaan UKM. Relaksasi harus ditindaklanjuti dengan upaya transformasi yang terarah. Jika tidak, hal itu hanya akan menjadi liberalisasi yang menguntungkan pelaku besar. Jika hal itu terjadi, keberatan utama sejumlah pihak selama ini menemukan kebenarannya.

Birokrasi memegang kunci penting dalam memastikan agar konsensus segera tercapai sehingga transformasi ekonomi sebagai tujuan utama RUU Cipta Kerja bisa terlaksana. Jangan sampai kinerja birokrasi justru menggerogoti legitimasi kerangka perundangan, yang secara normatif sulit dibantah lebih banyak pihak di negeri ini.

KOMPAS

STAF REDAKSI: Sri Hartati Samhadi, A. Maryoto, Danu Kusworo, Gesit Ariyanto, Dewi Indriastuti, Johanes Waskita Utama, Nur Hidayati, Budi Suwarna, Evy Rachmawati, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Khaerudin, Lucky Pransiska, Antony Lee, Simon Saragih, Agnes Aristiarini, Yunas Santhani Azis, Nasrullah Nara, …

GM LITBANG: F. Harianto Santoso, **MANAJER DIKLAT:** Indira Permanasari S

KANTOR REDAKSI: Jl. Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 **TELEPON:** 534 7710/20/30, 530 2200 **FAX:** 548 6085/548 3581 **ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN):** P.O. BOX 4612 JAKARTA 12046 …

DIREKTUR BISNIS: Lukminto Wibowo **GM IKLAN:** Dorothea Devita R.M. **GM MARKETING:** Titus Kitot K.S. **GM EVENT:** Lukminto Wibowo **TARIF IKLAN:** …

HARGA LANGGANAN: RP 98.000/BULAN **REKENING:** BNI 1946 Jakarta Kota No. 14132806 ◆ BRI Jakarta Kota No. 0019.01000168308 ◆ Giro Pos: A 13.444 ◆ BCA Jalan Gajah Mada …

http://www.kompas.id

◆ **YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS:** Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nomor A/C 012.302143.3 ◆ **E-MAIL:** kompas@kompas.id

◆ Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format digital, dikirim ke alamat opini@kompas.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas".

WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.

Sosok

NAMA & PERISTIWA



ARSIP PRIBADI

TISSA BIANI AZZAHRA

Tak Selalu Mistis

Berpengalaman tiga kali main film horor tidak membuat Tissa Biani Azzahra (18) mudah takut, apalagi mengalami hal-hal mistis, terutama saat proses pengambilan gambar berlangsung. Hal itu disampaikan Tissa, Sabtu (2020/10/10), saat bersiap menghadiri acara peluncuran film terbarunya.

Tissa bermain dalam dua dari total sembilan film pendek bergenre horor bertajuk "Malapataka". Kesembilan film pendek, yang disutradarai Rizal Matovani, itu akan tayang di iflix dan WeTV, produk platform *streaming* video ternama China untuk pengguna internasional, Tencent.

"Aku main di dua judul dengan cerita dan karakter yang berbeda, *Unknown Caller* dan *The Box*. Setiap film durasinya 7 sampai 8 menit. Memang, seringnya *shooting* film horor distereotipkan terjadi hal-hal mistis. Namun, selama ini aku enggak pernah, sih. Malah kemarin itu enggak terasa seperti sedang *shooting* film horor. Ha-ha-ha," ujar Tissa.

Sebelum terlibat di "Malapataka", Tissa sudah pengalaman bermain di dua film horor layar lebar, *Makmum* (2019) dan *KKN di Desa Penari*. Film horor keduanya itu hingga kini masih tertunda penayangannya akibat pandemi. Tissa sendiri mengaku sangat suka bermain film bergenre horor.

Terkait sang sutradara, Tissa mengatakan sudah pernah dan terbiasa bekerja sama dengan Rizal Mantovani. Sekitar tahun 2008, Tissa ingat dirinya pernah terlibat dalam pembuatan video klip iklan yang kala itu juga disutradarai Rizal. Dia memuji sosok Rizal yang konsisten bersahaja walau sudah memiliki nama besar. (DWA)

RENDY PANDUGO

Kembali ke Rumah



ARSIP PRIBADI

Sempat pamit untuk beristirahat sejenak pada Agustus 2020, musisi Rendy Pandugo (35) kembali menyapa dengan singel barunya berjudul "Home". Lagu inyanyinya ini sekaligus juga menjadi penanda perpindahannya ke rumah rekaman baru yang menaunginya dalam berkarya untuk selanjutnya.

Dalam jumpa pers yang digelar pada hari Jumat (9/10/2020), Rendy bercerita, lagu yang sudah ditulisnya sejak 2018 itu hadir dari rasa rindunya kepada istri dan anaknya yang kerap ditinggalkannya ketika sibuk pentas hingga ke luar kota.

Sejak dikenal pada 2016 sampai merilis album pada 2017, Rendy lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkeliling memainkan karyanya. "Gue pulang, tetapi cuma jadi tempat singgah untuk tidur sementara. Lagu ini pun menyadarkan gue bahwa *home* bukan hanya sekadar rumah atau tempat tinggal, melainkan *home* merupakan orang-orang terdekat yang kita cintai," ungkap pria yang kerap diidentikkan dengan musisi John Mayer ini.

Kondisi pandemi membuatnya bisa berkumpul lama dengan keluarga di rumah. Bahkan, ia dapat mengamati perkembangan putrinya dengan saksama. Hal yang sebelumnya sukar terjadi karena kesibukannya.

Lagu ini juga membuka perjalanan album barunya yang akan dirilis pada 2021. Dalam proses singelnya kali ini, *mastering* ditangani *mastering engineer* dari Sterling Sound, yakni Greg Calbi. Seperti diketahui, Greg juga pernah menangani musisi Kacey Musgraves yang meraih Record of The Year 2019 dalam ajang Grammy Awards. (IAN)

Paul R Milgrom dan Robert B Wilson

Memilih Pemenang Lelang Terbaik

Bayangkan ada tender untuk pekerjaan umum, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, atau infrastruktur lainnya. Bagaimana memilih perusahaan yang paling layak sebagai pemenang? Apakah peserta dengan harga terendah otomatis menang? Tidak. Sebab, peserta berharga terendah bisa terkena "winner's curse"; karena mengajukan harga sangat rendah berisiko tidak dapat menjual hasilnya dengan tarif efisien kepada masyarakat.

Simon Saragih

"Bagaimana memutuskan penawar terbaik? Itulah yang ditemukan dalam dasar teori lelang yang disusun Paul R Milgrom dan Robert B Wilson," kata Goran K Hansson, Sekretaris Jenderal Akademi Sains Kerajaan Swedia, di Stockholm, Swedia, Senin (10/10/2020).

Teori lelang tersebut, yang telah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu, membuat Akademi Sains Kerajaan Swedia menganugerahi dua ekonom AS, Paul R Milgrom (72) dan Robert B Wilson (83), Hadiah Nobel Ekonomi 2020. Keduanya akan berbagai hadiah uang sebesar 10 juta krona Swedia (1,1 juta dollar AS) atau setara Rp 15,9 miliar.

Temuan dua ekonom AS soal teori lelang terbaik itu muncul berdasarkan riset-riset pada dekade 1980-an hingga 1990-an. "Temuan-temuan Paul R Milgrom dan Robert B Wilson telah memberi manfaat kepada penjual, pembeli, dan para pembayar pajak di seluruh dunia," kata Hansson. Temuan ini, antara lain, didasarkan pada format lelang yang dikembangkan untuk pelelangan frekuensi radio, kuota penangkapan ikan, dan slot pendaratan pesawat di bandara.

Atas temuan tentang "perbaikan teori lelang dan temuan-temuan soal format baru lelang", demikian Akademi Sains Kerajaan Swedia saat memberi alasan pemberian Hadiah Nobel bagi dua ekonom AS tersebut. Jadi, bukan hanya teori lelang yang mereka temukan, melainkan juga soal bagaimana melaksanakan lelang yang baik.

Teori bisa ditemukan, tetapi mekanisme lelang juga amat menentukan sukses lelang. Jika teori lelang bagus, tetapi andaikan proses lelang, misalnya, dilakukan tertutup atau dengan kongkalikong, apalagi memakai katebelece, riwayat lelang pasti tidak menghasilkan kinerja ekonomi yang bagus bagi khalayak. Temuan dua ekonom ini juga mengingatkan soal iklim tender.

Lelang lewat internet, menurut Wilson, adalah juga format yang pantas dipikirkan karena asas keterbukaan dan bisa diakses semua pihak. Temuan mereka soal lelang ini amat menentukan manfaat besar yang didapatkan konsumen.

Teori lelang yang mereka temukan tidak terbatas pada lelang barang mewah, tetapi juga lelang di laman eBay. Bagaimana menawarkan produk untuk dilelang dengan harga yang layak sehingga menarik minat pembeli. Bagaimana mencegah "ketukan pemenang (*winner's curse*)", di mana pemenang berhasil menang tender dengan harga terendah, tetapi jalan umum yang dia bangun, misalnya, tidak bagus alias cepat rusak.

Teori lelang yang ditawarkan dua ekonom AS itu juga menyinggung soal iklim investasi, iklim persaingan, dan iklim ekonomi. Teori mereka banyak diterapkan, antara lain, dalam proyek-proyek Komisi Telekomunikasi Federal AS (Federal Communications Commission/-FCC), yang membuat lelang dilakukan dengan sistem yang transparan dan relatif penuh persaingan terbuka. "Tawaran dari kami soal rancangan lelang dipakai FCC," kata Milgrom.

Lelang yang baik, sekali lagi, harus memenuhi asas keterbukaan. Sebab, lelang itu sendiri relatif pelik. Pelelang dan pembeli sering tidak tahu bagaimana menentukan harga sebab ada informasi asimetris, alias informasi tidak lengkap. Mengatasi hal ini, Milgrom dan Wilson, misalnya, menawarkan solusi, seperti bagaimana memutuskan pemenang lelang. Maka, pelaksana lelang juga harus mengetahui harga-harga di pasar dan bagaimana profil perusahaan yang hendak dimenangkan dalam lelang.

Teori lelang yang mereka tawarkan menghindari mitos lelang, di mana proyek diberikan kepada penawar terendah tanpa kinerja. Juga menghindari pemberian lelang kepada penawar terendah yang merugikan peserta lelang. Pemenang yang baik pada umumnya adalah penawar dengan harga median. Dengan demikian, misalnya, jika itu terkait pembangunan jalan tol, pemenang proyek tidak kemudian mengenakan tarif tol terlalu tinggi.

Tidak kaget

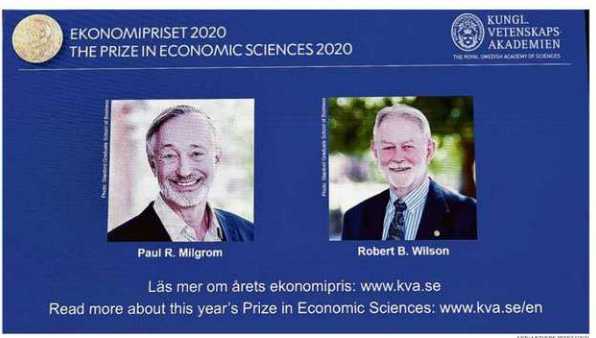
Dua ekonom peraih Hadiah Nobel kali ini sama-sama dosen di Stanford University, Stanford, California, AS. Karena zona waktu yang berbeda, Komite Nobel menelepon pemenang di pagi hari waktu California. Komite berhasil menghubungi Wilson, yang uniknya sepanjang hidupnya tidak pernah terlibat aksi lelang.

"Aku sendiri dapat kabar ini dari Wilson. Dia mengetuk pintu rumah saya di pagi hari sebab kami tinggal berdekatan," kata Milgrom. "Sungguh manis saya rasakan," kata Milgrom seraya mengatakan para mahasiswa, kerabat, serta kolega telah lama menyebutkan dia dan Wilson akan meraih Hadiah Nobel suatu saat.

Dua ekonom ini dulunya adalah dosen dan mahasiswa. Wilson menyebut Milgrom adalah mantan mahasiswanya yang tergolong genius soal teori lelang ini. Keduanya sudah bekerja bersama soal riset lelang sejak dekade 1970-an. Wilson lulusan ilmu manajemen dari Harvard University kemudian menjadi dosen di Stanford dan menjadi pembimbing tesis doktoral untuk Milgrom. "Semua ini adalah tentang membuat proses penentuan harga agar menjadi bermanfaat secara ekonomi," kata Wilson.

Wilson mengatakan akan memanfaatkan setengah hadiah miliknya untuk jalan-jalan, tetapi setelah pandemi berakhir. "Untuk sementara ditabung dulu, termasuk untuk keperluan istri dan anak-anak," kata Wilson. Keduanya juga tidak bisa hadir pada penyerahan resmi Hadiah Nobel pada Desember mendatang sehubungan dengan pandemi. "Nantilah perayaaannya kita lakukan setelah kondisi memungkinkan," kata Hansson.

Dalam jumpa pers saat pengumuman itu ada pertanyaan, mengapa peraih Hadiah Nobel Ekonomi selalu dari AS, bukan dari Asia, misalnya, yang kini sedang berjaya dalam perekonomian. Hansson berkata, sejak lama AS telah mengalokasikan dana besar untuk pendidikan dan hasilnya adalah riset-riset oleh akademisi AS yang dirasakan sekarang. "Kita lihat saja, apakah nanti akan ada perubahan secara gradual soal geografi para peraih Nobel," kata Hansson.



AFP/ANDERS WIKLUND

Paul R. Milgrom

Lahir: 20 April 1948, Detroit, Michigan AS.
Afiliasi:
- Stanford University, Stanford, CA, USA
- Meraih gelar PhD dari Stanford University, Stanford, USA, 1979

Robert B. Wilson

Lahir: 1937 di Geneve, Nebraska, AS
Afiliasi:
- Stanford University, Stanford, CA, USA
- Lulusan Harvard University, Cambridge, USA, 1963 dan kini Profesor Emeritus Manajemen di Stanford University, USA.

WARTA KEMENSOS

Komitmen Kemensos Salurkan Program Bantuan Sosial Tunai untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

MULYATI, penjahit di Surabaya, mengaku merasa senang mendapatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Baginya, tanpa melihat nominalnya, bantuan ini bisa meringankan biaya hidup sehari-hari.

"Bantuan ini bisa saya gunakan untuk bayar listrik atau beli beras. Bantuan ini bisa meringankan kehidupan sehari-hari saya. Karena saat pandemi sekarang, pendapatan dari menjahit saya jadi tidak tentu," ujarnya saat menghadiri Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di salah satu kantor pos di Surabaya, Rabu (7/10/2020).

Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Mat Ali, pengendara ojek di Surabaya yang juga menerima BST.

"BST membantu pendapatan ojek saya yang mulai sepi sejak Covid-19. Semoga kondisi ini segera berlalu dan bisa kembali seperti semula," ujarnya.

BST menjadi cara pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Seperti diutarakan Menteri Sosial Juliari P Batubara, program ini memang dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat.

BST merupakan bagian dari Kebijakan Jaring Pengaman Sosial dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari Covid-19. Adapun, kebijakan yang masuk ke dalam lingkup Kemensos adalah program sembako, bantuan sembako di Jabodetabek, Bantuan Sosial Tunai di luar wilayah Jabodetabek, BST bagi penerima program sembako non-PKH, dan bantuan sosial beras bagi penerima PKH.

"BST yang sudah berjalan April–Desember 2020 ini akan dilanjutkan lagi pada tahun depan. Rencana ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden. Adapun periodenya antara Januari hingga Juni 2021. Untuk besarannya, akan ada penyesuaian," ujar Menteri Sosial Juliari.

Kerja sama dengan Pos Indonesia

Dalam menyalurkan BST, Kemensos menggandeng Pos Indonesia dan Himbara. Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, Pos Indonesia dengan jaringannya mampu mengantarkan BST hingga ke pelosok dan daerah 3T.

"Kami melakukan 3 cara untuk mengantarkan BST untuk 9 juta KPM. Bagaimana caranya? Mengantarkan langsung ke alamat KPM, membentuk komunitas kecil di tingkat RT, RW, dan kelurahan, atau datang ke kantor pos terdekat. Jaringan kami berjumlah hampir 4.500 kantor pos," ujarnya.

Apresiasi pantas diberikan kepada pegawai pos yang mengantarkan BST. Faizal mengatakan, para pengantar pos itu sangat berdedikasi. "Ada yang harus naik kapal dan menembus hutan. Tantangan bertambah karena ini masih dalam pandemi Covid-19. Jadi, kami menambahkan prosedur keamanan dalam mengantarkan BST. Karena yang kami bawa adalah uang tunai," ujarnya.

Awalnya, kendala yang dirasakan adalah masalah pengumpulan data yang berdampak pada pembagian BST. Namun, sekarang, menurut Faizal, kendala itu makin berkurang drastis, salah satunya karena kehadiran Pos Giro Mobile Apps.

"Aplikasi ini mampu meminimalisasi kesalahan pembagian BST karena 1 KK hanya terdaftar 1 akun. Aplikasi ini juga mendokumentasikan semuanya dan datanya *real time*. Jadi, pihak Kemensos bisa melihat langsung sudah berapa banyak BST yang dibagikan. Data yang tidak *real time* biasanya wilayahnya terdapat *blank spot* sinyal internet. Namun, pembaruan data itu tidak akan lebih dari 2 hari," pungkas Faizal. [VTO]





FOTO-FOTO: DOK. KEMENSOS PICTURES/FEBRI

Penyaluran BST oleh Mensos didampingi Walikota Surabaya dan Dirut PT Pos Indonesia

BABAK BARU MASALAH KETENAGAKERJAAN

Pandemi Covid-19 memukul daya tahan tenaga kerja di Indonesia melalui serangkaian pemutusan hubungan kerja dan penurunan daya beli. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi menambah babak baru dalam permasalahan ketenagakerjaan.

WIRDATUL AINI

Dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja terlihat dari jumlah pekerja yang dirumahkan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 31 Juli 2020 menunjukkan, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan akibat terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang.

Kondisi operasional dunia usaha yang lesu membuat perusahaan merumahkan karyawannya. Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 10-26 Juli 2020 menunjukkan pengaruh pandemi Covid-19 yang memukul dunia usaha. Survei memperlihatkan, pendapatan 84 persen usaha mikro-kecil dan 82 persen usaha menengah-besar turun.

Berdasarkan survei BPS pada 7 Oktober, Covid-19 membuat 1706 persen perusahaan merumahkan tenaga kerja mereka tanpa memberikan bayaran. Bahkan, 12,83 persen perusahaan memberhentikan tenaga kerjanya dalam waktu singkat.

Beragam cara dilakukan perusahaan untuk mengurangi dampak yang kian dalam. Cara yang ditempuh antara lain mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan, serta memberhentikan pekerja dalam waktu singkat. Proporsi terbanyak perusahaan yang mengurangi pegawai di tengah pandemi ialah industri pengolahan, konstruksi, serta akomodasi makan dan minum.

Tren penurunan pendapatan dunia usaha yang disertai kebijakan pengurangan tenaga kerja terjadi bersamaan waktunya dengan kontraksi perekonomian nasional akibat pandemi serta penurunan investasi asing.

Kontribusi investasi

Realisasi penanaman modal asing atau *foreign direct investment* (FDI) sepanjang kuartal II-2020 turun 6,9 persen (*year on year*) menjadi Rp 97,6 triliun. Adapun dari aspek pertumbuhan ekonomi, kinerja perekonomian nasional pada kuartal II-2020 turun menjadi minus 5,32 persen. Pemerintah memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi kuartal III- 2020 berada pada kisaran minus 2,1 persen hingga 0 persen.

Padahal, sektor konsumsi dan investasi merupakan penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 2019, dari 5,02 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia, sumber tertinggi dari sektor konsumsi dan investasi, yakni, 2,73 persen dan 1,47 persen. Demikian pula tahun-tahun sebelumnya. Karena itu, dua variabel ini penting untuk mendorong perekonomian domestik.

Penurunan permintaan akibat pelemahan daya beli dapat berimbas pada kegiatan produksi dan investasi. Rangkaian persoalan ini menuntut efektivitas intervensi pemerintah, terutama dalam menangani peningkatan kasus Covid-19 agar pemulihan ekonomi tidak berjalan lambat. Hasil diskusi ekonomi *Kompas* pada Agustus lalu merunut tiga masalah utama yang menghambat penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Hambatan itu meliputi rantai birokrasi, pengawasan, dan potensi penyalahgunaan dana.

Masalah pertama merujuk pada proses administrasi dan regulasi yang panjang sebagai salah satu penyebab lambannya penangan.

Untuk menarik investasi, pemerintah dapat mencermati beberapa hal terkait iklim investasi nasional. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2018, investasi di Indonesia memang tidak ideal, tetapi juga tidak dalam posisi yang buruk.

Kontribusi investasi dalam produk domestik bruto Indonesia terus meningkat dan menjadi yang tertinggi di ASEAN. Pada 2018, pertumbuhan investasi di Indonesia sudah tinggi, bahkan lebih tinggi atau hampir sama dibandingkan dengan negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Hal yang perlu menjadi catatan, meskipun investasi di Indonesia cenderung meningkat, kemampuan investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melemah. Kondisi ini tecermin dari *incremental capital output ratio* (ICOR).

Dalam beberapa tahun terakhir, ICOR Indonesia semakin besar. ICOR Indonesia sebesar 6,4 pada tahun 2017, lalu 6,3 pada 2018, dan 6,6 pada 2019. Tingginya nilai ICOR ini menjelaskan bahwa investasi semakin tidak produktif. Selain itu, serapan investasi terhadap tenaga kerja juga cenderung turun dari 2013 hingga 2019.

Kondisi ini berarti penambahan investasi di Indonesia ternyata tidak diikuti dengan permintaan tenaga kerja secara signifikan. Artinya, dari sisi ekonomi, penggunaan investasi kurang tepat jika digunakan sebagai variabel utama meningkatkan lapangan pekerjaan.

Persoalan lain investasi di Indonesia ialah minimnya faktor-faktor yang mendukung kemudahan berbisnis untuk menarik investor. Apabila hal ini tidak diatasi, sulit tercipta peningkatan investasi dan lapangan kerja.

UU Cipta Kerja

Berdasarkan data survei Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada 2017, faktor penghambat utama investasi di Indonesia adalah permasalahan korupsi (13,8), inefisiensi birokrasi (11,1), akses pada pembiayaan (9,2), infrastruktur yang tidak memadai (8,8), dan kebijakan yang tidak stabil (8,6).

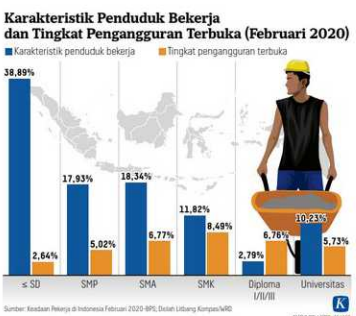
Survei ini menunjukkan bahwa Indonesia harus lebih dahulu menyelesaikan faktor utama tersebut dibandingkan masalah ketenagakerjaan. Pada survei ini, permasalahan ketenagakerjaan masih menempati posisi ke-11. Data tersebut menunjukkan, permasalahan utama investasi di Indonesia meliputi korupsi dan birokrasi yang tidak efisien. Justru penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi merupakan fokus prioritas yang dapat dilakukan untuk menarik investasi asing.

Kehadiran UU Cipta Kerja di tengah pandemi menambah babak baru dalam permasalahan ketenagakerjaan. Pemerintah bermaksud memberantas berbagai penghalang dalam perizinan, terutama korupsi perizinan dan inefisiensi yang ditimbulkannya.

Namun, sejumlah pasal disinyalir melemahkan hak-hak pekerja di hadapan pengusaha. Dibandingkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kondisi pengupahan, sistem kerja, dan pemutusan kerja lebih lemah. Hal ini berisiko membuka peluang PHK lebih luas dalam jangka pendek.

Sebagai contoh, status karyawan tetap masih ada dalam Pasal 56 RUU Cipta Kerja, tetapi bisa memicu pengalihan secara besar-besaran status pekerja dari pekerja tetap menjadi karyawan kontrak. Para pengusaha yang semena-mena memanfaatkan UU itu bisa membuat kondisi ketenagakerjaan semakin buruk, yang ujung-ujungnya memengaruhi iklim investasi. (LITBANG KOMPAS)





Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 berada pada kisaran minus 2,1 persen hingga 0 persen.



AP/AGUSTIN MARCARIAN



AP PHOTO/AGUSTIN MARCARIAN

"HOROR" DI LA PAZ MENANTI ARGENTINA

Bertandang melawan Bolivia di La Paz merupakan pengalaman yang menakutkan bagi banyak tim, termasuk Argentina. Tipisnya kadar oksigen akan menjadi masalah utama yang harus diatasi. Kali ini, tim Argentina datang ke La Paz dengan persiapan lebih baik.



AP PHOTO/BUDA MENDES

Penyerang Argentina, Lionel Messi, merayakan gol dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Ekuador (foto atas). Para pemain Argentina merayakan gol tunggal (foto tengah). Penyerang Brasil, Neymar, menggiring bola dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2020 melawan Bolivia (foto bawah).

LA PAZ, SENIN — Argentina kembali menjalani laga yang menantang melawan Bolivia pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu (14/10/2020) pukul 03.00 WIB. Laga tandang ke Stadion Hernando Siles di Laz Paz, Bolivia, yang berada di ketinggian sekitar 3.650 meter di atas permukaan laut ini selalu menjadi horor bagi Argentina ataupun tim lainnya.

Dari aspek ketinggian, pengalaman bermain sepak bola di stadion berkapasitas sekitar 41.000 penonton itu hampir sama seperti bermain sepak bola di puncak Gunung Semeru yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Kadar oksigen di tempat setinggi itu sangat tipis sehingga pemain yang tidak terbiasa akan sangat tersiksa.

Pemain bisa saja kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena mereka akan lebih banyak megap-megap dan mencari tabung oksigen daripada memikirkan strategi permainan. Argentina pernah punya pengalaman buruk seperti itu.

Argentina, ketika masih dilatih Diego Maradona, pernah kalah 1-6 di stadion ini saat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2010 pada April 2009. Hingga saat ini, setiap 1 April, warga Bolivia masih mengenang dan merayakan kemampuan timnas mereka menggilas Maradona dan bintang mudanya, Lionel Messi.

Mantan pemain Bolivia, William Ramallo, seperti dikutip La Nacion, pernah mengatakan bahwa seorang pemain hanya butuh beradaptasi di La Paz. "Pemain yang sudah terbiasa dengan ketinggian akan punya keuntungan untuk menyesuaikan diri. Namun, saat itu (laga pada 2009) merupakan laga pertama Messi dan ia tidak siap," katanya.

Namun, proses adaptasi itu tidak mudah. Pada 2013, juga di ajang kualifikasi piala dunia, Messi dan Argentina kembali ke La Paz dan masih tersiksa. Messi sampai muntah dan rekannya, Angel Di Maria, mencari masker oksigen. Saat itu, Argentina ditahan imbang Bolivia, 1-1.

Dalam dua kesempatan itu, Messi selalu menyampaikan pernyataan yang serupa. "Sangat mengerikan bermain di sana (La Paz), ketika habis sprint akan sulit untuk memulihkan stamina," kata Messi.

Terakhir Argentina datang ke La Paz pada 2017 untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2018 tanpa Messi dan mereka kalah 0-2. Adapun kemenangan langka Argentina di La Paz terakhir kali terjadi pada 2005 ketika masih ditangani pelatih Jose Pekerman dan pelatih Argentina sekarang, Lionel Scaloni, masih tampil sebagai pemain.

Proses aklimatisasi

Kali ini Scaloni mematangkan strategi agar para pemainnya siap bertanding di ketinggian. Ia telah mengajak skuadnya untuk berangkat lebih awal ke La Paz untuk menjalani proses aklimatisasi sejak Minggu (11/10/2020). Dengan demikian, mereka punya waktu selama dua hari untuk berlatih dan menyesuaikan diri di lingkungan berkadar oksigen tipis.

Scaloni pun memilih pemain yang benar-benar bugar untuk laga kali ini sehingga ia harus meninggalkan Paulo Dybala yang masih mengalami gangguan pencernaan. Pemain Juventus itu juga tidak tampil saat melawan Ekuador.

Kesiapan yang matang juga diperlukan Argentina karena mereka tidak hanya mengatasi masalah ketinggian, melainkan juga tekanan dari tim Bolivia. "Biarkan kami disebut jahat, tidak apa-apa. Kami memang ingin membuat setiap lawan menderita akibat pengaruh ketinggian," kata Pelatih Bolivia Cesar Farias, dikutip ESPN.

Bolivia baru saja dibantai Brasil, 0-5, pada laga pertama kualifikasi ini di Sao Paolo. Namun, saat bertandang ke Brasil itu Farias sengaja meninggalkan beberapa pemain kunci di La Paz sehingga mereka bakal menjamu Argentina dengan skuad yang lebih kuat.

"Bolivia akan sangat kuat. Kami akan mencoba bermain secerdik mungkin untuk mendapatkan tiga poin di sana," kata bek Argentina, Martinez Quarta, dilansir laman Asosiasi Sepak Bola Argentina. Bermain cerdik akan bisa dilakukan apabila para pemain sudah berhasil membangun kekompakan tim.

Menurut Quarta, tim belum menemukan kekompakan dan itu terlihat saat laga kontra Ekuador. Hal itu wajar terjadi karena laga kontra Ekuador merupakan laga pertama Argentina setelah vakum selama hampir satu tahun. Sebelum melawan Ekuador, Argentina menjalani laga persahabatan melawan Uruguay yang berakhir imbang, 1-1, pada November 2019.

Di sisi lain, tidak ada alasan bagi Argentina untuk tidak siap karena setiap laga di ajang kualifikasi piala dunia sangat krusial. Pada ajang kualifikasi Piala Dunia Rusia 2018, misalnya, Argentina sempat keteteran dan nyaris tidak lolos jika gagal meraih poin penting pada laga-laga terakhir.

Mereka tidak ingin hal serupa terulang. "Penting untuk terus meraih kemenangan sejak awal. Kami tahu betapa sulitnya kualifikasi ini," kata Messi, dikutip media Argentina, Ole.

(DOMINICUS HERPIN DEWANTO PUTRO)



FOTO-FOTO: KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

KALA PENARI BERADAPTASI DI DEPAN KAMERA DAN DI BALIK "FACE SHIELD"

Pandemi memaksa banyak pihak mencari cara baru untuk beradaptasi. Tak terkecuali para penari tradisional. Mereka kini harus membiasakan menari dengan ppelindung wajah dan menari di depan kamera agar tetap bisa berkesenian.

ANGGER PUTRANTO

Tangan Agus Haryanto (35) kaku memegang telepon selulernya. Ia harus memastikan gambar video yang ia rekam tidak terlalu banyak goyangan. Dari layar telepon seluler itu, ia memastikan para penarinya menari dengan indah.

Agus Haryanto, yang biasa disebut Cak Anto, merupakan pemimpin sanggar tari Cinde Sutro. Sabtu (3/10/2020), sejumlah penarinya menghibur para tamu di Hotel Ketapang Indah, Banyuwangi. Penampilan mereka malam itu merupakan yang ketiga kali sejak awal pandemi di bulan Maret.

"Banyak penyesuaian yang harus dilakukan menghadapi kondisi ini. Latihan di sanggar semakin jarang karena tanggapan juga hampir tidak ada. Dulu latihan bisa seminggu sekali. Tanggapan untuk hajatan atau gelaran festival juga pasti ada dalam seminggu. Sejak Maret sampai Juni, kami sama sekali tidak tampil. Sejak Juni sampai sekarang baru ada tiga kali tanggapan," katanya.

Malam itu, selain menghibur para tamu hotel, penampilan anak asuh Cak Anto dari sanggar Cinde Sutro itu juga disiarkan langsung melalui sejumlah media sosial Banyuwangi Tourism milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.

Setidaknya sudah tiga kali Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi menggelar pertunjukan kesenian daring melalui siaran langsung di media sosial. Selain menyiarkan pertunjukan secara daring, salah satu penyesuaian yang juga dilakukan adalah meminta para penari dan penabuh gamelan untuk tetap mengenakan masker atau pelindung wajah (*face shield*).

Anto mengatakan, di tengah tiadanya permintaan untuk tampil, pihaknya justru harus mengeluarkan biaya untuk membeli *face shield* bagi penari dan masker bagi penabuh gamelan. Hal itu merupakan salah satu adaptasi baru kesenian tari tradisional.

"Semula, kami minta para penari mengenakan masker dan *face shield*. Tetapi, mereka mengeluh pengap kalau harus menari menggunakan masker. Akhirnya mereka kami izinkan hanya menggunakan *face shield*," ungkap Anto.

Hal itu diambil karena selama beraksi, para penari tidak bercakap-cakap. Lagi pula, apabila dipaksakan menggunakan masker, Anto khawatir para penari justru tidak fokus pada gerakan tari karena kesulitan bernapas.

Namun, Anto tetap meminta para penabuh gamelan untuk mengenakan masker. Pasalnya, para penabuh gamelan duduk berdekatan. "Tetapi, kasihan juga mereka. Karena pakai masker, mereka sulit berkoordinasi. Untuk *ngobrol*, mereka harus teriak agar bisa dimengerti," ujarnya.

Pengalaman menari menggunakan masker dan *face shield* pernah dirasakan Ajeng Dyah Purbaningrum (17) dan Ike Muji Ayu Farista (21). Keduanya kompak mengatakan, menari menggunakan masker dan *face shield* itu tidak mudah, tidak nyaman, tetapi juga tidak bisa ditawar.

Ajeng, penari dari sanggar Langlang Buana, menceritakan, dirinya pertama kali mencoba menari pakai masker dan *face shield* saat pembuatan video promosi pariwisata normal baru (*new normal*). Karena untuk pengambilan gambar, Ajeng tidak terlalu merasakan kesulitan karena hanya sesekali menari.

"Namun, saat diminta menari di acara kunjungan Presiden Joko Widodo, saya baru merasakan susahnya menari menggunakan masker dan *face shield*. Rasanya pengap, panas, tidak nyaman, dan susah bernapas. Tetapi, ya, mau bagaimana lagi daripada enggak dapat tanggapan, he-he-he...," tuturnya sambil bercanda.

Menari menggunakan *face shield* juga tidak semudah yang terlihat. Muji, penari dari sanggar Cinde Sutro, mengatakan, kendati menari menggunakan *face shield* lebih mudah untuk bernapas ketimbang menggunakan masker, pergerakan penari juga jadi lebih sulit.

"Saya pernah menari di pinggir pantai menggunakan *face shield*. Tahu sendiri angin di pinggir pantai seperti apa. Itu *face shield* rasanya ingin terbang. Tidak mudah menari menggunakan *omprok* (mahkota penari gandrung) dan *face shield*, takut jatuh," ujarnya.

Kini, masker dan *face shield* memang menjadi tameng pelindung bagi para penari. Keduanya menjadi salah satu upaya adaptasi para penari di tengah masa pandemi.

Pertunjukan daring

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi juga terus berupaya mencari jalan agar para pelaku seni dan sanggar seni terus menggeliat di masa-masa sulit pandemi. Salah satunya dengan memfasilitasi pertunjukan daring. Pertunjukan itu disiarkan melalui media sosial Banyuwangi Tourism milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi Yanuarto Bramuda mengatakan, pihaknya menggelar pertunjukan di sejumlah hotel dan tempat lain. Hotel yang dijadikan lokasi pertunjukan merupakan hotel yang mengembangkan konsep *staycation*.

"Ini merupakan *reward* bagi hotel yang turut berupaya menjaga kunjungan wisatawan. Kami menyediakan pertunjukan di hotel bagi tamu *staycation* yang menginap. Nantinya pertunjukan tersebut juga kami siarkan melalui media sosial," tuturnya.

Bramuda mengatakan, pertunjukan tersebut juga ditujukan untuk membantu sanggar-sanggar seni yang selama pandemi kesulitan mendapatkan tanggapan. Melalui pertunjukan daring tersebut, diharapkan sanggar seni tetap mendapat kegiatan dan tentunya pemasukan.

Sedikitnya ada 60 sanggar seni yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Mereka akan bergantian tampil secara daring di sejumlah tempat. Pertunjukan daring akan digelar seminggu tiga kali. Dalam sehari bisa ada dua kali hingga tiga kali pertunjukan daring.

"Sekali tampil, sanggar seni mendapat Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Sementara sanggar jaranan dan barong mendapat Rp 5 juta hingga Rp 6 juta. Adapun sanggar janger mendapat Rp 8 juta hingga Rp 10 juta," ungkap Bramuda.

Hingga Kamis (8/10), pertunjukan kesenian daring melalui media sosial Banyuwangi Tourism sudah digelar lima kali. Antusiasme warga cukup baik. Aneka komentar positif disematkan melalui kolom komentar.

Bahkan, penontonnya tidak hanya dari Banyuwangi saja. Beberapa tenaga migran yang menonton juga menyambut baik pergelaran tersebut. Salah satu penontonnya ialah Zalaikha yang sedang berada di Taiwan.

"Taiwan hadir.... Tetap semangat *dulur-dulur lare* Osing Banyuwangi. Tetap berkesenian di tengah pandemi yang sulit ini. *Marai hun* kangen Banyuwangi *ikai* (membuat saya rindu Banyuwangi ini)," tulisnya.

Sambutan baik juga disampaikan Opik (36), pedagang bakso sekaligus penggemar kesenian jaranan di Banyuwangi. Pertunjukan daring cukup memuaskan kerinduannya menonton kesenian yang sudah tujuh bulan lamanya tidak digelar.

"*Kadung mbiyen, ono jaranan nang ndi byaen hun teksni. Hun nonton ambi bakalan bakso. Saiki, hun malah iso nonton nang ndi byaen. Hing usah adoh-adoh.* (Kalau dulu, di mana ada jaranan pasti saya datangi. Saya *nonton* sambil jualan bakso. Sekarang saya justru bisa menonton dari mana saja. Tidak perlu jauh-jauh.) Buka HP, buka Youtube, langsung *nonton*," tuturnya.

Namun, menurut Opik, tetap ada yang hilang dari pertunjukan daring tersebut. Keramaian dan sorak-sorai penonton tak bisa ia rasakan. Ia juga tidak bisa merasakan peningkatan penjualan seperti biasanya saat ia berjualan di lokasi pertunjukan jaranan.

Berbagai adaptasi telah dilakukan agar berkesenian tetap menggeliat di tengah pandemi. Penari dan penabuh gamelan mencoba beradaptasi dengan mengenakan masker dan *face shield*. Penonton pun mencoba beradaptasi dengan suasana baru menonton secara daring.

Pandemi memang memukul banyak sendi kehidupan, termasuk berkesenian. Namun, dengan kesenian itu pula, mereka mencoba bangkit dengan berbagai upaya adaptasi.



Penari gandrung menggunakan face shield ketika tampil di depan para tamu Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, Sabtu (3/10/2020). Penggunaan face shield menjadi salah satu cara adaptasi para seniman tradisional di tengah masa pandemi (atas). Penari saling memasangkan face shield ketika hendak tampil (bawah).



KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Tampilan fitur pelacakan riwayat bepergian dalam aplikasi JAKI, Senin (12/10/2020). Ada dua pilihan pelacakan, yakni melalui aplikasi berbasis peranglat Bluetooth (PeduliLindungi) dan berbasis pemindaian QR Code (Jejak).

PEMANFAATAN TEKNOLOGI PELACAKAN BELUM OPTIMAL

Teknologi pelacakan riwayat bepergian untuk mencegah penularan virus korona baru belum banyak dipahami warga. Meski sejumlah fitur makin mutakhir, warga kurang mengetahui informasi terkait teknologi berupa aplikasi ponsel tersebut.

FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY, FAJAR RAMADHAN, SEKAR GANDHAWANGI, & ADITYA DIVERANTA

Selama tujuh bulan pandemi Covid-19, pemerintah menggencarkan penggunaan fitur pelacakan riwayat bepergian dan kontak fisik lewat ponsel. Aplikasi ini meliputi PeduliLindungi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), serta aplikasi JAKI dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Walakin, penggunaan kedua aplikasi tersebut masih minim di kalangan publik. Pantauan *Kompas*, Senin (12/10/2020), belum banyak warga yang memanfaatkan fitur pelacakan lewat ponsel itu.

Sumardjo (50), dosen perguruan tinggi di bilangan Grogol, Jakarta Barat, sempat mengunduh aplikasi PeduliLindungi pada Agustus silam. Penggunaan aplikasi yang mensyaratkan perangkat Bluetooth tetap menyala itu membuat baterai ponsel cepat habis. Alhasil, aplikasi tersebut dihapusnya setelah digunakan hanya beberapa hari.

"Ditambah lagi, informasi orang yang kontak erat atau bahkan positif Covid-19 lewat aplikasi itu hampir tidak ada. Saya mengira, mungkin aplikasi itu tak optimal karena penggunanya sedikit. Akhirnya saya hapus," ujar Sumardjo, Senin siang.

Nuraini (35), pembeli di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, juga tak mengetahui fitur pelacakan riwayat bepergian dalam aplikasi JAKI. Fitur bernama Jejak dalam aplikasi itu tidak pernah diketahuinya sejak pertama kali mengunduh JAKI di ponsel. Padahal, fitur Jejak bergantung pada keaktifan pengguna dalam memindai kode pembaca cepat (QR Code) yang disediakan di setiap lokasi.

Adityo Nugroho (32) sempat mencoba fitur Jejak dalam aplikasi JAKI. Dia menilai, fitur ini sangat rumit dan mensyaratkan pemasangan sejumlah aplikasi baru. "Saya semula memakai JAKI untuk memantau informasi banjir dan Covid-19. Saya sempat juga memasang fitur pelacakan, tapi waktu itu sepertinya masih dalam versi percobaan," ujarnya.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City (JSC) Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika DKI Jakarta Yudhistira Nugraha menuturkan, penggunaan aplikasi pelacakan kontak gencar seiring dengan berlakunya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi per 12 Oktober.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Minggu (11/10/2020), meminta seluruh sektor usaha di Jakarta memiliki QR Code untuk pelacakan riwayat bepergian warga secara digital. Kode ini juga memudahkan penyelidikan epidemiologi seperti yang diminta dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101/2020.

"Semua (sektor usaha) kami minta memiliki QR Code sehingga kalau orang datang ke restoran, pencatatan bisa berlangsung secara otomatis. Kami harap pendataan secara manual dan digital berlangsung selama dua minggu ke depan," ujar Ahmad Riza di Ciganjur, Jakarta Selatan.

Kesempatan kerja

Sementara itu, PSBB transisi tahap kedua di Jakarta menjadi harapan bagi sebagian pekerja untuk kembali mendapatkan pemasukan.

Puluhan meja dan kursi tertata rapi di rumah makan Bebek Kepahiang Babase Bendungan Hilir (BKB Benhil). Sejak Senin pagi, rumah makan ini siap menjamu kembali pengunjung dengan ketentuan maksimal 50 persen dari kapasitas.

Untuk itu, manajemen memanggil para pelayan yang dirumahkan selama PSBB lalu. "Pelayan yang kami rumahkan sudah dipanggil lagi hari ini," kata Diah, Manajer BKB Cabang Benhil, Senin.

Lebih dari separuh pelayan terpaksa dirumahkan tanpa bayaran sejak 14 September bersamaan dengan ketentuan PSBB yang melarang aktivitas makan di tempat. Dari 13 pelayan, delapan orang dirumahkan. Lima pelayan yang tersisa bekerja dalam dua sif setiap hari.

Meski delapan pelayan yang sebelumnya dirumahkan ditarik kembali, manajemen masih mengevaluasi penjualan. "Kami akan menyesuaikan dengan target penjualan per hari. Kalau nantinya target itu tidak tercapai, kemungkinan jumlah (pelayan) akan kami turunkan lagi," ujar Diah.

Adapun jumlah karyawan yang bertugas di dapur selama PSBB dan PSBB transisi tetap sama. Dalam satu kali sif, setidaknya ada lima orang yang bertugas.

Meski sudah kembali melayani makan di tempat, manajemen rumah makan Saung Kito Cabang Jalan Tanjung Duren Barat, Jakarta Barat, belum menambah jumlah pelayan. Pada Senin, mereka mempekerjakan tiga orang saja. "Karena kemarin kami enggak melayani makan di tempat, pelayan kami kurangi dulu," kata Supervisor Saung Kito Tanjung Duren Okta Kurniawan.

Pelayan di Saung Kito sebelumnya berjumlah enam orang. Semenjak PSBB, jumlahnya dipangkas menjadi tiga orang. Tiga pelayan lainnya dipindahkan ke rumah makan cabang area Jabodetabek. "Mereka dipindahkan ke rumah makan cabang yang tidak melakukan PSBB, misalnya di cabang Depok atau Tangerang Selatan," ucap Okta.

Sejak Minggu (11/10), manajemen membersihkan semua area makan, termasuk meja, kursi, dan saung. Tidak hanya itu, mereka juga memasang partisi plastik di antara saung-saung untuk mencegah penularan virus melalui droplet.

Meskipun diperbolehkan makan di restoran, tidak semua warga memanfaatkan kesempatan ini. Suwastika Wijayanti (24), warga Koja, Jakarta Utara, masih mempertimbangkan untuk kongko meskipun bisa menjadi cara melepas stres. Di tempat kongko ada potensi keramaian setelah sebulan pengetatan.

Ibadah

Di masa PSBB transisi ini, publik diperbolehkan beribadah kembali di rumah ibadah. Pengurus rumah ibadah bertekad memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat saat menyambut warga.

Sekretaris Ketua Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Pangeran Arsyad Ihsanulhaq mengatakan, pada masa PSBB transisi, masjid hanya akan dibuka untuk publik saat shalat Jumat. Jemaah diminta membawa alas shalat sendiri, mengenakan masker, diukur suhu tubuhnya, dan mematuhi semua protokol kesehatan di masjid.

"Saat ini shalat lima waktu belum akan diselenggarakan di masjid ini. Ini langkah antisipasi untuk meminimalkan kemungkinan infeksi Covid-19. Sebab, masjid ini sering didatangi orang dari sejumlah daerah, tidak hanya Jakarta," tutur Pangeran saat dihubungi, Senin (12/10/2020).

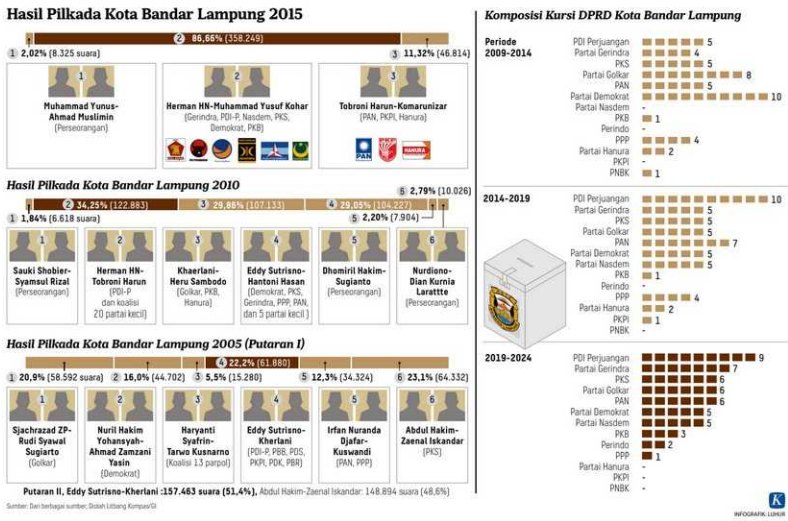
Sebelumnya, Masjid Agung Sunda Kelapa tutup selama pandemi, kemudian buka kembali saat PSBB transisi jilid I pada Juni 2020. Masjid kembali ditutup saat Pemprov DKI Jakarta mengetatkan PSBB pada September 2020. Masjid akan buka kembali selama PSBB transisi bulan ini.

Pangeran mengatakan, khatib diminta memberi khotbah singkat saat shalat Jumat, yakni 10-15 menit. "Jemaah masing-masing diberi jarak 2 meter. Dengan pengaturan itu, kapasitas jemaah di ruang ibadah utama hanya 16 persen."



KOMPAS/ADITYA DIVERANTA

Baliho yang memperingatkan bahaya Covid-19 terpasang di Pasar Kramatjati, Jakarta Timur, Senin (12/10/2020).



TIKET EMAS PARTAI BANTENG

Pilkada serentak 2020 di Kota Bandar Lampung menjadi semacam ujian dan ajang pembuktian bagi soliditas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam tiga kali penyelenggaraan pilkada sebelumnya di ibu kota Provinsi Lampung ini, pasangan calon yang diusung partai ini selalu menjadi pemenang. Pasangan calon kepala daerah yang diusung PDI-P seperti menggenggam tiket emas.

GIANIE

Pada pilkada 9 Desember nanti terdapat tiga pasangan calon yang maju memperebutkan kursi orang nomor satu di Kota Bandar Lampung. Pasangan nomor urut satu ialah Rycko Menoza-Johan Sulaiman yang diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Di nomor urut dua, pasangan Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo diusung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara nomor urut tiga ialah pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah yang diusung PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem.

Dilihat dari penguasaan kursi di DPRD, kekuatan parpol yang mengusung pasangan Eva Dwiana-Deddy Amarullah menjadi yang terbesar dengan 21 kursi (42 persen). Adapun Muhammad Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo yang diusung oleh lima parpol menguasai 17 kursi (34 persen). Muhammad Yusuf Kohar merupakan petahana Wakil Wali Kota Bandar Lampung, sedangkan pasangan Rycko Menoza-Johan Sulaiman diusung dua parpol dengan penguasaan 12 kursi atau 24 persen.

Koalisi PDI-P dalam mengusung calon wali kota dan calon wakil wali kota Bandar Lampung cenderung berbeda-beda dari pilkada ke pilkada. Meski demikian, PDI-P menjadi poros kekuatan yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan pasangan calon karena mesin partai bekerja dalam menguasai semua wilayah.

Dinamika PDI-P

Pada Pilkada 2005, PDI-P mengusung pasangan yang akhirnya terpilih, yaitu Eddy Sutrisno-Kherlani dengan berkoalisi bersama lima partai lain, yaitu PBB, PDS, PKPI, PDK, dan PBR. Pasangan ini harus melalui dua putaran pilkada karena pada putaran pertama tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 25 persen plus satu. Pilkada putaran kedua di Kota Bandar Lampung ini menjadi yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Pada pilkada berikutnya tahun 2010, Wali Kota Eddy Sutrisno dan Wakil Wali Kota Kherlani kembali maju untuk bertarung, tetapi pecah kongsi. Namun, tidak satu pun dari keduanya didukung oleh PDI-P. PDI-P justru mengusung pasangan baru, yaitu Herman Hasanusi (HN)-Tobroni Harun, dan berkoalisi dengan 20 partai kecil.

Pasangan calon yang diusung PDI-P ini pun berhasil mengalahkan lima pasangan calon lain dengan perolehan 122.883 suara atau 34,25 persen. Pada pilkada kali ini, tiga pasangan calon maju dari jalur perseorangan untuk menguji peruntungan.

Pada Pilkada 2015, PDI-P kembali mengusung Herman HN sebagai calon wali kota untuk periode yang kedua, tetapi berganti pasangan. Adalah Muhammad Yusuf Kohar yang berlatar belakang sebagai pengusaha terpilih sebagai calon wakil wali kota pendamping Herman. Wakil Wali Kota Tobroni Harun maju sebagai calon wali Kota menantang Herman, berduet dengan Komarunizar.

Pasangan Herman HN-M Yusuf Kohar diusung PDI-P, berkoalisi bersama lima partai lain, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKS, Partai Demokrat, dan PKB. Pasangan ini meraih kemenangan dengan perolehan 358.249 suara atau 86,66 persen. Mereka mengalahkan pasangan Tobroni Harun-Komarunizar yang diusung PAN, PKPI, dan Hanura dan pasangan Muhammad Yunus-Ahmad Muslimin dari jalur perseorangan. Pada Pilkada 2015 ini, Golkar tidak ikut mengajukan atau mengusung pasangan calon tertentu meski saat itu memiliki lima kursi di DPRD.

Langkah Herman HN terhenti dalam kontestasi tingkat kota karena sudah menjabat wali kota selama dua periode. Sementara petahana Wakil Wali Kota M Yusuf Kohar kembali maju bertarung berpasangan dengan Tulus Purnomo Wibowo pada Pilkada 2020, tetapi tidak dengan kendaraan PDI-P.

PDI-P meninggalkan petahana wakil wali kota dan memilih pasangan baru, yaitu Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Eva ialah istri Wali Kota Herman HN yang juga anggota dewan di tingkat provinsi.

Peluang

Di atas kertas, pasangan Eva Dwiana-Deddy berpeluang mendulang suara terbanyak. Pasangan ini didukung tiga partai (PDI-P, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem) yang menguasai mayoritas kursi di DPRD, yaitu 21 kursi (42 persen). PDI-P dan Gerindra merupakan dua partai pemenang di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 lalu. Mesin kedua partai ini tentu akan berperan besar dalam mengumpulkan suara.

Modal sosial Eva Dwiana sebagai anggota dewan dan istri petahana tentu akan berkontribusi besar untuk kemenangan. Dari perspektif jender, calon perempuan wali kota pertama di Bandar Lampung tentu bisa menjadi "merek" yang cukup persuasif.

Meski demikian, persaingan ketat akan datang dari pasangan M Yusuf Kohar-Tulus Purnomo Wibowo yang diusung lima partai besar. Salah satunya adalah Partai Demokrat yang pernah menjadi pemenang pada Pemilu 2009. Posisi dan pengalaman M Yusuf Kohar sebagai Wakil Wali Kota Bandar Lampung sedikit banyak akan membantunya meraup suara menyingkirkan Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Pilkada 2020 ini bagi Yusuf Kohar menjadi suatu pembuktian pula, apakah wakil wali kota yang maju pilkada bisa naik posisi ke kursi wali kota. Sejarah pilkada sebelumnya di kota ini memperlihatkan belum ada satu pun wakil wali kota yang ikut pilkada berikutnya bisa memenangi pilkada.

Tantangan bersama

Siapa pun pasangan calon yang nantinya memenangi kontestasi lokal di Kota Bandar Lampung ini menghadapi persoalan daerah yang tidak mudah. Terutama di bidang kesejahteraan sosial.

Kota Bandar Lampung yang berpenduduk 1.051.500 jiwa ini cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam satu dekade terakhir. Jika pada 2009 tercatat angka kemiskinan 123.890 orang atau 14,39 persen (sedikit di atas rata-rata nasional), tahun 2019 turun menjadi 91.240 jiwa atau 8,71 persen (di bawah rata-rata nasional).

Akan tetapi, problem utama di daerah ini adalah angka pengangguran yang masih tinggi, yang pada 2019 mencapai 7,12 persen. Angka ini yang tertinggi di Provinsi Lampung, yang rata-rata di angka 4,03 persen.

Selain itu, kualitas para pekerja di kota ini pun tergolong rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, pendidikan terakhir para pekerja di Bandar Lampung mayoritas adalah setingkat SMA ke bawah (79 persen). Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor jasa (77,75 persen). Hanya 1,41 persen yang bekerja di sektor pertanian. Selebihnya di sektor manufaktur.

Meski demikian, perekonomian Kota Bandar Lampung yang bertumpu pada sektor industri pengolahan (21,39 persen) dan perdagangan (14,5 persen) memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung selama periode 2015-2019 tercatat di kisaran 6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan persoalan mendasar di daerah seperti ini, perlu bagi pemilih untuk mencermati visi-misi dan program para pasangan calon yang menaruh perhatian pada hal yang langsung terkait dengan kehidupan keseharian masyarakat. Sejauh mana mereka berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan.

Menciptakan lapangan pekerjaan memang menjadi tugas berat di tengah kondisi pandemi seperti sekarang. Namun, hal itu sangat perlu dilakukan. Termasuk juga meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mengingat, meningkatkan kualitas tenaga kerja memiliki dampak berantai terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

(LITBANG KOMPAS)

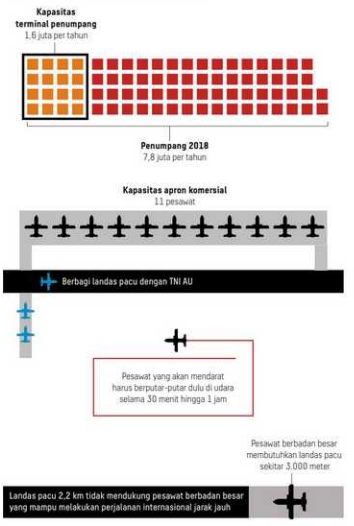


Suasana rapat koordinasi persiapan Pilkada 2020 di Bandar Lampung, Senin (31/8/2020).

Mengapa Yogyakarta Butuh Bandara Baru?

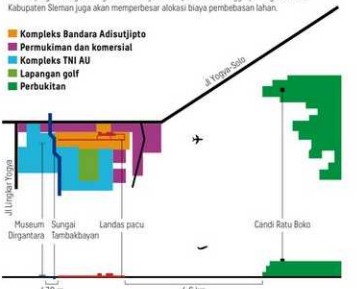
Terbatasnya kapasitas terminal penumpang dan landas pacu serta kepadatan wilayah di sekitar Bandara Adisutjipto menjadi penyebab utama pembangunan bandara baru di DI Yogyakarta. Saat ini, Bandara Adisutjipto masih digunakan untuk penerbangan komersial pesawat berpenggerak baling-baling dan pesawat jet pribadi.

Kapasitas Bandara Adisutjipto Terbatas



Kawasan Sekitar Bandara Adisutjipto

Kondisi alam di sekitar Bandara Adisutjipto kurang ideal untuk perluasan landas pacu karena berdampingan dengan sungai dan tidak jauh dari perbukitan. Tingginya harga tanah di Kabupaten Sleman juga akan memperbesar alokasi biaya pembebasan lahan.

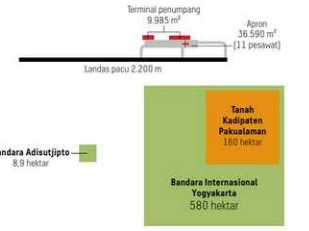


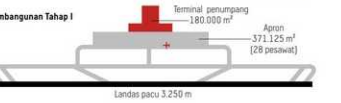
Lahan di lima desa di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, yakni Glagah, Palihan, Sindutan, Jangkaran, dan Kebonrejo, dipilih sebagai lokasi pembangunan bandara baru. Sejumlah sarana pendukung akses dari dan menuju Kota Yogyakarta akan dibangun, salah satunya adalah pembangunan jalur kereta api.



Perbandingan Luas Area

Acara peletakan batu pertama menjadi awal pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta pada Jumat, 27 Januari 2017. Pembangunan dibagi dalam tiga tahap hingga rencananya akan terbangun terminal yang mampu menampung 25 juta penumpang per tahun dan landas pacu sepanjang 3.600 meter pada 2046.



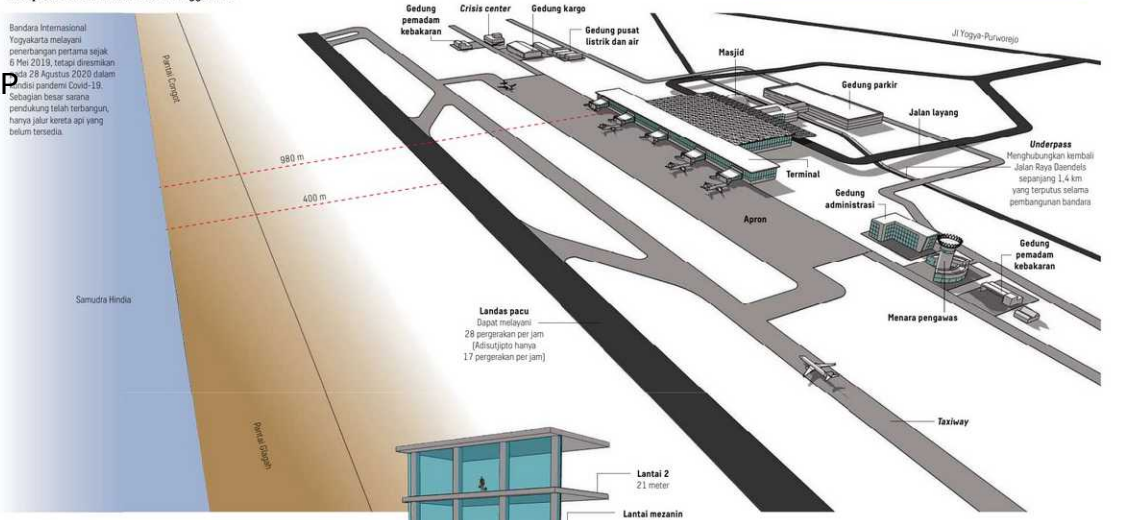


Lahan bandara baru membutuhkan banyak timbunan tanah untuk menyesuaikan elevasi dan menguatkan struktur tanah. Volume timbunan yang tersedia di muara Sungai Bogowonto 3,5 juta m³ dan di muara Sungai Serang 2 juta m³.



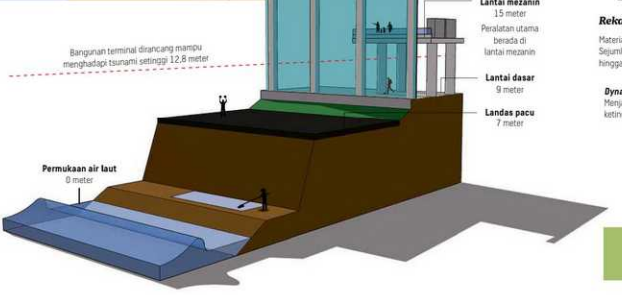
Kompleks Bandara Internasional Yogyakarta

Bandara Internasional Yogyakarta melayani penerbangan pertama sejak 6 Mei 2019, tetapi diresmikan pada 28 Agustus 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19. Sebagian besar sarana pendukung telah terbangun, hanya jalur kereta api yang belum tersedia.



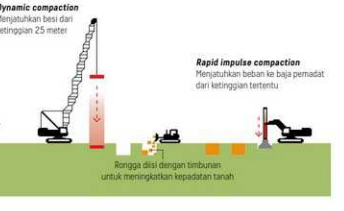
Perbandingan Ketinggian

Di dalam simulasi, tsunami diperkirakan menjangkau apron dalam hitungan 37 menit setelah gempa besar. Dalam jangka waktu tersebut direncanakan agar seluruh pesawat telah meninggalkan bandara.



Rekayasa Tanah

Material permukaan tanah di kawasan pesisir berupa pasir halus dengan muka air yang tinggi. Sejumlah rekayasa pada lahan dan struktur bangunan digunakan untuk mengantisipasi gempa hingga magnitudo 8,5; tsunami setinggi 12,8 meter; serta likuefaksi.

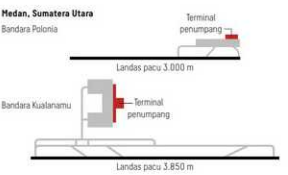


Sejumlah Kota yang Memindahkan Bandara

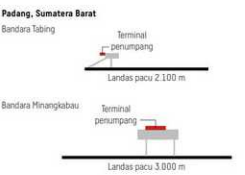
Sebelum dibangun Bandara Internasional Yogyakarta, sejumlah kota juga telah membangun bandara baru untuk meningkatkan daya tampung penumpang dan pesawat seiring meningkatnya mobilitas warga serta wisatawan.



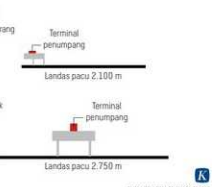
Medan, Sumatera Utara



Padang, Sumatera Barat



Mataram, NTB



Sumber: Angkasa Pura Airports, Google Earth, Pemberitaan Kompas

INFOGRAFIK: SOVAN, IGNAS